

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN DI KELURAHAN
KOTAWARINGIN HILIR KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

H. GUSTI BURHANI

NIM: 018264264

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA**

2014

ABSTRAK**Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat.**

H. Gusti Burhani
Universitas Terbuka
gustiburhani@gmail.com

Kata Kunci : Implementasi, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap Pelaksana, Struktur Birokrasi

Kemiskinan dan pengangguran menjadi masalah yang penting saat ini di Indonesia, sehingga menjadi suatu fokus perhatian bagi pemerintah Indonesia. Pemecahan masalah kemiskinan memerlukan pendekatan terpadu, terencana, berkesinambungan, dan menuntut keterlibatan berbagai pihak. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan Pemberdayaan Masyarakat melalui PNPM Mandiri Perdesaan yang meliputi kegiatan pembimbingan, penyuluhan, pelayanan, pelatihan dan pemfasilitasan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti kesehatan, pendapatan, pendidikan dan konsumsi sehari-hari. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Kotawaringin Hilir, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat dan faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung dalam Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat belum berjalan secara optimal karena kurangnya partisipasi masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, perguliran dana tidak dikelola dengan baik dan kerjasama antar desa kurang berjalan dengan baik. Adapun faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu : Komunikasi, ketidakjelasan dan kurangnya informasi tentang PNPM Mandiri Perdesaan membuat pelaku di desa kurang bisa memahami tentang PNPM Mandiri Perdesaan. Sumber Daya, terkait dengan kemampuan pelaksana dalam memberikan informasi, kompetensi, kecukupan sarana dan prasarana pendukung masih belum optimal. Disposisi/Sikap Pelaksana dalam menanggapi PNPM Mandiri Perdesaan kurang mendukung sehingga terjadi penunggakan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Struktur Birokrasi, terkait dengan ketersediaan *Standard Operating Procedures* (SOP), Kelurahan Kotawaringin Hilir tidak memiliki SOP terkait dengan implementasi PNPM Mandiri Perdesaan serta pembagian tanggung jawab bagi para pelaksana belum dilaksanakan dengan baik

ABSTRACT

The Implementation of Community Empowerment National Program (PNPM) Rural Independent in Kotawaringin Lama dorp, Subdistrict of Kotawaringin Barat Regency.

H. Gusti Burbani
Universitas Terbuka
gustiburhani@gmail.com

Keywords : Implementation, Communication, Resources, disposition/practitioners attitude, bureaucracy structure.

Poverty and unemployment become the recent crucial problem in Indonesia, thus they become a focus interest of Indonesian government. Solving problem of poverty needs integrated, planned, continuous approach, and demands the involvement of various parties. The approach taken is community empowerment through PNPM Rural Independent includes guiding activities, counseling, services, trainings, and facilitating to the community those can influence the prosperity to meet daily needs as health, income, education and daily consumptions. The research was taken in Kotawaringin Lama dorp, problems *discussed in this research* were how the implementation of PNPM Rural Independent in Kotawaringin dorp Sub-district of Kotawaringin Barat Regency was and what kinds of factors that inhibit and support the implementation of PNPM Rural Independent in Kotawaringin Lama dorp Sub-district of Kotawaringin Barat Regency were. It was a qualitative research with descriptive inductive approach method. Procedures of collecting the data were interview, observation, and documentation.

As the research result, the implementation of PNPM Rural Independent in Kotawaringin Lama dorp Sub-district of Kotawaringin Barat Regency had not run optimally yet since the delay of disbursement of BLM funds which is conducted by delays in reporting thus made Kotawaringin Lama dorp could not reach the target completion of PNPM Rural Independent in Kotawaringin Lama dorp Sub-district of Kotawaringin Barat Regency programs 2011 on August 2011. There were some support and inhibit factors of the implementation of PNPM Rural Independent in Kotawaringin Lama dorp Sub-district of Kotawaringin Barat Regency, such as communication, concerned with the suboptimal coordination and socialization that made rural practitioners could not comprehend PNPM Rural Independent well; recourse, concerned with practitioners ability in giving the information, competence, adequacy of supporting facilities and infrastructures were not optimal yet; disposition/ practitioners attitude in responding PNPM Rural Independent less support that occurred arrears Women Credit (SPP); bureaucracy structure, concerned with the availability of Standard Operating System (SOP), Kotawaringin dorp did not have any SOP related to the implementation of PNPM Rural Independent, more over the division of practitioners' responsibilities had not implemented well yet.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul “Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat” adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (Plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Panglangka Raya, Januari 2014

Yang Menyatakan



H. Gusti Burhani
NIM. 018264264

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)**

JUDUL TAPM : **IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)
MANDIRI PERDESAAN DI KELURAHAN
KOTAWARINGIN HILIR KECAMATAN
KOTAWARINGIN LAMA KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT.**


NAMA : H. Gusti Burhani

NIM : 018264264

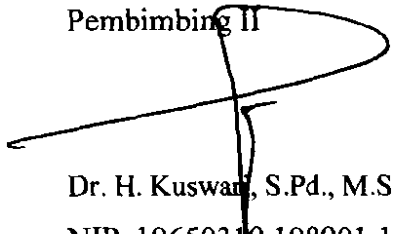
PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)/90

Hari/ Tanggal : Rabu/ 29 Januari 2014

Pembimbing I


Dr. Kismartini, M.Si
NIK. 19610328 198603 2 001

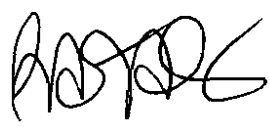
Pembimbing II


Dr. H. Kuswan, S.Pd., M.Si
NIP. 19650319 198901 1 004

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu/

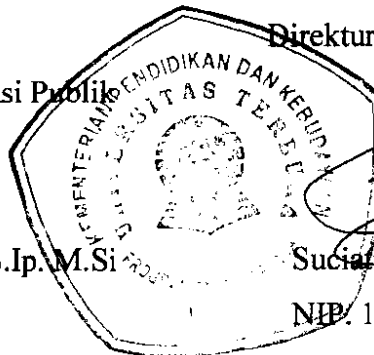
Program Magister Administrasi Publik


Florentina Ratih Wulandari, S.Ip. M.Si
NIP. 19710609 199802 2 001

Direktur Program Pascasarjana,


Suciati, M.Sc., Ph.D.

NIP. 19520213 198503 2 001



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

NAMA : H. Gusti Burhani
 NIM : 018264264
 PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)/90
 JUDUL TAPM : Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Di Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat.


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari / Tanggal : Rabu/ 29 Januari 2014
 Waktu : Pukul 09.00 – 11.00 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS / ~~TIDAK LULUS~~

Panitia Penguji TAPM

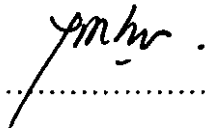
Ketua Komisi Penguji
 Dr. Sri Listyariyani, M.Ed.

: 

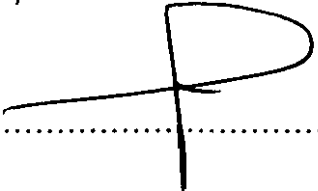
Penguji Ahli
 Dr. Sofjan Aripin, M.Si.

: 

Pembimbing I
 Dr. Kismartini, M.Si.

: 

Pembimbing II
 Dr. H. Kuswari, S.Pd., M.Si.

: 

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan TAPM "Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat".

Penulisan TAPM ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Penulis Menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan proposal TAPM ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Suciati, M.Sc, PhD. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
2. Ibu Florentina Ratih Wulandari, SIP, M.Si. selaku Kabid Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
3. Bapak Prof. Dr. Holten Sion, M.Pd selaku Kepala UPBJJ Palangka Raya sebagai penyelenggara Program Pascasarjana;
4. Ibu Dr. Kismartini, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H Kuwari, S.Pd.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan TAPM ini;

5. Ibu Stefani Made Ayu, A.K., M.Si selaku Pengelola Program Magister Administrasi Publik UPBJJ Palangkaraya sebagai penanggung jawab program ini;
6. Bapak Rusmawardi,SH, MH dan Bapak Drs. H. Mawardi Ardi, M.Si selaku Pengelola Universitas Terbuka Program Pascasarjana Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Keluarga penulis yang telah memberikan bantuan dukungan materiil dan moral;
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Terbuka UPBJJ Palangkaraya Terutama dari Kota Pangkalan Bun yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan TAPM ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya sumbangan pemikiran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Palangkaraya, Januari 2014

Penulis

Daftar Isi

	Halaman
Abstrak	ii
Lembar Pernyataan	iv
Lembar Persetujuan	v
Lembar Pengesahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Landasan Teori	15
B. Kajian Terdahulu	41
C. Kerangka Pemikiran	47
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Pendekatan Penelitian	50
B. Fokus Penelitian	52
C. Lokasi Penelitian	53
D. Fenomena Pengamatan	53
E. Jenis dan Sumber Data	55
F. Pemilihan Informan	56
G. Instrumen Penelitian	57
H. Teknik Pengumpulan Data	58
I. Teknik Analisa Data	59

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Sekilas Sejarah Kotawaringin.....	63
B. Gambaran Umum Kabupaten Kotawaringin Barat.....	66
C. Program Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Ktw. Barat ...	70
D. Isu-isu Strategis Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat	74
E. Pelaksanaan PNPM MD	75
F. Alokasi Dana PNPM MD	77
G. Beberapa Hasil Kegiatan Pelaksanaan PNPM MD	81
H. Implementasi Kegiatan PNPM MD di Kelurahan Kotawaringin Hilir	84
I. Partisipasi Masyarakat	84
J. Pengelola Partisipasi	85
K. Sumber Daya	94
L. Disposisi/sikap Pelaksana	98
M. Struktur Birokrasi.....	102
BAB V PENUTUP	106
A. Simpulan	106
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR GAMBAR

BAGAN

	Halaman
Gambar 1. Implementasi Kebijakan Menurut George Edwards III.....	20
Gambar 2. Implementasi Kebijakan Menurut Van Metter dan Van Horn.....	23
Gambar 3. Teori Daniel A. Masmanian dan Paul A. Sabastier	24
Gambar 4. Pandangan David L. Weiner dan Aidan R. Vining.....	25
Gambar 5. Bagan kerangka Pemikiran	49

DAFTAR GAMBAR

FOTO

Gambar 1. Penimbunan, Drainase, Gorong-gorong, Desa Palih Baru.....	83
Gambar 2. Pembangunan Posyandu	83
Gambar 3. Pasar Ikan Kelurahan Kotawaringin Hilir.....	84

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Kepala Keluarga Miskin Kabupaten Kotawaringin Barat.....	6
Table 2. Data Kesempatan Kerja Kabupaten Kotawaringin Barat	7
Table 3. Jumlah Keluarga Miskin Di Kecamatan Kotawaringin Lama.....	8
Table 4. Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid Terhadap Guru.....	10
Tabel 5. Fenomena dan Asumsi Implementasi PNPM MD.....	54
Tabel 6. Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan.....	67
Tabel 7. Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2006-2011.....	69
Tabel 8. Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat	70
Tabel 9. Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2009.....	72
Tabel 10. Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010.....	72
Tabel 11. Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2011.....	73
Tabel 12. Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2012.....	74
Tabel 13. Jumlah Kecamatan dan Sumber Dana Program Pengembangan	77
Tabel 14. Jumlah Kecamatan dan Sumber Dana PNPM-PKK.....	78
Tabel 15. Jumlah Kecamatan dan Sumber Dana PNPM-MD 2008.....	79
Tabel 16. Jumlah Kecamatan dan Sumber Dana PNPM-MD 2009.....	79
Tabel 17. Jumlah Kecamatan dan Sumber Dana PNPM-MD 2010.....	80
Tabel 18. Jumlah Kecamatan dan Sumber Dana PNPM-MD 2011.....	81
Tabel 19. Hasil Pelaksanaan Kegiatan PNPM MD di Kecamatan Ktw. Lama	82

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara dengan sumber daya alam yang sangat besar. letak geografis yang sangat strategis. Iklim yang memungkinkan untuk pemberdayaan lahan pertanian sepanjang tahun. Selain itu kekayaan hutan dan kandungan bahan tambang merupakan modal utama mewujudkan kemakmuran rakyat. Akan tetapi hingga saat ini potensi besar tersebut belum sepenuhnya memberikan kemakmuran kepada rakyat.

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multidisiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*proverty line*) atau batas kemiskinan (*proverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan

kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasanya.

Badan Pusat Statistik telah menentukan kriteria keluarga miskin, kriteria tersebut adalah luas lantai kurang dari 8 M², lantai tempat tinggal berupa tanah/kayu kualitas rendah/murahan, dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu kelas rendah/murahan /tebok tanpa plester, tidak punya tempat buang air besar sendiri, sumber penerangan rumah tangga utama bukan listrik, bahan bakar untuk masak sehari-hari adalah kayu/arang/minyak tanah, tidak pernah mengonsumsi daging/ayam/susu dalam seminggu atau hanya seminggu sekali, hanya mampu makan 1 atau 2 kali sehari.

Berdasarkan kriteria tersebut yang merupakan kriteria penduduk miskin maka pemerintah berusaha menanganulangnya yaitu dengan dikeluarkannya suatu program. Dimana dalam menyelenggarakan *good governance* program-program pembangunan yang berdampak dan bersifat nasional mungkin kurang, bila diterapkan dengan system *top down*. Pembangunan strategi yang bersifat *top down* menjadi pembangunan yang mengadopsi strategi *bottom up*, dengan konsep *good governance* sebagai *frame work*-nya menjadi penting. Pemerintah tidak lagi memposisikan sebagai agen tunggal pembangunan tetapi bagaimana melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembangunan, sehingga yang terjadi bukanlah hubungan subyek pembangunan oleh pemerintah dan obyek pembangunan adalah masyarakat tetapi terjadi saling ketergantungan dari semua faktor pembangunan.

Seiring dengan keinginan untuk mewujudkan *good governance* maka system pembangunan pada pemerintah daerah haruslah memperhatikan prinsip-prinsip demokratisasi dan pemberdayaan, partisipasi, kemitraan, desentralisasi, dan kepastian hukum. Salah satu strategi yang dapat mengkoordinir strategi pembangunan yang bersifat *bottom up* dengan *frame work good governance* pada era desentralisasi ini adalah strategi pemberdayaan yang beorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Saat ini Indonesia sedang melaksanakan pembangunan nasional disegala bidang, dimana pembangunan merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara dan untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan kesejahteraan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional, pembangunan nasional harus dilaksanakan di segala sektor kehidupan bangsa. Sektor-sektor pembangunan tersebut antara lain sektor politik, sektor ekonomi, sektor budaya, sektor hukum, sektor ilmu pengetahuan dan teknologi serta sektor keamanan. Guna mencapai semua itu diperlukan peran Negara dalam pembangunan dan mengimplementasikan kebijakan publik dibidang kesejahteraan (Suharto, 2005:34).

Pembangunan nasional dapat diwujudkan dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Ada berbagai program yang berskala nasional yang bertujuan untuk melakukan intervensi bagi penanggulangan kemiskinan seperti jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Pemerintahan Indonesia sejak tahun 2007 juga mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Pekotaan, serta PNPM mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. Pendekatan PNPM Mandiri merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PKK).

Pada prinsipnya program tersebut menganut pendekatan pemberdayaan (*empowerment*). Sebagai suatu syarat menuju pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), PNPM Mandiri Perdesaan ini dirancang dengan pengertian dalam penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan diperlukan pendekatan yang berbasis pada prinsip-prinsip pemberdayaan komunitas, sehingga perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh komunitas itu sendiri terutama pada tingkat desa dan memang di orientasikan kepada masyarakat miskin (*"Propoor"*) dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*"good governance"*), ditinjau dari aspek ekonomi, lingkungan, maupun sosial.

Dalam hal ini, PNPM Mandiri Perdesaan meyakini bahwa pendekatan upaya-upaya rasional dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah yang berbasis masyarakat dengan :

1. Menggunakan Desa sebagai lokal program untuk mengharmoniskan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program-program.
2. Memposisikan masyarakat pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal.
3. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif.
4. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis.
5. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran kemandirian dan berkelanjutan.

Sasaran program ini adalah Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat termasuk salah satu yang masuk dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri karena lapisan masyarakat yang beragam dari mulai petani, pedagang, pejabat, maupun sopir yang kesemuanya itu mempunyai kebutuhan hidup, akan tetapi lahan pertanian dalam desa tersebut tidak begitu dapat memberikan hasil serta taraf hidup yang kurang memadai.

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu dari yang berpartisipasi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Dimana dalam penerapan program tersebut dengan penentuan pengalokasian dana PNPM Mandiri kepada Kecamatan-kecamatan sasaran program dengan menggunakan indikator yaitu jumlah kepala keluarga miskin yang ada di wilayah tersebut, disamping itu dengan menggunakan indikator yang lain misalnya indeks kualitas pelayanan

sarana dan prasarana ekonomi. Untuk melihat lebih jelas jumlah kepala keluarga miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Kepala Keluarga Miskin Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011

No	Kecamatan	Kepala Keluarga Miskin Prosentase (%)
1	Arut Selatan	2,788
2	Kumai	2,777
3	Pangkalan Lada	1,993
4	Pangkalan Banteng	1,223
5	Arut Utara	577
6	Kotawaringin Lama	1,169

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2011

Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari enam Kecamatan, keenam Kecamatan melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan Arut Selatan kecamatan melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan . Dari table 1.1 diatas menggambarkan bahwa Kecamatan Kotawaringin Lama merupakan Kecamatan dengan jumlah kepala keluarga miskin terbanyak dari Kecamatan yang melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Untuk Kecamatan Kotawaringin Lama dan Arut Selatan Kecamatan melaksanakan Program nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.

Tujuan umum dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan ini adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat

miskin perdesaan. Berikut adalah tabel kesempatan kerja di Kabupaten Kotawaringin Barat :

Tabel 1.2
Data Kesempatan Kerja Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Kecamatan	2009	Persentase (%)	2010	Persentase (%)
1	Arut Selatan	56 127	37,39	70 120	41,44
2	Kumai	30 875	20,57	31 913	18,86
3	Pangkalan Lada	19 554	13,02	20 591	12,16
4	Pangkalan Banteng	21 445	14,28	22 498	13,30
5	Arut Utara	10 969	7,30	11 969	7,07
6	Kotawaringin Lama	11 123	7,41	12 112	7,16
Jumlah		150 093	100	169 203	100

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, 2011

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa kesempatan kerja pada Kecamatan Kotawaringin Lama mengalami penurunan dari 12.112 menjadi 11.123 jiwa. Oleh karena itu kesempatan kerja di Kecamatan Kotawaringin Lama dapat dikatakan cukup rendah. Dari data tersebut diduga Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan belum maksimal.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan ini merupakan program utama untuk memberdayakan potensi masyarakat yang bertujuan pengentasan kemiskinan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat. Dimana bila dilihat di lapangan ternyata masih banyak masyarakat di Kecamatan Kotawaringin Lama yang

belum sejahtera. Hal itu dapat dilihat dari jumlah kepala keluarga miskin dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.3
Jumlah Keluarga Miskin Di Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2011

No	Nama Desa	Jumlah Kepala Keluarga	Persentase (%)
1	Kel. Ktw Hilir	614	16,68
2	Kel Ktw. Hulu	431	11,70
3	Lalang	53	1,43
4	Rungun	351	8,99
5	Kondang	62	1,68
6	Riam durian	333	9,04
7	Dawak	110	2,99
8	Kincil	110	2,99
9	Saka Bulin	165	4,48
10	Tempayang	166	4,51
11	Babual Baboti	148	4,02
12	Sukajaya	214	5,81
13	Suka Makmur	127	3,45
14	Sumber Mukti	136	3,69
15	Palih Baru	190	5,16
16	Ipoh. B. Jaya	204	5,54
17	Sagu Suka Mulia	300	8,15
Jumlah		3.682	100

Sumber : Kecamatan Kotawaringin Lama, 2011

Pada tabel 1.3 terlihat bahwa Kelurahan Kotawaringin Hilir mempunyai angka kepala keluarga miskin cukup tinggi di bandingkan dengan desa-desa yang lain. Selain itu juga jika dilihat jumlah kepala keluarga miskin sasaran PNPM Mandiri Perdesaan

di Kelurahan Kotawaringin Hilir pada tahun 2009 ke tahun 2011 belum terlihat perubahan secara signifikan. Terlihat dalam Laporan Akhir Kegiatan dan Proposal Kegiatan Kelurahan Kotawaringin Hilir pada tahun 2009-2011 jumlah kepala keluarga miskin Kelurahan Kotawaringin Hilir sebesar 276 kepala keluarga miskin. Padahal yang diharapkan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan itu sendiri adalah mensejahterakan masyarakat yang dapat tercermin dalam penurunan jumlah kepala keluarga miskin pada tiap desa di Indonesia.

Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan Adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Berikut adalah data yang menggambarkan masih rendahnya kesempatan kerja di Kecamatan Kotawaringin Lama :

Tabel 1.4
Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid Terhadap Guru
Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2011

No	Desa	Pendidikan		
		SD	SMP	SMA
1	Sekolah	23	7	1
2	Murid	2.202	712	422
3	Laki-laki	1.104	422	199
4	Perempuan	1.098	314	223
5	Guru	138	26	11
6	Laki-laki	73	17	6
7	Perempuan	65	7	5
8	Ratio murid terhadap guru	16	28	39

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, 2011

Tabel 1.4 menjelaskan bahwa angka Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Ratio Murid Terhadap Guru. Hal ini dapat menjelaskan bahwa kesempatan di Kecamatan Kotawaringin Lama kurang. Padahal yang diharapkan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan adalah Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin perdesaan.

Surat Keputusan Bupati Nomor 414.1/033/2010 tentang Penetapan Unit Pengelola kegiatan (UPK) / Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat tahun 2010 menyebutkan bahwa Kecamatan Kotawaringin Lama menerima dana sebesar Rp. 3939.540.000. Dan untuk tahun 2011, dalam Surat Keputusan Bupati Nomor :414/1014/2011 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten

Kotawaringin Barat Tahun 2011, Kecamatan Kotawaringin Lama mendapatkan dana sebesar Rp 493.040.000. Dimana dana tersebut akan disalurkan ke beberapa desa secara merata. Program Nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan ini diharapkan memberikan kontribusi, bagi penyelenggara pemerintah dan pembangunan yang terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dilaksanakan secara transparan, sehat serta upaya mengoptimalkan evaluasi dan monitoring oleh masyarakat.

Pada Surat Penetapan Camat Nomor : 414.1/296/2010 menyebutkan bahwa tahun 2010 Kelurahan Kotawaringin Hilir menerima bantuan dana sebesar Rp 493.040.000, dari dana BLM Rp139.020.000 dan untuk tahun 2011 ini Kelurahan Kotawaringin Hilir menerima Rp104.100.000. Perbedaan penerimaan bantuan ini tergantung dengan usulan kegiatan masing-masing Desa.

Sedangkan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir sendiri masih ditemukan beberapa kendala dan adanya komponen program anggaran belum berjalan sesuai dengan harapan antara lain banyaknya gagasan yang diusulkan masyarakat tetapi hanya mengambil usulan yang prioritas dahulu, sulitnya menyampaikan informasi kepada masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir pada waktu siang hari karena kebanyakan beraktivitas, terjadi penunggakan setoran pengembalian, terlihat dalam Laporan Perkembangan SPP bulan Agustus 2011, dalam realisasi pengembalian Kelurahan Kotawaringin Hilir mengembalikan sebesar Rp10.000.000. Tahun 2011 Kelurahan Kotawaringin Hilir mendapat bantuan simpan

pinjam perempuan sebesar Rp. 4.000.000,- yang telah dicairkan pada tanggal 6 Juni 2011 dan diterimakan untuk 8 (delapan) orang masyarakat miskin.

Dari beberapa uraian diatas tampak bahwa persoalan implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan masih merupakan persoalan yang perlu di tindak lanjuti. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN DI KELURAHAN KOTAWARINGIN HILIR KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah maka pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia Kelurahan Kotawaringin Hilir masih rendah.
2. Tingginya angka pengangguran di Kelurahan Kotawaringin Hilir.
3. Rendahnya kesempatan kerja Kelurahan Kotawaringin Hilir.
4. Banyaknya gagasan dari masyarakat yang belum terealisasi.
5. Sulitnya menyampaikan informasi kepada masyarakat di siang hari.

6. Adanya penunggakan dalam pengembalian bantuan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
7. Kurangnya pemberdayaan dalam pembelajaran kemandirian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ditemukan diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat?
2. Faktor penghambat dan pendukung apa saja yang mempengaruhi Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kotawaringin Barat?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kota waringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di

Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat.

E. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pelaksanaan Program Nasional pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, khususnya di Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Bagi Program Pascasarjana MAP UT, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk peneliti selanjutnya dan untuk meningkatkan pengetahuan bagi mahasiswa khususnya mengenai implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
3. Bagi penulis sendiri penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman khususnya bagi pengembangan ilmu kebijakan publik serta sebagai satu penerapan konsep dan teori yang berhubungan dengan analisis kebijakan publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

I. Landasan Teori

A. Teori Kebijakan Publik

Ditinjau dari segi bahasa, kebijakan (*polici*) berasal dari bahasa Yunani dan Sansekerta, yaitu *polis* (negara-kota) dan *pur* (kota). Dalam bahasa latin menjadi *politia* (negara) dan dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah *policie*, yang artinya berkenaan dengan masalah-masalah politik atau administrasi pemerintahan.

Kebijakan menurut E. Anderson dalam Islamy (2004:17), "*A Purposive course of action followed by an actor or set in dealing with a problem or a matter of concern*" (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Huges dalam Subarsono (2008;2-4) lebih menekankan pada hasil dan *outcome* dari kebijakan publik daripada penggunaan metode statistik, dengan melihat interaksi politik sebagai faktor penentu, dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan lingkungan.

Sedangkan Islamy (2004:20) mengemukakan tentang pengertian kebijakan publik adalah "serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat".

Selanjutnya beberapa pakar yang memberikan gambaran tentang definisi kebijakan publik, salah satunya adalah pendapat dari Dyie dalam Widodo

(2001:198), yang menyatakan bahwa:”*publik policyis whatever governments choose to or not to do*” (Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan). Dalam pengertian seperti ini, maka pusat perhatian dari publik *policy* tidak hanya pada apa saja yang dilakukan pemerintah, melainkan termasuk juga apa saja yang tidak dilakukan pemerintah.

Kebijakan publik juga memiliki beberapa implikasi, yaitu pertama adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan, publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat, kedua adanya output kebijakan dimana kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, dan ketiga, adanya dampak kebijakan merupakan efek pilihan kebijakan yang dilakukan di Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat dengan adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang memang *outputnya* adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

William N. Dunn (2003:22) menyebutkan mengenai tahap-tahap proses pembuatan kebijakan sebagai berikut :

a) Penyusun agenda kebijakan

Tahap penyusunan agenda ini, harus ditentukan apa yang menjadi masalah publik yang dipecahkan. Dunn mengemukakan bahwa perumusan masalah dapat dipandang sebagai suatu proses dengan empat fase yang saling tergantung, yaitu pencarian masalah (*problem solving search*) pendefisian masalah (*problem*

devinition) sertifikasi masalah (*problem specification*) dan pengenalan masalah (*problem sensing*).

b) Formulasi kebijakan

Pada fase ini para analis mulai mengaplikasikan beberapa teknik analisis dalam upaya memperoleh suatu keyakinan bahwa sebuah pilihan kebijakan adalah lebih baik dari yang lain. Untuk itu dapat digunakan perangkat seperti analisis biaya dan manfaat analisis keputusan harus diambil dalam ketidakpastian dan keterbatasan informasi. Dalam konteks ini, Penekanannya lebih pada pembahasan tentang alternatif-alternatif apa saja yang dapat dikembangkan dan berkaitan dengan masalah siapa yang terlibat dalam masalah kebijakan. Untuk itu dibutuhkan *forecasting*, sehingga akan dihasilkan masa depan kebijakan (*polici futures*), berikut dengan konsekuensi masing-masing kebijakan tersebut.

c) Adopsi kebijakan

Pada tahap ini ditentukan pilihan-pilihan kebijakan dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsesus diantara lembaga setelah melalui proses rekomendasi,

d) Implementasi kebijakan

Tahap ini berkenan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program. Pada tataran ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang terseleksi. Tahap implementasi kebijakan terjadi setelah undang-undang atau peraturan ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

e) Penilaian Kebijakan.

Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan apakah telah sesuai dengan yang ditentukan atau tidak. Dalam Proses tahap ini juga dilakukan evaluasi guna mengetahui proses implementasi, konsekuensi kebijakan dan efektifitas dampak kebijakan.

Berdasarkan konsep-konsep tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang diambil pemerintah untuk mengatasi suatu keadaan tertentu dengan tujuan tertentu yang telah direncanakan dengan melibatkan hubungan antara instansi dalam pemerintah dan lingkungannya.

Orientasi kebijakan sangat "concern" kepada masyarakat dan bagaimana memberdayakan serta memecahkan masalah publik yang termasuk didalamnya termasuk pembangunan, tentunya yang dapat dilakukan pada formulasi kebijakan. Sehingga konteks pemberdayaan yaitu khususnya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan ini dibutuhkan kebijakan publik yang mampu mengembangkan, memberdayakan dan kemandirian serta kesempatan kerja bagi masyarakat miskin perdesaan. Dan perlu diingat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan, setiap program memerlukan adanya sentuhan-sentuhan dukungan dari instansi-instansi atasan baik dalam perluasan alokasi anggaran atau perlindungan dari serangan balik dari penentang program.

Hal ini berarti pula bahwa implementasi kebijakan hanya satu variable penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan, terutama di dalam memecahkan permasalahan-persoalan publik seperti dengan adanya Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang merupakan intervensi dari pemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinan baik kemiskinan baik kemiskinan struktural maupun kemiskinan fungsional telah menjadi masalah yang sangat krusial sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah.

B. Implementasi Kebijakan

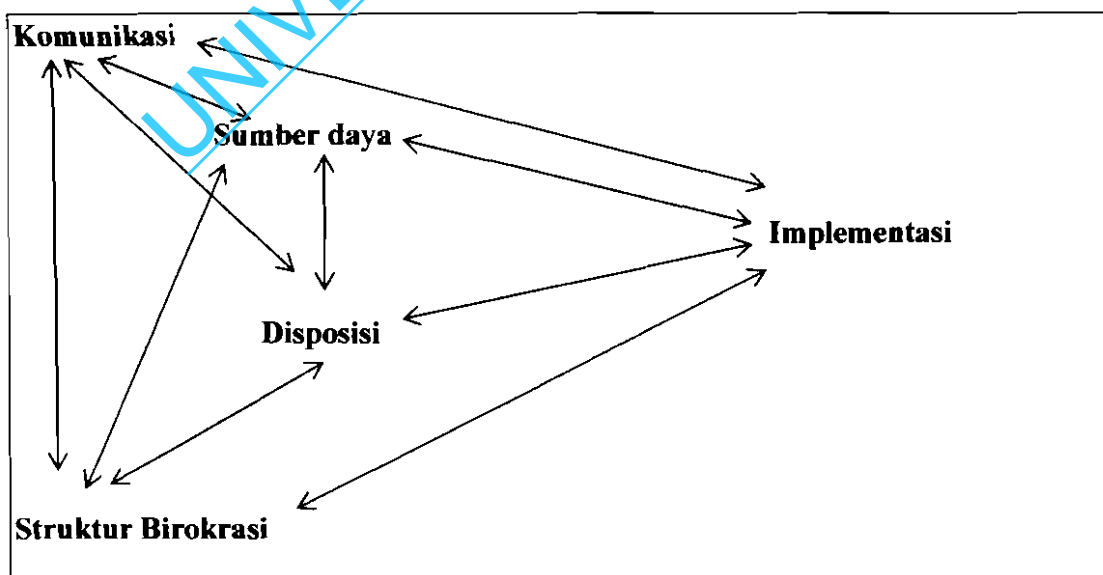
Dalam literatur ilmu politik dan administrasi Negara, terdapat banyak definisi atau batasan tentang kebijakan publik. Namun demikian, untuk memudahkan analisis, akan dipergunakan beberapa batasan pengertian yang sesuai dan berhubungan dengan tema penelitian ini.

Pengertian Implementasi menurut George Edwards III dalam Yousa (2007:76) adalah sebagai “tahap dalam proses kebijakan yang berada diantara tahapan penyusunan kebijakan hasil atau konsenkuensi-konsenkuensi yang ditimbulkan kebijakan itu (*output, outcome*)”.

Dalam pandangan George Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu : (1) Komunikasi, sebagai upaya penyampaian suatu pesan dari komunikator sehingga menimbulkan dampak tertentu kepada komunikan. Dalam implementasi program, komunikan difungsikan untuk menghubungkan komunikasi antar aparat pelaksana ataupun penyampaian pesan dari pemerintah kepada publik. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan, (2) Sumber daya, dukungan sumber daya yang

diperlukan untuk implementasi program, dimana sumber daya tersebut berupa sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaksana program ataupun sumber daya dana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program mutlak diperlukan, (3) Disposisi/sikap pelaksana, salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah, (4) Struktur Birokrasi, adalah karakteristik, norma-norma dan pola hubungan yang terjadi berulang-berrulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Struktur birokrasi sebagai wadah untuk menjalankan dan mengkoordinasi setiap pelaksana dan jalannya suatu program.

Gambar 2.1
Implementasi Kebijakan menurut George Edwards III



Sumber : Subarsono, (2008: 74)

Sedangkan pengertian Implementasi menurut Yousa (2007:74) pada sisi lain merupakan “fenomena kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*), maupun sebagai hasil”.

Menurut Meter dan Horn dalam Subarsono (2008:99-101) ada lima variable yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

1. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat terealisasi. Apabila standar dan sasaran kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

2. Sumber daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non manusia (*non humanresources*). Dalam berbagai kasus program pemerintah, seperti program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk kelompok miskin di pedesaan kurang berhasil Karena keterbatasan aparat pelaksana.

3. Hubungan antar organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

4. Karakteristik agen pelaksana

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur adalah birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi

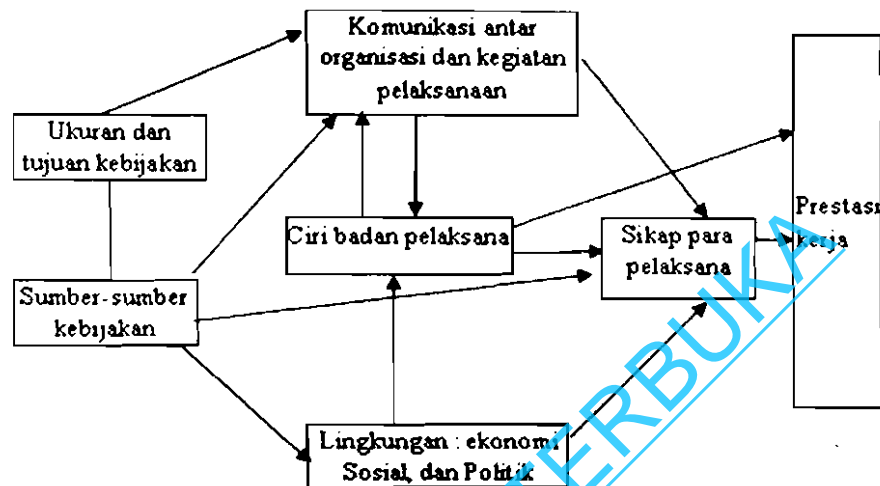
Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

6. Disposisi implementor

Disposisi implementor ini mencakup 3 (tiga) hal yang penting, yakni : a) respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan ; b) kognisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan; dan c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Bagan 2.2

Implementasi Kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn



Sedangkan Teori Merilee S. Grindle (1980) dalam Subarsono 2008:93 menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) seperti terlihat dalam Gambar 2.3. Variabel kebijakan mencakup :

- (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran/*target group* termuat dalam isi kebijakan ;
- (2) jenis manfaat yang diterima oleh *target group* ;
- (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan kebijakan;
- (4) apakah letak sebuah program sudah tepat;
- (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementatornya dengan rinci;
- (6) apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup :

- (1) seberapa besar kekuatan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat implementasi kebijakan;
- (2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa;
- (3) tingkat kepatuhan dan responsifitas kelompok sasaran.

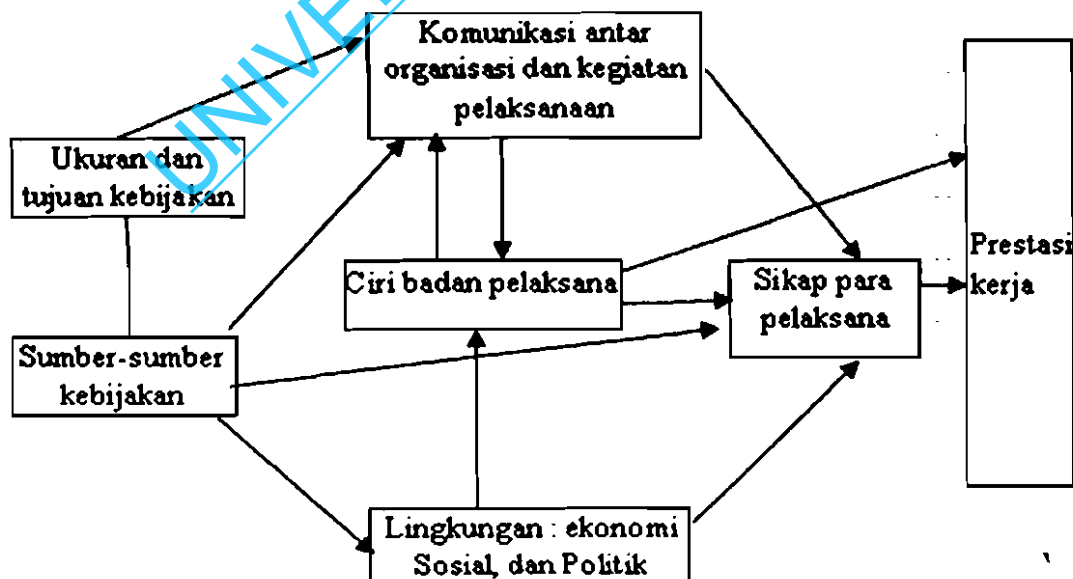
Lebih lanjut Daniel A. Masmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2005:65)

menjelaskan bahwa implementasi yaitu:

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan. Negara Yang baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

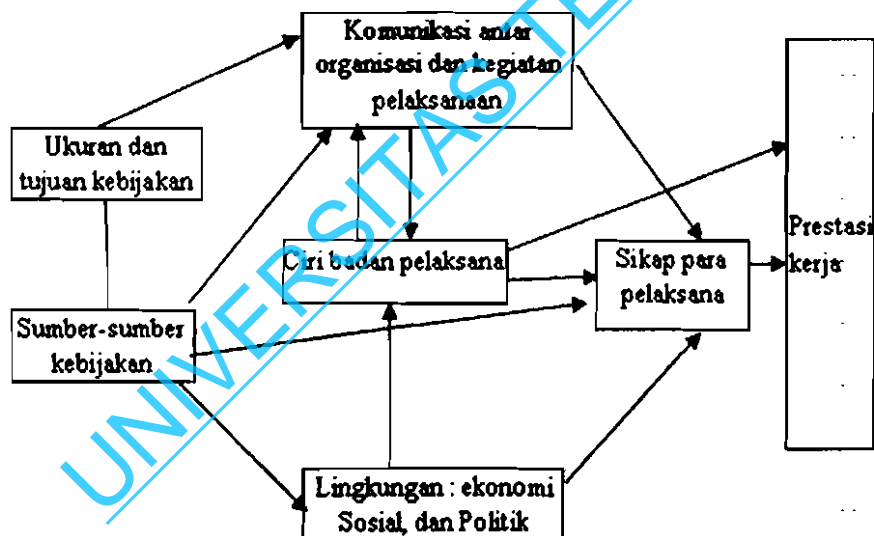
Menurut teori Daniel A. Masmanian dan Paul A. Sabatier (1983) dalam Subarsono (2008;94-95) ada tiga kelompok variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu : (1) karakteristik dari masalah; (2) karakteristik kebijakan undang-undang; (3) variabel lingkungan, seperti terlihat pada Gambar 2.4 dibawah ini :

Gambar 2.3
Teori Daniel A. Masmanian dan Paul A. Sabatier



Teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (1983) dapat dilihat pada Gambar 2.5 yang menggambarkan kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk analisis implementasi program-program pemerintahan yang bersifat desentralisasi. Ada empat kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yaitu : (1) kondisi lingkungan ; (2) hubungan antar organisasi; (3) sumber daya organisasi untuk implementasi program; (4) karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Bagan 2.4
Pandangan David L. Weiner dan Aidan R. Vining



Menurut pandangan David L. Weiner dan Aidan R. Vining (1999) ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yaitu :

1. Logika kebijakan

Logika dari suatu kebijakan ini dikmaksudkan agar suatu kebijakan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal (*reasonable*) dan mendapat dukungan teoritis. Kita dapat berfikir bahwa logika dari suatu kebijakan seperti halnya hubungan logis dari suatu hipotesis.

2. Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan

Lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam, dan fisik atau geografis. Suatu kebijakan akan berhasil di implementasikan di suatu daerah tertentu, tetapi ternyata gagal di implementasikan di daerah lain, karena kondisi lingkungan yang berbeda.

3. Kemampuan implementator kebijakan

Kemampuan implementator merupakan kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari para implementor kebijakan.

Suatu implementasi dalam proses kebijakan dikatakan penting dan menentukan. Tanpa adanya implementasi, kebijakan tidak akan mempunyai arti apa-apa, dan kebijakan yang bagus jika tidak diimbangi dengan implementasi yang optimal, maka akan menghasilkan kegagalan seorang pemimpin.

Syukur dalam Sumaryadi (2005:79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu : (1) Adanya program atau kebijaksanaan yang dilaksanakan, (2) target grup yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan

diharapkan akan memberi manfaat dari program, perubahan atau peningkatan, (3) untuk pelaksana (implementator) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik dalam sebuah Negara, yang biasanya dilaksanakan sesudah sebuah kebijakan dirumuskan dengan jelas, yang di dalamnya termasuk tujuan jangka pendek, menengah, panjang. Sebuah kebijakan publik tidak akan bermanfaat apabila tidak implementasikan. Karena kebijakan publik akan menimbulkan sebuah hasil (*outcome*) yang dapat dinikmati terutama oleh sekelompok sasaran target (*target group*). Perlu diingat pula bahwa suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan program pemberdayaan masyarakat yang mengarah pada jenis kebijakan *bottom up* sehingga keterlibatan masyarakat juga sangat besar dalam peranan keberhasilan atau kegagalan implementasinya. Ada beberapa teori model implementasi kebijakan, namun setelah dielaborasi dari beberapa model implementasi kebijakan sebagaimana tersebut diatas, maka penulis akan menganalisa implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat dengan menggunakan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Winarno (2007:175) persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Untuk itu komunikasi harus akurat dan dapat dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Secara umum Edward III dalam Winarno (2007 : 176) membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yaitu :

a. Transmisi

Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, harus menyadari bahwa keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Ada beberapa hambatan yang timbul dalam menstrasmisikan perintah implementasi, yaitu : (1) Pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Hal ini terjadi karena para pelaksana menggunakan keleluasaan yang tidak dapat mereka elakan dalam melaksanakan keputusan dan perintah umum, (2) Informasi melewati berlapis-lapis hierarkis. Birokrasi memiliki struktur yang ketat dan cenderung sangat hierakis. Penggunaan sarana komunikasi yang ditentukan mungkin juga mendistori perintah-perintah pelaksana, (3) Persepsi

yang selektif ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan. Kadang-kadang para pelaksana mengabaikan apa yang sudah jelas dan mencoba menduga maksud komunikasi yang sebenarnya.

b. Kejelasan

Jika kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal.

c. Konsistensi

1. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Di sisi lain, perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Hal ini berakibat pada

ketidak efektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan.

2. Sumber Daya

Perintah implementasi mungkin diteruskan secara jelas, konsisten dan cermat, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan maka implementasi akan cenderung tidak efektif. Sumber daya merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik, yang meliputi: (a) Staf, Merupakan sumber daya yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan adalah staf. Namun demikian, jumlah sumber daya tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh pegawai pemerintah (staf), kebijakan yang efektif. Pelaksana harus memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan. Kurangnya personil yang terlatih dengan baik akan dapat menghambat pelaksanaan kebijakan yang menjangkau banyak pembaharuan, (b) Informasi, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama, informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Para pelaksana kebijakan harus diberi petunjuk untuk melaksanakan kebijakan, kedua, data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan pemerintah. Informasi mengenai program adalah penting terutama bagi kebijakan-kebijakan baru atau kebijakan yang melibatkan persoalan teknis, (c) Wewenang, wewenang akan berbeda-beda dari satu program ke program

yang lain serta mempunyai banyak bentuk yang berbeda. Dalam beberapa hal, suatu badan mempunyai wewenang yang terbatas atau kekurangan wewenang untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan tepat. Kurangnya wewenang yang efektif membutuhkan kerjasama dengan pelaksana yang lain agar program dapat berhasil, (d) Fasilitas, implementasi kebijakan tanpa adanya fasilitas tidak akan berhasil. Fasilitas tersebut misalnya berupa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, perlengkapan, perbekalan, dana sarana prasarana pendukung lain.

3. Disposisi/sikap pelaksana

Disposisi dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana memberikan dukungan terhadap suatu kebijakan publik, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagai mana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal, demikian juga sebaliknya.

a. Dampak disposisi

Ada kebijakan yang dilakukan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan.

b. Pengangkatan birokrat

Disposisi implementor dapat menimbulkan hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan. Apabila personil yang ada tidak

melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi, mengapa mereka tidak diganti dengan orang yang lebih bertanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin mereka.

c. Intensif

Salah satu teknik yang disarankan agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan melalui manipulasi intensif. Hal ini karena pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi intensif oleh para pembentuk kebijakan tingkat tinggi besar kemungkinan mempengaruhi tindakan-tindakan para pelaksana kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2007:202) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi, yaitu : (1) birokrasi dimanapun berada, dipilih sebagai instrumen sosial yang ditunjukkan untuk menangani masalah-masalah yang didefinisikan sebagai urusan publik; (2) birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam pelaksanaan program kebijakan, yang untuk tingkat kepentingan berbeda untuk masing-masing tahap; (3) birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda; (4) fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang luas dan kompleks; (5) birokrasi bukan merupakan sesuatu yang netral dalam pilihan-

pilihan kebijakan mereka, tidak juga secara penuh dikontrol oleh kekuatan-kekuatan yang berasal dari luar dirinya.

Menurut Edward III dalam Winarno (2007:203) ada dua aspek dalam struktur birokrasi :

Standard Operating Procedures (SOP)

Struktur organisasi-organisasi yang melakukan kebijakan memiliki pengaruh penting dalam implementasi. Salah satu dari aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya (*Standard Operating Procedures*). Prosedur-prosedur biasa ini dalam menanggulangi keadaan-keadaan umum digunakan dalam organisasi publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar (orang dapat dipindah dengan mudah dari suatu tempat ke tempat lain) dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan.

Fragmentasi

Aspek ke dua dari struktur organisasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi organisasi. Fragmentasi merupakan pembagian tanggung jawab untuk sebuah bidang kebijakan unit-unit organisasional.

Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar diantara beberapa organisasi, sering kali pula terjadi desentralisasi kekuasaan tersebut dilakukan secara radikal guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Lembaga-lembaga mencantumkan banyak badan secara terpisah agar dapat mengamatinya lebih teliti dan dalam usaha menentukan perilaku mereka. Sementara badan-badan yang bertentangan satu sama lain untuk mempertahankan fungsi-fungsi mereka dan menentang usaha-usaha yang memungkinkan mereka mengkoordinasi kebijakan-kebijakan dengan badan-badan yang melaksanakan program-program yang berhubungan. Selain itu juga kelompok-kelompok kepentingan akan mempengaruhi dalam mendorong *fragmentasi*.

D. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan salah satu mekanisme program perbedayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakn sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat atau kelembagaan lokal, pendampingan, penelitian, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp 750. Juta samapi Rp 3 milyar rupiah per Kecamatan, tergantung jumlah penduduk. (Pendoman Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan, 2008)

Pemerintah Indonesia, melalui Departemen Pekerjaan Umum, telah melakukan berbagai upaya penanganan masalah kemiskinan di perdesaan. Salah satunya ialah dengan adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Guna mendukung peningkatan kapasitas dan kesiapan masyarakat tersebut, strategi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di titik beratkan pada penuntasan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan berkelanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Menurut Suhendra (200:74-75), "Pemberdayaan dapat di artikan bahwa masyarakat diberi kuasa, dalam upaya untuk meyebar kekuasaan, melalui pemberdayaan masyarakat, organisasi agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya untuk semua aspek kehidupan politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan dan sebagainya." Selain itu pemberdayaan juga memiliki pengertian yang lain seperti yang dikemukakan oleh pendapat Raport dalam

Suharto (2005:59) "Pemberdayaan adalah suatu dengan mana rakyat organisasi, dan komunitas di arahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupan."

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Dalam hal ini pemerintah bersama masyarakat bertindak sebagai pelaku utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Peran pemerintah salah satunya melalui PNPM Mandiri Perdesaan ini yaitu berupaya untuk mendorong proses pengembangan atau pemberdayaan dan penguatan kapasitas masyarakat agar mampu menaggulangi persoalan kemiskinan di wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan.

Sejauh ini pemahaman masyarakat akan adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan adalah untuk mendorong proses pemberdayaan dan penguatan kapasitas masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan. Selain itu juga di dalam pedoman Teknis Operasional Program Nasional Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan telah disebutkan bahwa perempuan selalu dilibat dalam setiap kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Menjujung tinggi kesetaraan *gender*. Tak hanya itu, dengan adanya bantuan dana pinjaman bergulir, maka diharapkan masyarakat dapat mengembangkan kesejahteraan hidupnya.

Mengingat dengan adanya Program Nasional Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan landasan dan pemicu tumbuhnya gerakan pembangunan berkelanjutan dalam penanggulangan kemiskinan di perdesaan maka diperlukan suatu rumusan Visi dan Misi yang jelas sehingga dapat dipakai sebagai acuan perilaku PNPM Mandiri Perdesaan dalam pengembangan. Program-program kemiskinan di wilayahnya. Adapun visi dan misi Mandiri perdesaan yaitu:

Visi : Tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan .

Misi :1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya;

2. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif;
3. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sosial dasar ekonomi masyarakat;
5. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

b. Tujuan

Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Tujuan khususnya meliputi:

- a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan kelesatarian pembangunan.

- b. Melembagakan pengelolaan pembangunan parsipatif dengan pendayagunaan sumberdaya lokal.
- c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam mefasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
- d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang di prioritaskan oleh masyarakat.
- e. Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
- f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa.
- g. Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan-kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

c. Jenis Kegiatan

Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana BLM diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria :

1. Lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin
2. Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan
3. Dapat dikerjakan oleh masyarakat
4. Didukung oleh sumber daya yang ada
5. Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan

Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin
2. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan non formal)
3. Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal)
4. Penambahan pemodalan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP)

Setiap desa dapat mengajukan tiga usulan untuk dapat didanai dengan dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan. Setiap usulan harus merupakan satu jenis kegiatan paket kegiatan yang secara langsung saling berkaitan. Tiga usulan dimaksud adalah :

- a. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan/pendidikan) atau peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan.
- b. Usaha kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP) yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan. Alokasi dana kegiatan SPP ini maksimal 25% dari BLM Kecamatan. Tidak ada batasan alokasi maksimal per Desa namun harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan kelompok.

- c. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar, kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan/pendidikan) dan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok uaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa perencanaan.

Jika usulan non SPP dari musyawarah khusus perempuan dapat mengajukan usulan pengganti sehingga jumlah usulan kegiatan dari nusyawrah desa perencanaan tetap tiga.

d. Sasaran

Lokasi sasaran PNPMM Mandiri Perdesaan meliputi seluruh Kecamatan perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasuk Kecamatan-kecamatan kategori Kecamatan bermasalah dalam PKK/PNPMM mandiri perdesaan.

Untuk kelompok sasaran PNPMM Mandiri Perdesaan adalah :

- a. Masyarakat miskin di perdesaan
- b. Kelompok masyarakat di perdesaan.
- c. Kelembagaan pemerintahan lokal

e. Pendanaan

PNPNM Mandiri Perdesaan merupakan program Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah, artinya program ini direncanakan, dilaksanakan, dan didanai

bersama-sama berdasarkan persetujuan dan kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sumber dana untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- c. Swadaya Masyarakat
- d. Partisipasi Dunia Usaha

2. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

No	Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Hasil	Relevansi
1.	Otto Dwana Sagala Tahun 2009	Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) terhadap pengembangan sosio-ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir 2. Menganalisis dampak kondisi Sosial-Ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah dilaksanakan PNPM-MP 3. Menganalisis dampak Sosial-Ekonomi antara 	Menunjukkan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Balige belum sepenuhnya dilaksanakan secara baik. Sarana dan prasarana fisik dibangun belum menjadi prioritas utama.	Bagaimana akan evaluasi PNPM-MP di Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama terhadap pengembangan sosial-ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

			masyarakat yang menerima dan tidak menerima bantuan program PNPM-MP	Tingkat partisipasi masyarakat belum datang dari hati nurani tetapi masih digerakkan oleh tokoh-tokoh (<i>informal leader</i>). Dampak PNPM-MP terhadap kondisi sosial ekonomi pendapatan dan pendidikan masyarakat sebelum dan sesudah adanya PNPM-MP berbeda nyata secara positif.	
2.	Zaki Mubarak Tahun 2010	Evaluasi pemberdayaan masyarakat ditinjau dari proses pengembangan kapasitas pada kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan	Untuk mengevaluasi proses pemberdayaan masyarakat pada kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan di tinjau dari aspek pengembangan kapasitas masyarakat.	Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat di Desa Sastrodirjan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip pemberdayaan dan telah berhasil mengubah tingkat kesadaran	Bagaimanakah evaluasi pemberdayaan masyarakat ditinjau dari proses pengembangan kapasitas pada kegiatan PNPM-MP di Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama.

				masyarakat serta merubah pemahamannya untuk berperan dalam pembangunan di komunitasnya.	
3.	Ahmad Sa'i Samosir Tahun 2012	Dampak program dana bergulir PNPMD Mandiri Perkotaan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Medan Kota	Menganalisis kegiatan program dana bergulir PNPMD Mandiri Perkotaan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Medan Kota dan menganalisis dampak program dana bergulir PNPMD Mandiri Perkotaan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Medan Kota.	Menunjukkan pelaksanaan PNPMD Mandiri Perkotaan di Kecamatan Medan Kota berdasarkan pelaksanaan yang dilakukan Penanggung Jawab Operasional (PJOK) berjalan cukup baik.	Bagaimana dampak program dana bergulir PNPMD Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama terhadap kesejahteraan Masyarakat.

Laporan penelitian yang di tulis oleh Otto Dwana Sagala Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan pada tahun 2009 dengan Judul Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) terhadap pengembangan sosial-ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir “(di unduh dari repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22280/7/Cover.pdf tanggal 1 Februari 2014)”

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan oleh penulis bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Balige belum sepenuhnya dilaksanakan secara baik. Sarana dan prasarana fisik dibangun belum menjadi prioritas utama. Tingkat partisipasi masyarakat belum datang dari hati nurani tetapi masih digerakkan oleh tokoh-tokoh (*informal leader*) yang ada di desa tersebut. Dampak PNPM-MP terhadap kondisi sosial ekonomi pendapatan dan pendidikan masyarakat sebelum dan sesudah adanya PNPM-MP berbeda nyata secara positif. Demikian juga pendapatan dan pendidikan masyarakat yang tidak menerima PNPM-MP juga signifikan atau berbeda nyata. Justru kenaikan pendapatan dan pendidikan masyarakat yang menerima Program PNPM-MP lebih rendah, karena umumnya masyarakatnya miskin, tingkat kualitas sumber daya manusia rendah dan secara umum pekerjaan mereka adalah petani. Dengan adanya program PNPM-MP di Kecamatan Balige menciptakan peluang kerja kepada masyarakat.

Zaki Mubarak mahasiswa Pascasarjana Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang tahun 2010 dalam tesisnya yang berjudul Evaluasi pemberdayaan masyarakat ditinjau dari proses pengembangan kapasitas pada kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan “(di unduh dari eprints.undip.ac.id/23734/1/ZAKI_MUBARAK.pdf pada tanggal 2 Februari 2014)”. Dari hasil penelitiannya diketahui kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat di Desa Sastrodirjan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip

pemberdayaan dan telah berhasil mengubah tingkat kesadaran masyarakat serta merubah pemahamannya untuk berperan dalam pembangunan di komunitasnya. Temuan yang di dapatkan adalah perubahan kesadaran masyarakat tidak berhubungan dengan usia responden, tingkat pendidikan dan perannya dalam PNPM-MP, namun berhubungan dengan jenis kelamin, dimana peran dan keterlibatan perempuan masih rendah dan belum cukup optimal dalam mendukung pembangunan di tingkat komunitasnya. Masyarakat Desa Sastrodirjan telah menyadari konsep pemberdayaan dan mengerti untuk menggunakan bagi kepentingan komunitasnya, namun untuk menuju tahapan pembiasaan masih membutuhkan pembelajaran yang lebih banyak sehingga mereka benar-benar siap untuk bertanggung jawab secara penuh dalam pengelolaan pembangunan komunitasnya. Masyarakat juga telah siap untuk melanjutkan program pemberdayaan yang selama ini telah berjalan, meskipun secara mandiri hal tersebut belum dapat dilaksanakan sendiri oleh masyarakat dan masih membutuhkan pendamping yang intensif dari pihak luar serta bantuan pendanaan secara berkesinambungan.

Sehubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini sebagai kajian awal pernah dilakukan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sa'i Samosir, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD) pada tahun 2012 dengan judul Dampak program dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Medan Kota "(di unduh dari

repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35024/7/Cover.pdf pada 3 Februari 2014)”. Menunjukkan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Medan Kota berdasarkan pelaksanaan yang dilakukan Penanggung Jawab Operasional (PJOK) berjalan cukup baik, hal ini disebabkan kegiatan pelaksanaan berjalan sesuai dengan prosedur Pedoman Umum PNPM Mandiri Perkotaan, seperti dilaksanakannya Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM), Diskusi Kelompok Terarah (DKT) atau *Focus Group Discussion* (FGD), Pemetaan Swadya, Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) dan Mekanisme Penyaluran Dana dan Pemanfaatan Bantuan. Selain itu dalam pelaksanaan program dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti proses pelaksanaan program dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan, dimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan program dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan menunjukkan pada tingkat selalu ikut yaitu 63,00% dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan menunjukkan pada tingkat selalu ikut yaitu 52,00%. Program dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan memberikan dampak positif terhadap pendapat masyarakat, hal ini disebabkan pendapatan masyarakat Kecamatan Medan Kota meningkat setelah adanya program dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan. Namun rata-rata pendapatan masyarakat setelah adanya program dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan. Namun rata-rata pendapat masyarakat masih di bawah Pendapatan Perkapita Kecamatan Medan Kota.

3. Kerangka Pemikiran

Kemiskinan menurut pendekatan ilmu sosial dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf hidup kelompoknya dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

Selanjutnya Supriatna (1997:22) berpendapat bahwa, “mereka dikatakan dibawah garis kemiskinan apabila masih lemahnya kemampuan teknis dan manajerial SDM yang mengakibatkan belum optimalnya kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja serta produktivitas kerja yang masih terbatas”.

Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk mengakses sumber daya yang tersedia. Sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia yang rendah menyebabkan penghasilan yang rendah, sehingga munculah kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat.

Dengan pengertian tersebut maka dilakukan penanggulangan kemiskinan yaitu dengan dikeluarkannya berbagai program penanggulangan kemiskinan yaitu Pembentukan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) berdasarkan Kepmen No;25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 yang didalamnya terdapat berbagai program penanggulangan kemiskinan, dan salah satunya yaitu Program Nasional Pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Program tersebut dilakukan secara *bottom up*. Yang dirumuskan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, LSM, swasta masyarakat miskin dimana kriteria miskin disini adalah lantai bangunan tempat tinggal $15m^2/20m^2$, jenis lantai bangunan tanah /semen kondisi

jelek, jenis dinding terbuat dari bambu/papan, jenis atap bangunan genting, Fasilitas buang air besar (jamban/kakus) umum, sumber air minum mata air tidak terlindungi (sungai/sumur), sumber penerangan utama bukan listrik/listrik tanpa meteran, bahan memasak kayu, arang/minyak tanah, dalam seminggu rumah tangga tidak pernah membeli daging, ayam satu kali, dalam sehari biasanya anggota rumah tangga makan satu/dua kali, apabila ada anggota rumah tangga yang sakit tidak mampu berobat ke puskesmas/poliklinik, dalam satu tahun tidak pernah membeli pakaian baru/satu stel, rumah tangga tidak pernah menerima kredit usaha, tidak mengusahakan lahan pertanian/perkebunan, untuk memenuhi kebutuhan sering berhutang. Dalam pelaksanaan program tersebut dipengaruhi oleh program komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi sehingga menghasilkan kendala atau dampak dalam pelaksanaannya. Agar lebih jelasnya dalam memahami dan agar tidak terjadi pemahaman yang berbeda antara penulis dan pembaca maka dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

UNIVERSITAS TERBUKA

Bagan 2.5
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Prerspektif Pendekatan Penelitian

Ragam penelitian jika ditinjau dari cara mengolah data pada hakekatnya terbagi kedalam dua jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mendasarkan pada hasil perhitungan data secara matematis. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang ingin mengungkapkan suatu keadaan dengan deskriptif.

Secara umum penelitian merupakan wahana untuk menemukan kebenaran atau untuk memperkuat kebenaran yang telah ada. Sugiyono (2008: 1) menjelaskan bahwa, “penelitian adalah merupakan acara ilmiah untuk mendapatkan data dan kegunaan tertentu”. Selanjutnya menurut Sugiyono (2009:13-14) menjelaskan bahwa karakteristik penelitian kualitatif adalah :

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sehingga lawannya adalah eksperiman), langsung ke sumber data dan peneliti adalah berfungsi sebagai instrumen utama/kunci.
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata dan gambar sehingga tidak menekan pada angka.
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk atau *outcome*.
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data di balik yang teramati).

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa jenis penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, Peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang di temukan dilapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail.

Pengertian metode penelitian menurut Soehartono (2004:9) bahwa, “metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk mengemukakan atau memperoleh data yang di perlukan”. Metode penelitian yang di gunakan penulis dalam hal ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, jadi terarah kepada menggambarkan atau melukiskan keadaan atau fenomena yang ada obyek penelitian dalam kurun waktu tertentu dengan berdasarkan kenyataan yang tampak. Menurut Nazir (2005 : 63) yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah sebagai berikut :

“Metode deskriptif adalah objek, suatu set kondisi, suatu system, pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang di selidiki”.

Menyimak dari penjelasan diatas, metode deskriptif dalam penelitian ini yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu dari objek yang di teliti dimana melalui metode ini penulis akan berusaha menyelidiki dan melukiskan keadaan-keadaan yang berkaitan dengan implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan faktor pendukung dan Penghambat dalam implementasi Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sedangkan penelitian dengan pendekatan induktif artinya penelitian yang berangkat dari kenyataan atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang kemudian di kaji atau di kaitkan dengan teori-teori yang ada yang mendukungnya. Di lihat pula dari sifat penelitian kualitatif adalah mempunyai sifat induktif yaitu pengembangan konsep yang didasarkan pada data yang ada, mengikuti desain penelitiann yang fleksibel sesuai dengan konteksnya sehingga memberi peluang peneliti untuk menyesuaikan diri dengan konteks yang ada di lapangan.

Berdasarkan uraian di atas maka jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif, karena ingin mengkaji fenomena-fenomena yang dalam hal ini adalah bagaimana pelaksanaan suatu program pemberdayaan bagi suatu komunitas masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Agar tidak terjadi perluasan dalam penelitian dan untuk memudahkan dalam pencarian data maka penulis memfokuskan penelitian. Fokus penelitian yang diambil dalam implementasi kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam hal ini, kegiatan tersebut di lakukan untuk melihat implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin

Lama Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga dapat dilihat derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan mengambil lokasi di Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pertimbangan Kotawaringin Hilir merupakan salah satu desa yang menjalankan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Permasalahan di Kelurahan Kotawaringin Hilir cukup kompleks dan juga lokasi penelitian merupakan tempat tinggal penulis sehingga di harapkan dapat lebih lancar dalam melakukan penelitian.

D. Fenomena Pengamatan

Fenomena pengamatan adalah hal-hal yang akan di amati dalam penelitian yang di dasarkan pada permasalahan penelitian. Dalam hal ini fenomena yang akan di amati dalam penelitian ini adalah implementasi dan factor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk fenomena implementasi, penulis menuangkan dalam asumsi berdasarkan pada tujuan PNPM Mandiri yang tercantum di dalam PTO PNPM Mandiri Perdesaan. Sedangkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi, penulis menuangkan dalam asumsi berdasarkan teori George Edward III. Sehingga dalam penelitian yang akan menjadi fenomena pengamatan adalah nampak pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1
Fenomena dan Asumsi Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan

Fenomena	Indikasi
1. Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan partisipasi masyarakat kekelurahan Kotawaringin Hilir dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. b. Pembangunan partisipatif tidak di kelola dengan baik. c. Pemerintahan Kelurahan Kotawaringin Hilir kurang berpartisipasi dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan Partisipatif. d. Perguliran dana tidak di kelola dengan baik. e. Kerjasama antar desa dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan kurang berjalan dengan baik.
2. Komukasi	<ul style="list-style-type: none"> a. ketidakjelasan informasi tentang PNPM Mandiri Perdesaan yang diterima oleh pelaksana. b. Kurangnya informasi tentang PNPM Mandiri Perdesaan. c. Sulit menyampaikan informasi tentang PNPM Mandiri Perdesaan oleh pelaksana kepada masyarakat.
3. Sumber Daya kurang mendukung	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengangkatan personil pelaku PNPM Mandiri Perdesaan tidak melalui musyawarah desa. b. Masih rendahnya tingkat pendidikan di Kelurahan Kotawaringin Hilir. c. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan PNPM Mandiri perdesaan. d. Kurangnya pelatihan tentang PNPM Mandiri Perdesaan bagi pelaku di desa.
4. Disposisi/ Sikap pelaksana menanggapi PNPM Mandiri Perdesaan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di kelurahan Kotawaringin Hilir lamban dalam menanggapi perintah dan teguran dari pelaku di Kecamatan. b. Penentuan usulan kegiatan dari desa berdasarkan prioritas yang di tentukan tidak lewat musyawarah desa. c. Penerimaan dana BLM tidak tergantung usulan desa. d. Jumlah RTM masih tetap sama dari tahun (2009-2011) e. Adanya penunggakan Simpan Pinjam perempuan (SPP) dari masyarakat.
5. Struktur Birokasi tidak	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak Adanya <i>Standart Operanting Prosedurs (SOP)</i> yang mendukung PNPM.

di laksanakan dengan maksimal.	b. Pembagian tupoksi para pelaksana PNPM MP tidak jelas. c. Kurangnya koordinasi antar pelaksana PNPM Mandiri perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir dan dengan pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan maupun di Kabupaten. d. Terjadi banyak diskresi dalam pencapaian tujuan PNPM Mandiri Perdesaan.
--------------------------------	--

E. Jenis dan Sumber Data

Untuk mengetahui data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian maka harus di tentukan dengan sumber data yang akan di gunakan. Arikunto (2006: 120) menjelaskan bahwa, “sumber data adalah subyek yang diajukan kepada responden yang dapat di lakukan secara tertulis ataupun lisan dari sesuatu benda, proses sesuatu dan sumber data dari dokumen atau catatan-catatan dari obyek permasalahan”.

Menurut Arikunto ((2006:130) untuk mempermudah mengidentifikasi data, maka sumber data dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) di lihat dari subyek dimana data menempel, yaitu :

1. *Person*, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket.
2. *Place*, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. Diam, misalnya ruangan, kelengkapan alat, wujud benda, warna dan lain-lain. Sedangkan bergerak misalnya aktivitas, kinerja, sajian sinetron, laju kendaraan, ritme, nyanyian, gerak tari, kegiatan belajar mengajar, dan lain-lain.
3. *Paper*, yaitu sumber yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau symbol-simbol lain. Dengan pengertian ini maka “*paper*” bukan terbatas

hanya pada kertas sebagaimana terjemahkan dari kata “*paper*” dalam bahasa Inggris, tetapi dapat berwujud batu, kayu, tulang, daun lontar, dan sebagainya, yang cocok untuk penggunaan metode dokumentasi.

Data menurut sumbernya di bedakan menjadi dua yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu data yang langsung di terima dari pihak pertama berupa pendapat pribadi yang subyektif sifatnya, oleh karena itu agar relatif cenderung lebih obyektif selayaknya di kumpulkan dari beberapa responden yang memenuhi syarat penelitian.
2. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang sudah di oleh berbagai pihak atau satu pihak yang sifatnya sudah lebih obyektif dan dapat di kumpulkan dari buku, Koran, majalah, buletin, jurnal, seminar, dan hasil penelitian orang lain.

F. Pemilihan Informan

Menurut Moleong (2008) seperti yang di tulis dalam bukunya metodologi penelitian kualitatif, di dalam mendapatkan informasi yang benar-benar valid, maka di dalam memilih informan dapat di lakukan melalui wawancara pendahuluan sebelum melakukan penelitian. Dalam penelitian ini pemilihan informan di lakukan secara *purposive*. Cara ini di lakukan dengan pertimbangan bahwa informan yang di pilih adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui atau terlibat langsung dengan fokus penelitian. Informan yang di pilih adalah informan kunci (*key informan*).

Arikunto (2006:139-140) juga menyebutkan “*purposive sample* di lakukan dengan cara mengambil subjek bukan di dasarkan atas strata, random atau daerah tetapi di dasarkan atas adanya tujuan tertentu”. Teknik ini biasanya di lakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh.

Dalam penelitian ini, secara spesifik karakteristik informan adalah para pelaksana Program Nasional Pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yaitu :

1. Penanggung Jawab Operasional Proyek (PJOK)
2. Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
3. Fasilitator Kecamatan
4. Lurah Kotawaringin Hilir
5. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
6. Warga masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir

G. Instumen Penelitian

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat di pisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peran penelitalah yang menentukan keseluruhan skenarionya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dirinya sendiri sebagai instrumen penelitian. Dimana kedudukan penulis dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Penulis merupakan perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan akhirnya penulis menjadi pelapor hasil penelitian. Pengertian instrument atau alat

peneliti disini tepat karena penulis menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian.

H. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan obyektif dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik penelitian lapangan dimana penulis langsung mengadakan penelitian di lokasi penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini di peroleh dengan :

a. Wawancara

Merupakan usaha mengumpulkan data dan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan untuk di jawab secara lisan pula melalui Tanya jawab yang terarah. Penulis berpedoman kepada pertanyaan-pertanyaan wawancara (*interview guide*) yang telah di siapkan serta tidak menutup kemungkinan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan baru. Validitas penelitian terletak pada kedalaman menggali informasi yang mencakup beberapa hal, yaitu : pertanyaan deskriptif, pertanyaan komparatif dan pertanyaan analisis.

Moleong (2009:186) menjelaskan bahwa, “wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu”. Jadi wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan cara Tanya jawab secara langsung antara penulis dengan responden yang di anggap dapat memberikan keterangan dan penjelasan yang berhubungan dengan masalah yang akan di teliti sebagaimana telah di tentukan dengan pedoman wawancara.

b. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan langsung pada obyek penelitian, guna memperoleh data yang faktual untuk di bandingkan dengan data yang di peroleh dari nara sumber.

c. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006: 231), pengertian dokumentasi adalah sebagai berikut, “Dokumentasi adalah metode yang di laksanakan oleh peneliti untuk menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya”. Jadi, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, meneliti dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip serta laporan penelitian yang sudah ada sehingga dapat menunjang pelaksanaan penelitian ini dari sumber-sumber resmi yang dapat di pertanggung jawabkan.

I. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan tahap yang amat penting, karena data yang terkumpul masih harus di olah terlebih dahulu sehingga dapat diketahui makna yang berguna dalam pemecahan masalah pada penelitian.

Menurut moelong (2009:248),“(analisis data kualitatif adalah upaya yang di lakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskanya, mencari dan

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari, dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain”.

Teknik analisa data yang di gunakan dalam penelitian ini analisis dengan model interaktif sebagaimana di kemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2007:337). Dalam model ini 3 (tiga) komponen analisis yaitu reduksi data, dan penarikan kesimpulan perlu dioperasikan.

Ketiga macam kegiatan analisis yang di sebut di atas saling berhubungan dan berlangsung terus selama penelitian dilakukan. Jadi analisis adalah kegiatan yang berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian.

Dalam penelitian ini, analisa data yang di gunakan adalah secara kualitatif melalui pendekatan induktif, yaitu menjawab dan memecahkan masalah dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang di teliti guna menghasilkan kesimpulan yang kemudian di gambarkan sesuai dengan kondisi dan waktu.

Merujuk buku metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D (Sugiyono, 2009:247-252), maka penulis menganalisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data di kerjakan dan di awali dari yang di dapat di lapangan langsung di ketik atau di tulis dengan rapi, terinci serta sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Data-data yang terkumpul semakin bertambah, oleh karena itu laporan tersebut harus di analisis sejak di mulainya penelitian. Laporan-

laporan itu perlu direduksi yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, kemudian di cari temanya. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu di perlakukan. Reduksi dapat pula membantu dalam memberikan kode-kode pada aspek-aspek tertentu.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyelenggaraan, pengabstrakan, dan informasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Tahapan dalam mereduksi data yaitu membuat ringkasan, mengkode menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat di tarik dan di verifikasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melihat data yang di sajikan, kita dapat melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus di lakukan .

3. Kesimpulan

Kegiatan untuk mengambil kesimpulan dari setiap data yang di peroleh sejak semula. Peneliti berusaha untuk mencari makna data yang di kumpulkan dengan

melihat pola, tema, hubungan, persamaan dan hal-hal yang sering timbul untuk mengambil suatu kesimpulan. Untuk memperdalam di lakukan langkah-langkah verifikasi atau pengumpulan data terbaru selama penelitian.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Sejarah Kotawaringin

Kecamatan Kotawaringin Lama adalah satu dari enam Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan luas wilayah 1.218 KM², berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukamara sebelah Barat dan Kabupaten Lamandau di sebelah Utara, jumlah penduduk di Kecamatan Kotawaringin Lama dengan jumlah Kepala Keluarga 17.358 jiwa (laporan kependudukan desa/Juni 2011)

Kerajaan Kotawaringin adalah sebuah kerajaan Islam (kepangeranan cabang Kesultanan Banjar) di wilayah yang menjadi Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini di Kalimantan Tengah yang menurut catatan istana al-Nursari (terletak di Kotawaringin Lama) didirikan pada tahun 1615 atau 1530, dan Belanda pertama kali melakukan kontrak dengan Kotawaringin pada 1637, tahun ini dianggap sebagai tahun berdirinya sesuai dengan Hikayat Banjar dan Kotawaringin (Hikayat Banjar versi I) yang bagian terakhirnya saja ditulis tahun 1663 dan di antara isinya tentang berdirinya Kerajaan Kotawaringin pada masa Sultan Mustain Billah.

Kotawaringin merupakan nama yang disebutkan dalam Hikayat Banjar dan Kakawin Negarakretagama, sering pula disebut Kuta-Ringin, karena dalam bahasa Jawa, ringin berarti beringin.

Negeri Kotawaringin disebutkan sebagai salah daerah di negara bagian Tanjung Nagara (Kalimantan-Filipina) yang tunduk kepada Majapahit. Menurut suku Dayak yang tinggal di hulu sungai Lamandau, mereka merupakan keturunan Patih Sebatang yang berasal dari Pagaruyung (Minangkabau).

Sejak diperintah Dinasti Banjarmasin, Kotawaringin secara langsung menjadi bagian dari Kesultanan Banjar, sehingga sultan-sultan Kotawaringin selalu memakai gelar Pangeran jika mereka berada di Banjar. Tetapi di dalam lingkungan Kotawaringin sendiri, para Pangeran yang menjadi raja juga disebut dengan Sultan.

Kerajaan Kotawaringin merupakan pecahan kesultanan Banjar pada masa Sultan Banjar IV Mustain Billah yang diberikan kepada puteranya Pangeran Dipati Anta-Kasuma. Sebelumnya Kotawaringin merupakan sebuah Kadipaten, yang semula ditugaskan oleh Sultan Mustain Billah sebagai kepala pemerintahan di Kotawaringin adalah Dipati Ngganding (1615). Oleh Dipati Ngganding kemudian diserahkan kepada menantunya Pangeran Dipati Anta-Kasuma. Menurut Hikayat Banjar, wilayah Kotawaringin adalah semua desa-desa di sebelah barat Baniar (sungai Baniar-sungai Barito) hingga sungai Jelai. Wilayah Kerajaan Kotawaringin paling barat adalah Taniung Sambar (Kabupaten Ketapang). batas utara adalah Gunung Sarang Pruva (Kabupaten Melawi) dan di timur sampai sungai Mendawai (Tanjung Malatayur) yaitu bagian barat Provinsi Kalimantan Tengah. sedangkan bagian timur Kalimantan Tengah yang dikenal sebagai daerah Biaju (Tanah Dayak) serta daerah pedalaman yang takluk kepadanya tetap di bawah otoritas kepala suku Davak. Kotawaringin sempat menjajah negeri Matan dan Lawai atau Pinoh dan menuntut daerah Jelai

sebagai wilayahnya. Daerah aliran sungai Pinoh (Kabupaten Melawi) merupakan termasuk wilayah Kerajaan Kotawaringin.

Menurut Kakawin Nagarakretagama yang ditulis tahun 1365 menyebutkan Kotawaringin salah satu negeri di negara bagian Tanjung Nagara (Kalimantan-Filipina) yang berpangkalan/beribukota di Tanjungpura, wilayah yang telah ditaklukan oleh Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit.

Panembahan Kalahirang dari Kerajaan Sukadana (Tanjungpura) melakukan ekspansi perluasan wilayah kekuasaan yang terbentang dari Tanjung Datok (Sambas) sampai Tanjung Puting (Kotawaringin), tetapi kemudian menurut Hikayat Banjar, negeri Kotawaringin bahkan Sukadana sendiri menjadi taklukan Maharaja Suryanata penguasa daerah Banjar kuno (Negara Dipa).

Menurut Hikayat Banjar yang bab terakhirnya ditulis pada tahun 1663, sejak masa kekuasaan Maharaja Suryanata/Raden Aria Gegombak Janggala Rajasa/Raden Suryacipta, seorang pangeran dari Majapahit yang menjadi raja Negara Dipa (Banjar kuno) yang ke-2 pada masa Hindu, orang besar (penguasa) Kotawaringin sudah menjadi taklukannya, di sini hanya disebutkan orang besar, jadi bukan disebut raja seperti sebutan penguasa negeri lainnya pada masa yang bersamaan. Kotawaringin dalam Hikayat Banjar disebutkan sebagai salah satu tanah yang di bawah angin (negeri di sebelah barat) yang telah ditaklukan.

B. Gambaran Umum Kabupaten Kotawaringin Barat

a. Letak Geografis dan Administratif

Secara geografis berdasarkan peta rekomendasi RTRWK tahun 2009 berada pada posisi adalah $1^{\circ}26' - 3^{\circ}33'$ Lintang Selatan, $111^{\circ}13' - 112^{\circ}6'$ Bujur Timur.

Secara administratif, luas Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 10.759 km² yang terdiri dari 6 Kecamatan meliputi: Kecamatan Arut Selatan, Kumai, Kotawaringin Lama, Arut Utara, Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng. Adapun batas-batas wilayah secara administratif, yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Lamandau
- Sebelah Selatan : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Kabupaten Sukamara dan Lamandau
- Sebelah Timur : Kabupaten Seruyan

Untuk lebih jelasnya mengenai Kecamatan serta luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1
Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (KM ²)	Prosentase Luas Terhadap Kabupaten
1.	Arut Selatan	2.400	22,31
2.	Kumai	2.921	27,15
3.	Kotawaringin Lama	1.218	11,32
4.	Arut Utara	2.685	24,96
5.	Pangkalan Lada	229	2,13
6.	Pangkalan Banteng	1.306	12,14
Jumlah		10.759	100,00

Sumber: Setda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat dilihat luasan setiap Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kecamatan Kotawaringin Lama merupakan 11,32 % dari luasan seluruh Kabupaten Kotawaringin Barat.

b. Kependudukan dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data yang dihimpun, bahwa jumlah penduduk pada tahun 2009 tercatat 241.383 jiwa yang tersebar secara tidak merata di enam Kecamatan. Dari jumlah penduduk tersebut yang terbanyak di Kecamatan Arut Selatan (101.805 jiwa) dan terendah berada di Kecamatan Arut Utara (17.746 jiwa). Tidak meratanya penyebaran penduduk ini disebabkan berbagai hal, antara lain: kondisi geografis, ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga menyebabkan ketersediaan jumlah sumber daya manusia di masing-masing wilayahnya.

Sementara itu, dari data yang terkumpul selama lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat selalu bertambah tiap tahunnya, dengan laju pertumbuhan sebesar 3,74% (lihat Tabel 4.2). Hal ini tentu akan menambah jumlah sumber daya manusia yang ada juga akan mempengaruhi dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang di butuhkan.

Apabila dilihat berdasarkan kepadatannya, bahwa Kecamatan Pangkalan Lada merupakan wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk tertinggi sebesar 126,24 jiwa/KM², sedangkan tingkat kepadatan terendah di Kecamatan Arut Utara sebesar 6,60 jiwa/KM². Tingginya tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Pangkalan Lada karena luas wilayah yang sangat kecil, sedangkan jumlah penduduk cukup besar. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah dan tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2
Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2006-2011
Di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Kecamatan	Tahun						Laju Pertumbuhan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
1	Kotawaringin Lama	15.553	17.292	17.535	17.768	17.100	17.358	2,33
2	Arut Selatan	86.027	89.607	91.043	92.963	100.805	101.805	3,45
3	Kumai	41.274	43.622	44.682	45.367	47.161	47.674	2,98
4	Arut Utara	11.804	13.644	13.880	14.292	16.709	17.746	8,68
5	Pangkalan Banteng	24.509	32.538	33.071	33.273	31.559	32.270	6,42
6	Pangkalan Lada	25.739	26.707	27.172	27.321	28.493	28.909	2,36
Jumlah		202.071	204.906	223.432	227.383	230.984	245.762	3,74

Sumber: Kobar dalam angka 2012 (Katalog BPS)

Dari tabel di atas dapat diperoleh informasi, tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011. Dari tabel di atas posisi Kecamatan Kotawaringin Lama merupakan Kecamatan yang memiliki Jumlah Penduduk paling sedikit di dibandingkan dengan Kecamatan lainnya di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan untuk spesifikasi jumlah penduduk tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3
Jumlah dan Kepadatan Penduduk
Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Rumah Tangga	Luas wilayah (KM ²)	Kepadatan Penduduk (KM ² /jiwa)
		Laki- laki (jiwa)	Peremp- uan (Jiwa)	Jumlah (jiwa)			
1	Kotawaringin Lama	9.213	8.145	17.358	4.807	1.218	14,25
2	Arut Selatan	52.998	48.807	101.805	27.388	2.400	42,42
3	Kumai	24.886	22.788	47.674	11.027	2.921	16,32
4	Arut Utara	10.301	7.445	17.746	4.971	2.685	6,60
5	Pangkalan Banteng	14.385	14.885	32.270	9.228	1.306	24,71
6	Pangkalan Lada	15.377	13.552	28.909	8.033	229	126,24
Jumlah		130.160	115.602	245.762	65.454	10.759	22,84

Sumber: Kobar dalam angka 2012 (Katalog BPS)

B. Program Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Kotawaringin Barat

1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Secara Khusus pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat di mulai dari tahun 2009, namun secara umum program tersebut telah dilaksanakan sejak lama sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional yang di amanatkan didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Program Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan melalui beberapa program aksi sebagai berikut :

- a. Meneruskan, meningkatkan dan menyempurnakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan sebagai inti Program Penanggulangan kemiskinan yang bercirikan program yang memberdayakan masyarakat, terdesentralisasi dan implementasi program disesuaikan dengan kebutuhan lokal dengan perencanaan yang bersifat *bottom-up* pada tingkat akar.

- b. Mengembangkan Program Desa Mandiri yang difokuskan pada desa-desa tertinggal agar tidak terjadi kesenjangan kemajuan yang semakin luas, melalui sektor-sektor pembangunan utama, seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, serta menumbuhkan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal.
- c. Penyempurnaan data keluarga miskin dan memutakhirkan data rumah tangga sasaran akan diintegrasikan untuk semua program afirmasi dan subsidi sehingga berbagai duplikasi dapat dihindari.
- d. Pemantapan dan penyempurnaan Program Jagung Hibrida yang di fasilitasi pemerintah daerah meliputi penyediaan akses modal, bimbingan teknis pertanian, pengolahan hasil sampai dengan pemasaran.
- e. Penyediaan beras murah bagi keluarga miskin untuk menjamin ketahanan pangan.
- f. Melaksanakan dan memperkuat program nasional seperti : Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin) yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.
- g. Pemihakan kepada Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, antara lain dengan penguatan peran dan kemampuan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Maruting Sejahtera untuk memberikan akses modal bagi masyarakat kecil.

Adapun program penanggulangan kemiskinan berdasarkan kluster dan sumber pembiayaan sejak tahun 2009 sampai tahun 2012 baik yang didanai dari APBN maupun APBD sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.4
Tabel Program Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Kluster dan Sumber Pembiayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009

No	Kluster	Sumber Dana (Rp)	
		APBN	APBD
1.	Kluster I Program Bantuan dan Perlindungan social	21.325.012.979,-	13.243.131.300,-
2.	Kluster II Program Pemberdayaan Masyarakat	11.653.635.000,-	18.234.806.000,-
3.	Kluster III Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	970.000.000,-	
TOTAL		33.948.647.979,-	31.477.937.300,-

Dari tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa program penanggulangan kemiskinan Berdasarkan Kluster dan Sumber Pembiayaan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2009 menunjukkan pada kluster ke III program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak terbiayai oleh APBD.

Tabel 4.5
Program Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Kluster dan Sumber Pembiayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010

No	Kluster	Sumber Dana	
		APBN (Rp)	APBD (Rp)
1.	Kluster I Program Bantuan dan Perlindungan social	19.330.983.476,-	18.217.601.650,-
2.	Kluster II Program Pemberdayaan Masyarakat	21.715.425.000,-	18.032.892.294,-
3.	Kluster III Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)		1.791.000.700,-
TOTAL		41.046.408.476,-	38.041.494.644,-

Dari tabel 4.5 di atas dapat di lihat bahwa program penanggulangan kemiskinan Berdasarkan Kluster dan Sumber Pembiayaan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2010 menunjukkan pada Kluster ke III program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak terbiayai oleh APBN.

Tabel 4.6
Program Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Kluster dan Sumber Pembiayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011

No	Kluster	Sumber Dana	
		APBN (Rp)	APBD (Rp)
1.	Kluster I Program Bantuan dan Perlindungan social	13.381.961.243,-	7.267.325.000,-
2.	Kluster II Program Pemberdayaan Masyarakat	14.986.385.000,-	34.485.088.300,-
3.	Kluster III Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)		966.803.000,-
TOTAL		28.368.346.243,-	42.719.216.300,-

Dari tabel 4.6 di atas dapat di lihat bahwa program penanggulangan kemiskinan Berdasarkan Kluster dan Sumber Pembiayaan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2011 menunjukkan pada kluster ke III program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak terbiayai oleh APBN.

Tabel 4.7
Tabel Program Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Kluster dan Sumber Pembiayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012

No	Kluster	Sumber Dana	
		APBN (Rp)	APBN (Rp)
1.	Kluster I Program Bantuan dan Perlindungan sosial	28.944.670.348,-	13.690.602.955,-
2.	Kluster II Program Pemberdayaan Masyarakat	21.600.474.000,-	20.039.970.055,-
3.	Kluster III Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	1.077.835.000,-	8.459.599.000,-
TOTAL		51.622.979.345,-	42.190.172.010,-

Dari tabel 4.7 di atas dapat di lihat bahwa program penanggulangan kemiskinan Berdasarkan Kluster dan Sumber Pembiayaan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2009 menunjukan pada semua kluster program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat terbiayai oleh APBD dan APBN.

2. Isu-Isu Strategis Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

Isu-isu strategis yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat antar lain sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya kualitas SDM dan sumber daya aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik secara berkualitas dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan (*good governance*);
- b. Belum optimalnya pengelolaan SDA sebagai nilai tambah ekonomi (*value added*) dan upaya pelestarian SDA secara berkelanjutan (*sustainable resource*);

- c. Tidak meratanya tingkat pembangunan di wilayahnya sehingga menyebabkan perkembangan pada beberapa Kecamatan menjadi terlambat;
- d. Kurangnya prasarana jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dengan pusat permukiman, terutama dari desa ke kota;
- e. Adanya kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh aktifitas manusia dalam membuka lahan baik perkebunan maupun kegiatan ladang berpindah yang dilakukan masyarakat peladang;
- f. Belum optimalnya penggalian sejarah dan keragaman suku budaya dalam pengembangan kepariwisataan, dan belum optimalnya peran perempuan dalam pelaksanaan pembangunan (*kesetaraan gender*);
- g. Masih adanya masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah, sehingga mengurangi ketersediaan jumlah potensi sumber daya manusia yang tersedia;
- h. Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan sebagai dasar dalam pembangunan masyarakat sehat dan sejahtera.

B. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan.

PNPM Mandiri adalah sebuah akronim (singkatan) dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Ditinjau dari aspek historis, PNPM Mandiri diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu,

Sulawesi Tengah. Merupakan *scaling up* (pengembangan yang lebih luas) dari program-program penanggulangan kemiskinan pada era-era sebelumnya. PNPM Mandiri digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai Departemen yang ada pada saat itu, khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (*community development*) sebagai pendekatan operasionalnya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat menuju kemandiriannya dalam pembangunan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Secara umum PNPM Mandiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan meningkatkan kesempatan kerja.

Dalam pelaksanaannya, PNPM Mandiri memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. Tiga komponen utamanya yaitu : a) Dana BLM (Bantuan Langsung masyarakat) untuk kegiatan pembangunan, b) Dana Kegiatan Operasional (DOK) untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat (*capacity buiding*), dan c) pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator keuangan.

1. Alokasi Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.

a. Alokasi Dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Awal Implementasi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak dapat dilaksanakan di semua Kecamatan yang ada. Kronologis perkembangan Kecamatan yang mendapat dana dari kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8
Jumlah Kecamatan dan Sumber Dana Program Pengembangan Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2003 s/d 2006

Tahun	Jumlah			Sumber Dana		
	Kecamatan	Desa Sasaran	Desa Terdanai	APBN (Rp) (Juta)	APBD (Rp) (Juta)	Jumlah (Rp) (Juta)
2003	Kotawaringin Lama	16	12	500	0	500
2004	Kotawaringin Lama	16	15	500	0	500
2005	Kotawaringin Lama	16	10	500	0	500
2006	Kotawaringin Lama	16	10	150	350	500
	Jumlah	64	47	1.650	350	2.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Kecamatan Kotawaringin Lama adalah Kecamatan yang pertama kali mendapat dana untuk kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, dan tidak seluruh desa yang dijadikan sasaran, demikian juga sumber pendanaannya hanya bersumber dari APBN.

Perkembangan selanjutnya, yaitu mulai pada tahun 2007, terdapat 4 (empat) Kecamatan yang mendapat dana PNPM dan sumber pendanaan disamping dari

APBN juga bersumber dari APBD Kabupaten. Lebih jelas perkembangan pada tahun 2007 sampai tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.9

Jumlah Kecamatan dan Sumber Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PKK) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007

Tahun	Jumlah			Sumber Dana		
	Kecamatan	Desa Sasaran	Desa Terdanaai	APBN (Rp) (Juta)	APBD (Rp) (Juta)	Jumlah (Rp) (Juta)
2007	Kotawaringin Lama	16	10	150	350	500
	Kumai	32	13	300	700	1.000
	Arut Selatan	17	11	300	700	1.000
	Arut Utara	10	7	150	350	500
	Jumlah	78	41	900	2.100	3.000

Ket : komposisi dana APBN : APBD (30 : 70)

Dari tabel 4.9 di atas dapat dilihat Jumlah Kecamatan dan Sumber Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PKK) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007. Pembiayaan program tersebut menunjukkan bahwa peran APBD lebih besar dari pada APBN.

Tabel. 4.10
Jumlah Kecamatan dan Sumber Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008

Tahun	Jumlah			Sumber Dana		
	Kecamatan	Desa Sasaran	Desa Terdanai	APBN (Rp) (Juta)	APBD (Rp) (Juta)	Jumlah (Rp) (Juta)
2008	Kotawaringin Lama	16	14	750	750	1.500
	Kumai	16	10	500	500	1.000
	Arut Selatan	17	13	500	500	1.000
	Arut Utara	10	7	750	750	1.500
	Jumlah	65	44	2.500	2.500	5.000

Ket : komposisi dana APBN : APBD (50 : 50)

Dari tabel 4.10 di atas dapat di lihat Jumlah Kecamatan dan Sumber Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PKK) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008. Pembiayaan program tersebut menunjukkan bahwa peran antara APBN dan APBD sama besarnya.

Tabel. 4.11
Jumlah Kecamatan dan Sumber Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009

Tahun	Jumlah			Sumber Dana		
	Kecamatan	Desa Sasaran	Desa Terdanai	APBN (Rp) (Juta)	APBD (Rp) (Juta)	Jumlah (Rp) (Juta)
2009	Kotawaringin Lama	16	14	900	200	1.100
	Kumai	16	9	450	450	900
	Arut Selatan	19	11	450	450	900
	Arut Utara	11	7	450	450	900
	Pangkalan Lada	11	10	450	450	900
	Pangkalan Banteng	13	9	450	450	900
	Jumlah	86	60	3.150	2.450	5.600

Ket : komposisi dana APBN : APBD (56:43)

Dari tabel 4.11 di atas dapat di lihat Jumlah Kecamatan dan Sumber Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PKK) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009. Pembiayaan program tersebut menunjukkan bahwa peran APBN lebih besar dari pada APBD.

Tabel. 4.12
Jumlah Kecamatan dan Sumber Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010

Tahun	Jumlah			Sumber Dana		
	Kecamatan	Desa Sasaran	Desa Terdanai	APBN (Rp) (Juta)	APBD (Rp) (Juta)	Jumlah (Rp) (Juta)
2010	Kotawaringin Lama	17	14	800	200	1.100
	Kumai	18	7	1.200	300	1.500
	Arut Selatan	11	7	1.200	300	1.500
	Arut Utara	11	10	400	350	750
	Pangkalan Lada	11	11	1.200	350	750
	Pangkalan Banteng	17	12	1.200	300	750
	Jumlah	94	71	6.000	1.750	7.750

Ket : komposisi dana APBN : APBD (80 : 20)

Dari tabel 4.11 di atas dapat di lihat Jumlah Kecamatan dan Sumber Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PKK) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010. Pembiayaan program tersebut menunjukkan bahwa peran APBN lebih besar dari pada APBD

Tabel. 4.13

Tabel Alokasi dan Sumber Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011

Tahun	Jumlah			Sumber Dana		
	Kecamatan	Desa Sasaran	Desa Terdantai	APBN (Rp) (Juta)	APBD (Rp) (Juta)	Jumlah (Rp) (Juta)
2011	Kotawaringin Lama	17	10	360	90	450
	Kumai	18	8	360	90	450
	Arut Selatan	20	5	360	90	450
	Arut Utara	11	7	360	90	450
	Pangkalan Lada	11	11	1.200	300	1.500
	Pangkalan Banteng	17	14	1.200	300	1.500
	Jumlah	94	55	3.840	960	4.800

Ket : komposisi dana APBN : APBD (80 : 20)

Berdasarkan beberapa tabel di atas, diketahui bahwa baru tahun 2009 seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang mendapat dana PNPM mandiri Perdesaan serta melaksanakan program tersebut, demikian juga dengan sumber dana diperoleh dari APBN dan APBD.

2. Beberapa Hasil Kegiatan Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan lebih lebih banyak pada bidang fisik, baik berupa sarana maupun prasarana yang merupakan realisasi dari rencana pembangunan yang diusulkan oleh warga masyarakat. Beberapa hasil yang dicapai dan anggaran yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.14

Hasil Pelaksanaan Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kotawaringin Lama

No.	Jenis Kegiatan	Volume Kegiatan	Alokasi Dana		
			BLM	Swadaya	Total
1	Jalan	4 Unit	203.646.473	19.105.000	222.751.473
2	Jembatan Kayu Ulin	3 Unit	80.820.589	20.548.500	101.369.089
3	Gorong-gorong	3 Unit	64.251.239	5.572.500	69.823.739
4	Listrik	7 Unit	241.761.631	52.792.500	294.554.131
5	Pasar	1 Unit	24.877.368	8.185.000	33.062.368
6	Dermaga	1 Unit	83.092.053	11.665.000	94.757.053
7	Saran-prasarana lain	1 Unit	27.999.300	0	27.999.300
Jumlah			726.448.653	117.868.500	844.317.153

Sumber dana swadaya ada ada di tabel di atas di peroleh dari masyarakat yang mampu dan masyarakat yang nantinya menikmati hasil yang akan di bangun dengan cara iuran yang jumlahnya di di dasarkan pada hasil musyawarah.

1)Jalan

Gambar 2.1
Penimbunan, Drainase, Gorong-gorong, Desa Palih Baru Kecamatan
Kotawaringin Lama



1)Pembanguna Posyandu
Gambar 2.2

Posyandu Desa Ipuh Bangun Jaya Kecamatan Kotawaringin Lama



2) Pasar

Gambar 2.3
Pasar Ikan Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaring Lama



3. Implementasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Kotawaringin Hilir.

a) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi. Implementasi kegiatan PMPM Mandiri perdesaan di Kecamatan Kotawaringin Hilir Kabupaten Kotawaringin Barat dilaksanakan dengan perbedoman pada rencana program yang telah disusun oleh

masyarakat di koordinir oleh pelaksana kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang terdiri dari :

PJOK, Ketua Unit Pengelola Kegiatan, Fasilitator Kecamatan, Lurah, Tim Pelaksanan Kegiatan, dan Unsur Masyarakat.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan semua unsur pelaksana kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, wawancara tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Beberapa hasil wawancara tersebut dapat di kelompokkan sebagai berikut berdasarkan nara sumbernya masing-masing.

b) Pengelola Partisipasi

Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir kurangnya partisipasi masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Pembangunan partisipatif tidak di kelola dengan baik. Pemerintahan Kelurahan Kotawaringin Hilir dan kurang berpartisipasi dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan Partisipatif. Serta perguliran dana tidak di kelola dengan baik. Begitu juga kerjasama antar desa dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan kurang berjalan dengan baik.

Hasil Wawancara dengan Bapak Musyafir selaku Ketua TPK Kecamatan Kotawaringin Lama, beliau menuturkan sebagai berikut :

Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir tahun 2011 berjalan kurang baik. Kami telah mentaati Pedoman Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan yaitu dengan tersedianya map 1-7 yang berisi ketentuan administrasi sesuai dengan PTO PNPM mandiri Perdesaan walaupun kami akui bahwa kami

butuh waktu cukup lama dalam pengisiannya karena keterbatasan pengetahuan kami tentang PNPM Mandiri dan banyak pelaku yang baru serta untuk koordinasi dalam hal pelaporan cukup lama.

Kami telah melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan sesuai dengan alur kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang ada di PTO, walaupun terkadang kami kesulitan dalam pengumpulan masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir untuk bermusyawarah tentang PNPM Mandiri Perdesaan. Hal ini dikarenakan KPMD kurang membaur dengan masyarakat sehingga kami sedikit kesulitan dalam penggalan gagasan masyarakat

Kami akui untuk pelaporan hasil kegiatan kepada UPK sering terlambat karena keterbatasan kami tentang pemahaman PNPM Mandiri Perdesaan dikarenakan banyak pelaku yang baru sehingga mengakibatkan keterlambatan pencairan dana BLM karena syarat untuk mecairkan dana BLM adalah dengan memberikan laporan hasil kegiatan pencairan dana BLM tahap sebelumnya.

Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2011 di Kelurahan Kotawaringin Hilir sudah tepat sasaran karena usulan kegiatan yang diajukan merupakan hasil dari gagasan-gagasan dari masyarakat.

Terkait partisipasi masyarakat tersebut Lurah Kotawaringin Hilir berpendapat bahwa :

Saya melihat untuk Kelurahan Kotawaringin Hilir sudah menjalankan administrasi dengan cukup baik walaupun dalam pengerjaannya membutuhkan waktu yang cukup, lama karena banyak pelaku yang baru.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir sudah cukup sesuai dengan PTO yang ada. Pelaku di desa dipilih langsung oleh masyarakat dalam Mudes Sosialisasi walaupun tingkat kehadiran masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir cukup rendah karena mayoritas penduduk Kelurahan Kotawaringin Hilir bekerja sebagai buruh pabrik. Kemudian untuk pengajuan usulan kegiatan sudah berdasarkan gagasan dari masyarakat namun membutuhkan waktu cukup lama dalam penetapan gagasan dari masyarakat.

Tahun ini Kelurahan Kotawaringin Hilir mengalami keterlambatan pencairan dana BLM dikarenakan keterlambatan pelaporan hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Keterlambatan ini karena banyak pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin yang baru yang belum begitu memahami PNPM Mandiri Perdesaan.

kegiatan PNPM Mandiri tahun 2011 dapat dikatakan cukup tepat sasaran karena usulan yang diajukan dalam MAD merupakan hasil dari agasasan dari masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir. Pengambilan gagasan dilakukan oleh KPMD melalui pertemuan di dusun

Demikian juga apa yang di tuturkan oleh Ketua UPK Kelurahan Kotawaringin Hilir. Terkait pengelolaan partisipasi ini beliau mengatakan.

Untuk Kelurahan Kotawaringin Hilir saya rasa administrasinya kurang baik karena dalam pelaporannya sering telat. Selain itu map 1-7 masih banyak yang belum di isi. Hal ini mungkin karena sumber daya manusia pelaksana di Kelurahan Kotawaringin Hilir kurang memadai serta adanya pergatian pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir. Yang sedikit memprihatinkan, untuk administrasi Kelurahan Kotawaringin Hilir sangat kurang dalam hal pelaporan. Sehingga menghambat proses pencairan dana tahap selanjutnya yang seharusnya bulan Agustus telah memberikan LPJ akhir kegiatan tetapi karena keterlambatan dari pelaku di desa, maka Kelurahan Kotawaringin Hilir belum mencairkan dana BLM tahap III.

Kelurahan Kotawaringin Hilir telah melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan sesuai dengan alur kegiatan yang tercantum dalam PTO, namun saat saya menghadiri Musdes di Kelurahan Kotawaringin Hilir tingkat kehadiran dari masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir rendah. Sangat sulit sekali untuk mengumpulkan masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir karena selain banyak yang bekerja sebagai buruh, masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir juga kurang tertarik untuk berpartisipasi dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan sehingga butuh waktu lama untuk mendapatkan gagasan dari masyarakat yang nantinya akan menjadi suatu usulan kegiatan yang akan di danai oleh PNPM Mandiri Perdesaan.

Menurut saya administrasi dan pelaporan hasil kegiatan Kelurahan Kotawaringin Hilir

Kurang baik karena masih banyak map yang belum diisi dan keterlambatan pelaporan hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Keterlambatan tersebut dikarenakan adanya pergantian pelaku PNPM Mandiri Perdesaan. Karena banyak pelaku yang baru maka masih ada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan yang belum mengetahui dan paham tentang PNPM Mandiri Perdesaan.

Partisipasi dan peran seluruh warga dalam keberhasilan program PNPM Mandiri Perdesaan ini sangat menunjang kesuksesannya demikian yang di katakan Fasilitator Kecamatan beliau mengatakan:

Selama saya mendampingi proses perencanaan hingga pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir, para pelakunya memang kurang tanggap dan kurang aktif untuk bertanya tentang PNPM Mandiri Perdesaan. Sehingga untuk hasil pelaporan terkadang banyak yang kurang sesuai pengisiannya.

Selama saya mendampingi pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir, pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir berjalan sesuai dengan alur kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang ada di PTO. Memang saya akui tingkat partisipasi dari masyarakat cukup rendah. Hal ini dapat dilihat dalam tingkat kehadiran masyarakat dalam Musdes yang diadakan oleh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat desa. Dan untuk tahun 2011 ini, dalam penentuan usulan kegiatan cukup terlambat sehingga pada saat MAD belum bisa memberikan gambaran kasar tentang jenis kegiatan yang akan di danai oleh PNPM Mandiri Perdesaan. Untuk pelaku PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2011 saya menilai kurang aktif dalam berbagai hal yang berkaitan dengan PNPM Mandiri Perdesaan.

Keterlambatan pelaporan hasil kegiatan di Kelurahan Kotawaringin Hilir terjadi karena masih banyak pelaku yang tidak memahami PNPM Mandiri Perdesaan padahal sosialisasi tentang PNPM Mandiri Perdesaan telah dilakukan pada saat MAD Sosialisasi di Kecamatan Kotawaringin Lama oleh pelaku di Kecamatan

Dalam setiap posisi seseorang dalam jabatan mendapatkan amanat tugas yang harus di emban Hasil Wawancara dengan PJOK Kecamatan Kotawaringin Lama beliau mengatakan:

Saya melihat untuk Kelurahan Kotawaringin Hilir telah mengisi map 1-7 dengan cukup baik walaupun sering revisi. Map 1-7 terdiri dari map 1 berisi dokumen perencanaan, map 2 berisi arsip-arsip dalam pelaksanaan kegiatan, map 3 berisi dokumen ketenagakerjaan, map 4 berisi dokumen bahan dan alat, map 5 berisi dokumen pertanggungjawaban dana, map 6 berisi dokumen pelaporan, map 7 berisi transparansi pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Tetapi saya

melihat pelaku di Kelurahan Kotawaringin Hilir belum melengkapi pengisian dari masing-masing map yang telah ditetapkan. Bisa dikatakan administrasi PNPM Mandiri Perdesaan Kelurahan Kotawaringin Hilir kurang baik. Selain itu Kelurahan Kotawaringin Hilir terlambat dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, yang mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan, yang seharusnya bulan Agustus ini sudah selesai kegiatan sampai 100%, namun Kelurahan Kotawaringin Hilir belum mencairkan dana BLM tahap III.

Dalam hal pemilihan personil, pengajuan usulan kegiatan, pengadaan barang dalam pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan aturan yang ada pada PTO PNPM Mandiri Perdesaan. Namun, dalam hal pelaporan dan pengajuan usulan serta penampungan gagasan-gagasan dari masyarakat cukup lama karena selain masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir yang kebanyakan bekerja sebagai buruh, dari pihak pelaku di tingkat desa kurang aktif dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan terutama KPMD kurang membaur dengan masyarakat sehingga gagasan-gagasan dari masyarakat kurang digali dengan baik

Tahun ini Kelurahan Kotawaringin Hilir administrasinya kurang baik terutama dalam hal pelaporan hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Pelaku Kelurahan Kotawaringin Hilir sering terlambat dalam membuat laporan kegiatan kepada UPK kecamatan Kotawaringin Lama. Hal ini dikarenakan pelakunya banyak yang baru sehingga mungkin belum begitu memahami PNPM Mandiri Perdesaan.

Menurut saya kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir sudah cukup tepat sasaran karena usulan kegiatan yang diajukan oleh pelaku di Kelurahan Kotawaringin Hilir merupakan hasil dari gagasan dari masyarakat dan untuk kegiatan SPP sangat membantu bagi masyarakat miskin dalam peningkatan usaha atau membantu dalam kelangsungan hidup masyarakat miskin Kelurahan Kotawaringin Hilir. Tetapi pelaku PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2011 di Kelurahan Kotawaringin Hilir kurang bisa bekerja dengan baik terutama KPMD. KPMD saya nilai lamban dalam bekerja sehingga dalam penggalian gagasan dari masyarakat butuh waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan tingkat kehadiran masyarakat sangat rendah dalam kegiatan musyawarah selain itu juga KPMD Kelurahan Kotawaringin Hilir kurang aktif atau membaur dalam masyarakat

Selanjutnya peneliti juga memerlukan informasi tentang bagaimana para pelaksana kegiatan melakukan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan PNPM mandiri Perdesaan. Hasil wawancara tersebut

sebagaimana di paparkan sebagai berikut. Hasil Wawancara dengan Ketua

TPK Kecamatan Kotawaringin Lama

Selama ini kami belum bisa melaksanakan koordinasi dengan baik. Hal ini dikarenakan kami mempunyai kesibukan masing-masing dan tahun ini pelakunya banyak yang baru. Selain itu saya menilai pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir tahun 2011 kurang aktif dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan seperti contohnya KPMD kurang membaur dengan masyarakat sehingga dalam penggalan usulan dari tiap dusun membutuhkan waktu yang cukup lama. Saya juga melihat bahwa pelaku di Kelurahan Kotawaringin Hilir kurang aktif bertanya dan melalaikan koordinasi dengan UPK dan Fasilitator Kecamatan. Saya hanya bisa memberikan teguran bagi KPMD untuk lebih aktif melakukan pertemuan di tingkat dusun agar penggalan gagasan dari masyarakat bisa didapatkan dan segera dirancang untuk dijadikan sebagai sebuah usulan kegiatan yang nantinya akan di danai oleh PNPM Mandiri Perdesaan.

Kami kurang memahami PNPM Mandiri karena rata-rata pelaku di Kelurahan Kotawaringin Hilir adalah pelaku baru sehingga diperlukan pendampingan dari Fasilitator Kecamatan. Selama ini kami mendapatkan informasi tentang PNPM Mandiri Perdesaan dari sosialisasi pada saat MAD sosialisasi dan pelatihan yang diberikan oleh fasilitator tetapi pelaksanaan pelatihan sangat jarang.

saat ini kami jika ada perintah dan teguran dari pelaku di Kecamatan selalu kami tindaklanjuti dengan baik namun memang diakui oleh kami bahwa masih belum optimal karena adanya beberapa hambatan. Salah satunya adalah dalam hal pelaporan, kami akui memang sering terlambat memberikan laporan hasil kegiatan karena pelaku PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2011 banyak yang baru sehingga pemahamannya masih kurang dan menyebabkan tidak sesuai target waktu dalam pelaksanaan kegiatan dan menghambat pencairan dana selanjutnya.

Kami telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir tentang PNPM Mandiri Perdesaan dalam musdes sosialisasi, tetapi tingkat kehadiran masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir cukup rendah karena mayoritas masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir bekerja sebagai buruh pabrik sehingga agak sulit dalam mengumpulkan masyarakat.

Koordinasi dan komunikasi sangat penting sebagai bentuk penataan kegiatan, hal ini di katakan oleh Lurah Kotawaringin Hilir untuk Program PNPM-MD ini beliau mengatakan

Koordinasi yang dilakukan oleh pelaku di Kelurahan Kotawaringin Hilir kurang baik, baik dari TPK, KPMD, dan TPU. Hal ini dikarenakan masing-masing pelaku memiliki kesibukan. Mayoritas pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir adalah pedagang sehingga untuk melakukan koordinasi di siang hari cukup sulit. Masih perlu dioptimalkan, walaupun PJOK dan Fasilitator Kecamatan sudah melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada pelaksana di desa akan tetapi intensitasnya sangat jarang. Kami merasa sangat kurang jelas jika kami hanya berpedoman pada PTO dan penjelasannya saja karena PTO masih hal-hal umum saja untuk detailnya kami kurang memahami. Menurut saya pelaku di Kelurahan Kotawaringin Hilir kurang konsisten dengan perintah atau teguran dari pelaku di tingkat Kecamatan. Terlihat dalam teguran untuk keterlambatan pelaporan bagi pelaku di Kelurahan Kotawaringin Hilir tidak ditindak lanjuti dengan baik saya selaku kepala Kelurahan telah menghimbau kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan tetapi pada kenyataannya memang sulit untuk mengumpulkan masyarakat karena mayoritas masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir bekerja sebagai buruh pabrik dan pedagang. Jika siang hari mereka bekerja hingga sore, malamnya mungkin capek sehingga jika pelaksanaan Musdes pada siang hari banyak yang tidak hadir.

Dalam intern Unit Pelaksana kegiatan PNPM-MD ini koordinasi dan komunikasi membawa arah yang baik sebagaimana di katakan Ketua UPK Kelurahan Kotawaringin Hilir

Koordinasi yang dilakukan dengan kami selaku pelaku di Kecamatan sangat kurang karena pelaku di desa kurang aktif sehingga pelaporan hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir sering terlambat dan terjadi revisi laporan kegiatan. Kami selaku pelaku di Kecamatan Kotawaringin Lama telah memberikan sosialisasi sesuai dengan TPO yaitu pada saat MAD sosialisasi serta adanya pelatihan dari Fasilitator Kecamatan bagi pelaku di Kelurahan Kotawaringin Hilir. Namun kami akui bahwa pelatihan yang diberikan belum optimal karena DOK pelatihan PNPM Mandiri kurang mencukupi

yaitu sebesar Rp. 45.000.000,- dari dana BLM Rp. 3.000.000.000,- untuk pelatihan wajib bagi pelaku di desa

pelaku di Kelurahan Kotawaringin Hilir kurang baik dalam menindaklanjuti perintah dan teguran dari pelaku di kecamatan karena pelaksanaannya agak lambat Jadi sering terjadi keterlambatan pelaporan hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Yang seharusnya bulan Agustus ini sudah menyelesaikan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2011, tetapi untuk Kelurahan Kotawaringin Hilir belum menyelesaikannya bahkan belum mencairkan dana BLM tahap III. Kami hanya bisa memberikan sanksi lokal saja yang berupa teguran bagi pelaku di desa. saya melihat tingkat kehadiran masyarakat Kotawaringin dalam kegiatan Musyawarah Desa yang dilakukan oleh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir sangat kurang. Saat saya di undang dalam Musdes, saya melihat hanya setengahnya saja yang hadir dari jumlah undangan yang diberikan kepada masyarakat.

Fasilitator PNPM-MD Kecamatan Kotawaringin Hilir dalam kaitannya koordinasi dan komunikasi ini mengatakan.

Menurut pendapat saya, pelaku di Kelurahan Kotawaringin Hilir dalam melaksanakan koordinasi antar pelaku di desa kurang baik. Sepengetahuan saya, para pelaku di desa jarang mengadakan pertemuan karena biasanya dalam kegiatan musyawarah di tingkat desa saya di undang untuk menghadiri pertemuan tersebut dan memang sudah menjadi tugas saya untuk mendampingi pelaku PNPM Mandiri di tingkat desa dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Selain itu untuk berkoordinasi dengan pelaku di tingkat Kecamatan kurang berjalan dengan baik, karena saya menilai untuk pelaku PNPM Mandiri Perdesaan Kelurahan Kotawaringin Hilir tahun 2011 ini kurang aktif bertanya atau koordinasi dengan kami yang ada di Kecamatan.

Sosialisai dan koordinasi dengan pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir telah berjalan sesuai dengan PTO tetapi saya akui memang belum optimal karena menurut saya DOK pelatihan kurang mencukupi yaitu sebesar Rp.45.000.000,- untuk 11 pelatihan wajib untuk 17 desa yang ada di Kelurahan Kotawaringin Hilir. Sejauh ini kami dalam mendampingi pelaku di Kelurahan Kotawaringin Hilir, para pelaku di Kelurahan Kotawaringin Hilir agak lamban dalam menindaklanjuti teguran dari pelaku di Kecamatan. Kami telah memberikan kelonggaran dalam batas waktu pengumpulan laporan tetapi kurang ditindaklanjuti dengan baik.

seharusnya dalam penyampaian informasi tentang PNPM Mandiri Perdesaan itu ditujukan kepada seluruh masyarakat tetapi karena tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir kurang maka akhirnya pelaku di Kelurahan Kotawaringin Hilir mengatasinya dengan memberikan undangan kepada perwakilan masing-masing dusun untuk mengikuti musyawarah desa

Hasil Wawancara dengan Bapak Samijan selaku PJOK Kecamatan Kotawaringin Lama

Saya sering menghimbau kepada pelaksana di desa untuk sering bertanya kepada fasilitator Kecamatan, jangan hanya mengandalkan fasilitator datang meninjau ke desa. Hal ini dilakukan agar Kelurahan Kotawaringin Hilir tidak ketinggalan informasi tentang PNPM Mandiri Perdesaan. Kurangnya koordinasi ini terlihat pada tahun ini saja Kelurahan Kotawaringin Hilir belum mencairkan dana BLM tahap III karena keterlambatan pelaporan. Takutnya dengan adanya kejadian ini, Kelurahan Kotawaringin Hilir tidak bisa ikut kompetisi tingkat Kecamatan dalam hal usulan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan yang lebih parahnya lagi Kelurahan Kotawaringin Hilir bisa tidak mendapatkan bantuan dana BLM untuk kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan tahun berikutnya karena keterlambatan administrasi PNPM Mandiri Perdesaan. Sebenarnya informasi tentang PNPM Mandiri Perdesaan sudah cukup jelas dituangkan dalam Pedoman Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan. Namun, terkadang dari pelaksana desa sendiri malas untuk membaca dan memahami sendiri. Mereka harus dibimbing oleh Fasilitator Kecamatan dalam pemahaman PTO PNPM Mandiri Perdesaan.

Pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir selalu menerima peringatan-peringatan dari Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) berupa teguran dan peringatan akan kewajibannya kepada UPK yaitu memberikan laporan bulanan, semesteran, tahunan serta setoran simpan pinjam perempuan (SPP) kepada pelaksana di Kecamatan. Karena lemahnya payung hukum dalam PNPM mandiri Perdesaan maka terkadang teguran dan peringatan sering kali diabaikan oleh pelaksana di desa. Ketidakadaan sanksi yang jelas bagi pelanggar menyebabkan hal ini menjadi suatu hambatan dalam konsistensi pelaksanaan PNPM mandiri perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir. Kami hanya bisa memberikan sanksi lokal yang telah disepakati dalam MAD, itupun kadang tidak dipatuhi oleh pelaku di desa.

Saya menilai tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir cukup rendah karena dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir cukup rendah dalam musyawarah desa yang dilakukan

oleh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir.

c) Sumber daya

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik (*intangible*). Sumber daya ada yang dapat berubah, baik menjadi semakin besar maupun hilang, dan ada pula sumber daya yang kekal (selalu tetap). Selain itu, dikenal pula istilah sumber daya yang dapat pulih atau terbarukan (*renewable resources*) dan sumber daya tak terbarukan (*non-renewable resources*). Sumber daya dapat pulih termasuk tanaman dan hewan (sumber daya hayati).

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam pengertian praktis sehari-hari, SDM lebih dimengerti sebagai bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi. Oleh karena itu, dalam bidang kajian psikologi, para praktisi SDM harus mengambil penjurusan industri dan organisasi.

Sebagai ilmu, SDM dipelajari dalam manajemen sumber daya manusia atau (MSDM). Dalam bidang ilmu ini, terjadi sintesa antara ilmu manajemen dan psikologi. Mengingat struktur SDM dalam industri-organisasi dipelajari oleh ilmu

manajemen, sementara manusia-nya sebagai subyek pelaku adalah bidang kajian ilmu psikologi.

Terkait sumber daya manusia dalam pelaksanaan PNPM-MD ini Lurah Kotawaringin Hilir berpendapat

tidak semua pelaku di desa mampu menyarapaikan informasi tentang PNPM Mandiri Perdesaan dengan baik, seperti contohnya KPMD kurang mampu menggali gagasan-gagasan dari masyarakat karena KPMD tahun 2011 ini kurang aktif dan membaaur dengan masyarakat, selain itu tingkat pendidikan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir cukup rendah sehingga dalam pelaksanaan administrasi PNPM Mandiri kurang baik. Hal ini yang masih menjadi kendala bagi kami selaku pelaku di desa. Kami belum memiliki gedung khusus untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Kami masih menginduk pada kantor Kelurahan Kotawaringin Hilir yang hanya satu ruangan saja. Itupun kami tempati utuk semua pelaku PNPM di desa. Harapan kami kepada kepala kelurahan agar kami diberikan tempat yang layak untuk membantu kelancaran proses pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Selama ini dokumen-dokumen sering tercampur antara pelaku dalam kegiatan perencanaan, pelaku kegiatan pelaksanaan dan pelaku pemeliharaan. Harapan yang kami inginkan tiap pelaku dari masing-masing kegiatan memiliki ruangan masing-masing walaupun masih menginduk pada kantor Kelurahan.

kami baru menerima pelatihan 3 (tiga) kali dalam tahun 2011 ini yaitu pelatihan KPMD, pelatihan administrasi dan pelatihan tim pemelihara. Seharusnya dalam 1 (satu) tahun kami mendapatkan 11 (sebelas) pelatihan wajib bagi pelaku PNPM Mandiri di tingkat desa yaitu pelatihan bagi TPK, TPU, KPMD, Tim Pemelihara, Tim Pemantau, Tim Monitoring, KPD, BKAD, Administrasi dan pelatihan Pelaporan. Dan kami akui pula bahwa tingkat kehadiran kami cukup rendah dalam kegiatan pelatihan yang diberikan karena kegiatan pelatihan diadakan pada siang hari dan kebanyakan dari pelaku di Kelurahan Kotawaringin Hilir bekerja

Informasi adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri dari *ordersekuens* dari simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau

kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Informasi adalah jenis acara yang mempengaruhi suatu negara dari sistem dinamis. Hasil Wawancara dengan Ketua TPK Kecamatan Kotawaringin Lama

kemampuan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir dalam memberikan informasi tentang PNPM Mandiri Perdesaan memang saya akui sedikit saja yang mampu memberikan informasi PNPM Mandiri Perdesaan secara benar. Permasalahannya adalah karena sumber daya manusianya kurang memadai.

memang kami akui bahwa untuk tempat/posko pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir masih mengindik pada kantor Kelurahan Kotawaringin Hilir dimana untuk tingkat kelayakan suatu kantor itu belum cukup memadai. Hal ini dikarena tidak ada biaya untuk pembangunan gedung khusus bagi pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, selama ini kami hanya ada dana untuk operasional saja. Untuk kantor UPK Kecamatan Kotawaringin Lama telah ada kantornya. Saat ini saya sedang mengusahakan untuk memberikan ruang yang cukup luas di kantor Kelurahan Kotawaringin Hilir sebagai posko PNPM Mandiri Perdesaan. Saya memilih kantor Kelurahan Kotawaringin Hilir sebagai tempat/posko PNPM Mandiri Perdesaan agar koordinasi dengan pemerintah desa lebih mudah.

pelatihan yang diberikan oleh Fasilitator Kecamatan kurang optimal karena hanya sebagian saja pelaku di desa yang mendapatkannya, padahal seharusnya setiap pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat desa mendapatkan pelatihan.

Penunjang Utama keberhasilan dalam pembangunan adalah adanya sumber daya manusia dan sarana yang memadai bagaimana sarana dan sumberdaya manusia yang ada di Kotawaringin Lama ini di katakan oleh Ketua UPK Kelurahan Kotawaringin Hilir

“Untuk Kecamatan Kotawaringin Lama, Kelurahan Kotawaringin Hilir tergolong desa yang tingkat pendidikannya cukup rendah. Saya melihat para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan dikandidatkan dan dipilih berdasarkan yang ingin berpartisipasi tanpa melihat dari segi pendidikan. Padahal menurut saya segi pendidikan itu sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas yang akan diembannya.

menurut saya, sarana dan prasarana pendukung PNPM Mandiri Perdesaan untuk Kelurahan Kotawaringin Hilir kurang memadai karena saya melihat untuk tempat penyimpanan berkas dan tempat kerja para pelaku di desa terlalu sempit. Yang mendukung adalah letak Kelurahan Kotawaringin Hilir yang cukup dekat dengan Kecamatan Kotawaringin Lama, sangat mudah dan tidak membutuhkan waktu lama jika akan melakukan koordinasi dengan pelaku di Kecamatan Kotawaringin Lama.

pelaksanaan pelatihan dilakukan idealnya dalam 1 (satu) tahun mengadakan 11 (sebelas) pelatihan pokok bagi pelaku di desa, tetapi pada kenyataannya Fasilitator Kecamatan hanya memberakan pelatihan jika dibutuhkan saja. Selain DOK pelatihan kurang, untuk tingkat partisipasi pelaku Kelurahan Kotawaringin Hilir sangat rendah yaitu tercermin pada pelaksanaan pelatihan, pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir hanya sebagian saja yang datang”.

Keluh kesah dalam pelaksanaan PNPM-MD terkait pendidikan para pelakunya

Fasilitator Kecamatan mengatakan

“Kami mengakui bahwa lambatnya dalam penguasaan tentang informasi PNPM mandiri Perdesaan di karenakan sumber daya manusia pelaku di Kelurahan Kotawaringin Hilir belum memadai karena kebanyakan pelaku hanya berpendidikan SMA bahkan ada yang berpendidikan SR atau setara dengan SD. kantor/posko bagi pelaku PNPM Mandiri Perdesaan kurang layak karena idealnya setiap tim memiliki tempat tersendiri dalam penyimpanan berkas dan tempatnya terlalu sempit.

dalam tahun 2011 ini, sampai dengan bulan Agustus baru mengadakan 3 (tiga) kali pelatihan yaitu pelatihan untuk KPMD, pelatihan administrasi dan pelatihan bagi tim pemelihara karena dana untuk pelatihan tahun 2011 tidak mencukupi jika untuk mengadakan 11 (sebelas) pelatihan wajib dalam PNPM Mandiri Perdesaan, maka kami hanya melakukan pelatihan yang dibutuhkan saja”.

Secara keseluruhan untuk tingkat desa sumber daya yang dimiliki kurang memadai

Hasil Wawancara dengan Bapak Samijan selaku PJOK Kecamatan Kotawaringin

Lama mengatakan

“Secara keseluruhan untuk tingkat desa sumber daya yang dimiliki kurang memadai, walaupun lebih banyak pelaku di desa yang berpendidikan lulusan SMA daripada sarjana, tetapi masih ada yang berpendidikan SR atau setara dengan SD yaitu untuk tim pemantau.

saya melihat untuk kelayakan sebuah kantor bagi pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir itu belum layak karena hanya dengan 1 (satu) ruangan saja untuk bekerja 5 (lima) tim pelaku PNPM Mandiri Perdesaan yaitu KPMD, TPK, TPU, Tim Pemeliharaan, dan Tim Pemantau.

Cara peningkatan kinerja para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir yaitu dengan diadakannya pelatihan-pelatihan bagi para pelaku di desa tentang PNPM Mandiri Perdesaan. Biasanya kami lakukan bersama Fasilitator Kecamatan, namun yang hadir hanya sebagian saja dari para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir”

d) Disposisi/sikap pelaksana

Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di kelurahan Kotawaringin Hilir lamban dalam menanggapi perintah dan teguran dari pelaku di Kecamatan. Penentuan usulan kegiatan dari desa berdasarkan prioritas yang di tentukan tidak lewat musyawarah desa. Penerimaan dana BLM tidak tergantung usulan desa. Jumlah RTM masih tetap sama dari tahun (2009-2011) Adanya penunggakan Simpan Pinjam perempuan (SPP) dari masyarakat.

Sebagaimana di katakan oleh Lurah Kotawaringin Hilir dalam wawancara :

Dalam penentuan usulan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, kami melaksanakan Musyawarah Desa terlebih dahulu yaitu Musdes Perencanaan. Dalam Musdes Perencanaan tersebut dihadiri oleh para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir, perwakilan dari tiap-tiap RT, RW serta tokoh masyarakat dan juga dihadiri oleh PjOK dan Fasilitator Kecamatan. Dalam kegiatan ini kami membahas tentang kegiatan apa saja yang akan di usulkan.

Dalam penetapan usulan kegiatan kami berunding dengan kepala desa untuk menentukan usulan kegiatan apa saja yang akan diajukan oleh desa pada MAD di kecamatan. Hal ini kami lakukan karena rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk menghasilkan mufakat. Untuk itu, supaya tidak

menghambat pelaksanaan kegiatan, maka kami berunding dengan kepala Kelurahan untuk menetapkan jenis usulan yang akan diajukan yang nantinya akan di danai oleh BLM PNPM Mandiri Perdesaan.

Dana BLM yang kami terima untuk tahun ini sesuai dengan proposal usulan kegiatan, yaitu dengan 3 (tiga) kegiatan yang terdiri dari pembangunan gedung Posyandu, jalan Telford sikebo dan Simpan Pinjam Perempuan.

Untuk jumlah RTM atau KK miskin yang menjadi sasaran kegiatan PNPM Mandiri ditetapkan berdasarkan kriteria yang telah disepakati dalam MAD. Jumlahnya masih sama karena jika kami mendata ulang dan jumlahnya berbeda dengan tahun yang lalu, masyarakat melakukan protes. Kami dianggap tidak adil dan merata dalam pemetaan kemiskinan.

Kelurahan Kotawaringin Hilir mendapatkan bantuan SPP sebesar Rp. 4.000.000,- untuk 8 (delapan) orang jadi masing-masing orang mendapatkan Rp. 500.000,- yang diangsur selama 12 bulan dengan bunga 2%. Tunggakan SPP yang terjadi di Kelurahan Kotawaringin Hilir dikarenakan masyarakat yang meminjam tidak bisa membayar setoran tiap bulannya. Dari 8 orang peminjam, ada 4 orang yang tidak bisa lancar bersetoran. Kami hanya bisa menagih tanpa bisa memberikan sanksi kepada orang yang tidak bisa menyetor. Kami hanya dapat memberikan teguran dan jika dari kami tidak bisa berhasil menagih, maka kami serahkan kepada pelaku di tingkat kecamatan untuk menaidaklanjuti penunggakan tersebut. Tetapi saya akui untuk pelaku yang bertugas menagih jika ada tunggakan kurang aktif dalam penagihan kepada masyarakat yang tidak tertib dalam penyetoran

Hasil Wawancara dengan Bp. Muafir selaku Ketua TPK Kecamatan Kotawaringin Lama

Saya melihat pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir telah melakukan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan sesuai dengan PTO yang ada yaitu salah satunya dengan pelaksanaan musyawarah desa. Tetapi musyawarah desa tersebut tidak terlaksana dengan baik karena banyak dari masyarakat yang tidak hadir jadi pengusulan kegiatan tidak bejajian secara optimal yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama.

Kami selaku pelaku di desa telah berkoordinasi dengan pelaku di kecamatan bahwa untuk menanggulangi masalah kurangnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musdes yang mengakibatkan terhambatnya kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, maka diputuskan bahwa dalam penetapan usulan kegiatan yang akan diajukan dalam MAD berdasarkan keputusan saya dan TPK.

Selama ini dana BLM yang kami terima telah sesuai dengan usulan yang kami ajukan pada saat MAD, walaupun untuk tahun 2010 kegiatan pengajuan SPP tidak diberikan karena melihat prioritas usulan dari masing- masing desa.

Masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir tidak menginginkan adanya perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu data RTM masih tetap sama. Saya bersama dengan ketua TPK memutuskan untuk meratakan bantuan yang di berikan dan menyamakan jumlah RTM yang menjadi sasaran PNPM Mandiri perdesaan agar tidak terjadi protes karena pada dasarnya bantuan PNPM ini untuk masyarakat miskin.

Tunggakan SPP selama 3 bulan terhitung sampai bulan Agustus baru menyeter Rp. 746.800,- dari total pinjaman sebesar Rp. 4.000.000. penunggakan tersebut dikarenakan kurang aktifnya dan legas pelaku di desa menagih kepada masyarakat yang terlambat menyeter. Sanksi yang di dapat dari ketidaktertiban dalam penyeteroran adalah masyarakat yang terlambat menyeter tidak dapat diprioritaskan untuk dapat mengajukan pinjaman lagi

Pelaksanakan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan sesuai dengan alur kegiatan yang ada di PTO, tetapi untuk mencapai mufakat dalam musyawarah desa membutuhkan waktu yang cukup lama sebagaimana dikatakan oleh Ketua UPK Kelurahan Kotawaringin Hilir

Saya melihat pelaku Kelurahan Kotawaringin Hilir sudah melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan sesuai dengan alur kegiatan yang ada di PTO, tetapi untuk mencapai mufakat dalam musyawarah desa membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga dalam penentuan usulan kegiatan pun membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir tidak selesai sesuai target

Kami selaku pelaku di tingkat kecamatan memberikan kelonggaran bagi pelaku di Kelurahan Kotawaringin Hilir dalam penetapan usulan kegiatan dilakukan oleh TPK dan Kepala Kelurahan Kotawaringin Hilir. Hal ini dilakukan karena untuk mengejar target penyelesaian kegiatan PNPM 'Mandiri yang harus selesai bulan Agustus 2011.

Pembagian dana BLM sudah sesuai dengan usulan dari masing-masing desa dan tertuang dalam Surat Penetapan Camat Nomor : 414.1 / 33 / 2011 tentang

Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2011.

Setiap tahun kami meminta data RTM pada masing-masing desa. Ada desa yang tiap tahunnya mengalami penurunan jumlah RTM bahkan ada pula yang jumlah RTMnya bertambah. Semua itu tergantung pelaku di desa dan masyarakat dalam pemetaan kemiskinan di desanya. Mungkin jumlah RTM yang masih sama di Kelurahan Kotawaringin Hilir dikarenakan dari pihak pelaku sendiri tidak meng-update data RTM atau mungkin dari masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir sendiri yang tidak menginginkan adanya perubahan jumlah RTM yang menerima bantuan PNPM Mandiri Perdesaan.

Sangat dimaklumi jika terjadi penunggakan dalam penyektoran karena yang mengajukan pinjaman adalah masyarakat miskin. Untuk biaya hidup sehari-hari saja sudah susah dan dengan mata pecaharian yang kurang mapan. Tetapi dalam hal ini kembali lagi pada usaha dari pelaku di desa dalam menaggulangi masalah seperti ini. Saya melihat pelaku Kelurahan Kotawaringin Hilir kurang aktif dalam berkoordinasi dengan ketua kelompok SPP. Seharusnya tidak terjadi penunggakan jika pelaku di desa punya kreatifitas dalam penyelesaian masalah seperti ini.

Butuh waktu yang cukup lama dalam usulan, membuat keterlambatannya proses PNPM-MD sebagaimana dikatakan oleh Fasilitator Kecamatan

Kelurahan Kotawaringin Hilir dalam pengajuan usulan kegiatan sudah sesuai dengan PTO yaitu dengan melakukan musdes perencanaan tetapi kendalanya adalah butuh waktu yang cukup lama karena tingkat kehadiran masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir dalam musdes perencanaan cukup rendah sehingga dilakukan imusdes ulang untuk memantapkan jenis usulan kegiatan apa yang akan diajukan dalam MAD.

Dari pada semua kegiatan dalam tahun ini terhambat gara-gara usulan kegiatan dari desa belum ada titik terangnya, maka lebih baik TPK bersama dengan Kepala Desa yang menentukan usulan kegiatan yang akan diajukan pada MAD.

Pembagian dana BLM bagi masing-masing desa di kecamatan Kotawaringin Lama telah sesuai dengan usulan yang diajukan dari masing-masing desa. Kegiatan pembagian dana BLM ini dilaksanakan dalam MAD penetapan Usulan. Setelah didapatkan data pembagian dana BLM untuk masing-masing desa, Camat Kotawaringin mengeluarkan Surat Penetapan Camat Nomor : 414.1 / 33 / 2011 tentang Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2011.

Masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir tidak mau dilakukan pendataan ulang tentang pemetaan RTM, mereka menginginkan data yang sama dengan tahun lalu. Kami selaku pendamping bagi pelaku di desa hanya bisa menghimbau tentang pentingnya pembuatan peta

Kegiatan musyawarah desa yang dilaksanakan oleh pelaku di Kelurahan Kotawaringin Hilir kurang berjalan dengan baik sebagaimana di katakan oleh PJOK Kecamatan Kotawaringin Lama

Kegiatan musyawarah desa yang dilaksanakan oleh pelaku di Kelurahan Kotawaringin Hilir kurang berjalan dengan baik. Kendalanya adalah banyak masyarakat yang tidak hadir dalam musyawarah desa tersebut sehingga perlu dilakukan musyawarah lagi untuk memantapkan usulan kegiatan apa saja yang akan diusulkan.

Atas kebijakan saya kegiatan musyawarah desa yang sedikit dihadiri oleh masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir, maka saya menyarankan agar penentu dalam ipenentuan usulan kegiatan dari desa agar ditangani oleh TPK saja karena jika menunggu untuk mufakat dan sampai melakukan musdes ulang itu sangat lama dan akhirnya akan menghambat pekerjaan bagi pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir.

Penerimaan dana BLM untuk Kelurahan Kotawaringin Hilir sudah sesuai dengan usulan. Alhamdulillah kecamatan Kotawaringin Lama mendapatkan dana sebesar Rp. 3.000.000.000,- yang bisa membiayai semua usulan yang diajukan oleh tiap- tiap desa.

Masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir tidak mau diadakan pendataan ulang tentang RTM karena mereka menganggap data yang sudah hada dari tahun 2009 imerupakan data yang sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan dianggap adil jika membagikan bantuan PNPM Mandiri Perdesaan dengan menggunakan data tersebut.

Tunggakan yang terjadi di Kelurahan Kotawaringin Hilir dikarenakan sikap pelaku di desa yang kurang tegas dalam menanggapi masyarakat yang kurang tertib dalam ipenyetoran SPP. Kami hanya bisa memberikan teguran bagi masyarakat yang belum bisa tertib dalam pelunasan SPP karena tidak ada sanksi yang jelas dan tegas tentang permasalahan tersebut.

e) Struktur Birokasi

Tidak Adanya Standart Operating Prosedurs (SOP) yang mendukung PNPM. Pembagian tupoksi para pelaksana PNPM MP tidak jelas. Kurangnya koordinasi antar pelaksana PNPM Mandiri perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir dan dengan pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan maupun di Kabupaten. Terjadi banyak diskresi dalam pencapaian tujuan PNPM Mandiri Perdesaan.

Ketidak adaan SOP membuat kami agak susah dalam menjalankan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Hasil Wawancara dengan Lurah Kotawaringin Hilir

Ketidak adaan SOP membuat kami agak susah dalam menjalankan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Kami hanya mengetahui hal-hal umumnya saja, untuk detailnya kami merasa masih kurang walaupun sudah diadakan pelatihan.

Saya akui bahwa pelaku di Kelurahan Kotawaringin Hilir tahun 2011 ini banyak yang baru sehingga belum bisa menguasai kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dengan baik. Ketidakadaan SOP membuat kami kurang jelas dalam pembagian tupoksi para pelaku, seperti contohnya untuk tim pemeliharaan kurang bekerja secara optimal dalam implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir. Selain itu juga biasanya setelah musdes serah terima, maka bangunan hasil pekeijaan PNPM Mandiri Perdesaan digunakan tanpa adanya pelestarian. Selain itu juga kurang adanya pemantauan dari masyarakat dan dari pihak kecamatan dalam tahap pelestarian. Dalam hal administrasi, sekretaris TPK dan TPU kurang mampu bekerja sesuai dengan tupoksinya sehingga dalam pembuatan proposal kegiatan tahun 2011 saya yang menghandle

Di lihat dari latar belakang pendidikannya maka memang perlu di bimbing secara berkala dari Fasilitator Kecamatan agar bisa lebih memahami Hasil Wawancara

dengan Ketua TPK Kecamatan Kotawaringin Lama

Sudah ada PTO tetapi memang harus ada penjelasan atau bimbingan langsung bagi para pelaku di desa karena dilihat dari latar belakang pendidikannya maka memang perlu di bimbing secara berkala dari Fasilitator Kecamatan agar bisa lebih memahami.

Menurut saya TPK merupakan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di desa yang bekerja paling dominan dalam rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir. Pelaku yang lain hanya beberapa tahapan Ikegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Apalagi untuk tim pemeliharaan, sangat kurang optimal dalam pelaksanaan tugasnya.

Di butuhkan penjelasan lebih dari Fasilitator Kecamatan Hasil Wawancara dengan Ketua UPK Kelurahan Kotawaringin Hilir

PNPM Mandiri telah ada buku panduannya yaitu berupa PTO beserta penjelasannya. Menurut saya itu sudah cukup jelas tetapi memang .dibutuhkan penjelasan lebih dari Fasilitator Kecamatan yang memang membidangi hal tersebut. Sayangnya pelatihan yang diadakan belum optimal bagi pelaku di desa.

Saya melihat untuk pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir kurang mampu dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksinya karena banyak pelaku yang baru. Pelaku yang lama hanyalah ketua TPK dan Tim Pemantau, sehingga membuat ketua TPK sangat dominan dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan bahkan untuk pembuatan proposal usulan kegiatan ketua TPK ikut membuat padahal itu adalah tugas dari Tim Penulis Usulan.

Masih banyak pelaku di desa yang belum mengetahui PNPM Mandiri Perdesaan Hasil Wawancara dengan Fasilitator Kecamatan

Sebenarnya sudah ada SOP untuk UPK dan TPK, tetapi masih dalam bentuk draf dan belum ditetapkan sehingga belum bisa dilakukan dengan baik. Selain itu juga masih banyak pelaku di desa yang belum mengetahui PNPM Mandiri Perdesaan. Pelatihan yang kami lakukan memang belum optimal karena keterbatasan dana DOK Pelatihan serta dari pihak pelaku di tingkat desa sendiri tingkat kehadiran dalam pelatihan sangat rendah. Sehingga kami hanya melakukan pelatihan yang dibutuhkan dan yang pokok-pokok saja.

Di Kelurahan Kotawaringin Hilir belum ada pembagian tugas yang merata terlihat dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, TPK adalah pelaku yang paling dominan dalam bekerja sedangkan tim yang lain kurang mampu memahami tupoksi masing-masing yang sudah tercantum dalam PTO.

Berpatokan pada PTO dan penjeiasan kurang maksimal Hasil Wawancara dengan PJOK Kecamatan Kotawaringin Lama

Di kecamatan Kotawaringin Lama tidak ada Standar Operating Prosedur (SOP) yang mendukung PNPM Mandiri Perdesaan. Kami hanya berpatokan pada PTO dan penjeiasannya. Saya merasa memang kurang jika hanya PTO saja karena pelaku di desa terkadang malas untuk membaca PTO tersebut.

Menurut saya pembagian tanggung jawab para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir masih kurang optimal karena saya melihat bahwa yang sibuk dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir hanya TPK saja, tim yang lain tidak sesibuk TPK. Memang sudah ada pembagian tugasnya masing-masing tetapi menurut saya kurang adanya koordinasi antar para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dari data yang telah dipaparkan bab terdahulu dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan maupun PNPM Mandiri Perdesaan Intergrasi di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini tidak terlepas dari peran aktif seluruh pelaku PNPM dari tingkat Desa hingga tingkat Kabupaten.

Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan maupun PNPM Mandiri Perdesaan Intergrasi di Kabupaten Kotawaringin Barat yang dimulai sejak tahun 2003 hingga 2011 membawa manfaat positif bagi masyarakat. Hal ini terbukti dengan telah terbangunnya banyak sarana prasarana atau fasilitas sosial masyarakat perdesaan, antara lain sarpras/infrastruktur perdesaan, sarpras/fasilitas pendukung pendidikan, sarpras/fasilitas pendukung kesehatan. Di samping itu juga telah terbentuk banyak kelompok SPP dengan berbagai jenis unit usaha yang mempunyai aset yang terus meningkat.

Selain itu, manfaat yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat adalah adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam masyarakat dan pemerintahan desa dalam proses pelebagaan di masyarakat dan pemerintahan desa dalam proses pelebagaan sistem pembangunan partisipatif masyarakat. Hal ini ditandai dengan tingginya kesadaran dan partisipasi nsur

kelembagaan di masyarakat dan pemerintahan desa dalam usaha meningkatkan kemampuan serta kapasitasnya untuk memfasilitasi proses pembangunan partisipatif masyarakat melalui pelatihan, pembekalan, studi banding serta rapat-rapat yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan

Di Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dikatakan kurang berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari kurangnya partisipasi masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, Perguliran dana / SPP tidak dikelola dengan baik sehingga terjadi adanya tunggakan SPP terlihat sampai dengan bulan Agustus baru mengembalikan sebesar Rp. 10.000.000,- dari dana BLM Rp. 4.000.000,- yang dicairkan bulan juni untuk 8 (delapan) orang peminjam, serta kerjasama antar desa kurang berjalan dengan baik dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat adalah

- 1) komunikasi, dimana masih banyak pelaku Di Kelurahan Kotawaringin Hilir yang belum memahami tentang PNPM Mandiri Perdesaan.
- 2) sumber daya, sumber daya di Kelurahan Kotawaringin Hilir kurang mendukung baik dari sumber daya manusianya maupun sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan..
- 3) disposisi/sikap pelaksana, sikap pelaksana di Kelurahan Kotawaringin Hilir kurang mendukung dalam menanggapi PNPM mandiri Perdesaan karena pelaku di kelurahan kurang tegas terhadap masyarakat yang tidak tertib dalam penyetoran SPP sehingga masih terjadi penunggakan, Selain itu juga pelaku kurang cekatan dalam merespon teguran dari pelaku di Kecamatan tentang keterlambatan pelaporan.
- 4) struktur birokrasi, tidak adanya SOP yang mendukung implementasi PNPM Mandiri Perdesaan membuat ketidakjelasan pembagian tupoksi dari masing-masing pelaku di kelurahan, adanya diskresi dalam pencapaian tujuan PNPM Mandiri perdesaan dan kurangnya koordinasi yang dilakukan antar pelaku di kelurahan dan antara pelaku di kecamatan.

Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dalam implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir. Namun dari keempat factor yang mempengaruhi, faktor sumber daya dan disposisi yang mempunyai pengaruh yang kuat dalam implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir karena dalam pelaksanaan suatu program dibutuhkan Implementor yang bisa

menjalankan program dengan baik, salah satunya yaitu dengan dibekalinya sumber daya yang memadai. Selain itu disposisi/sikap pelaksana juga mempunyai peran yang cukup besar dalam kelancaran kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir, Program akan berjalan dengan baik jika sikap pelaksana mendukung akan adanya PNPM Mandiri Perdesaan.

Saran

1. Begitu banyak manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat, diharapkan Program PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perdesaan Intergrasi untuk terus dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.
2. Dalam rangka meningkatkan efektifitas serta kelancaran dalam pelaksanaan program, maka koordinasi antar pelaku dari tingkat desa hingga tingkat nasional yang dilaksanakan secara berjenjang harus lebih ditingkatkan.
3. Dengan makin meningkatnya cakupan kegiatan, besaran dana serta kompleksitas permasalahan yang dihadapi, maka wawasan, pengetahuan dan keahlian para pelaku harus lebih ditingkatkan melalui berbagai kegiatan pelatihan, pembekalan, studi banding, seminar, lokakarya dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Publik (Edisi Revisi VI)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Creswell, John W., 2009. *Research Design (Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches)*. Third Edition. California, USA:SAGE
- Dunn, William. N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT. Hanindita Graya Widya.
- Halim, Abdul (Peny).2011. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Islamy, M. Irfan. 2004. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartasmita, Ginanjar.1996. *Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. Bandung. ITB.
- Lincoln, Yvonna S. dan Guba, Egon G. 1985. *Naturalistic Inquiry*. First Edition. California, USA:SAGE
- Moleong, Lexy. J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi III. Yogyakarta:Rake Sarasin.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra dan Maulidah Rahmawati. 2008. *Akuntansi Pemerintah*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Prawoto, Agus. 2011. *Pengantar Keuangan Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Soehartono, Irawan. 2004. *Metode Penelitian Sosial (Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, Bandung: FOKUSMEDIA.

Subarsono, A.G. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2007. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Sumaryadi, I. Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.

Supriatna, Tjahja. 1997. *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: Alqa print.

Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2001. *Good Governance*. Surabaya: Insan Cendekia.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.

-----, 2001, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi Kedua,, Bumi Aksara, Jakarta.

Yousa, Amri. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: Laboratorium Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Administrasi Negara Fisip UNPAD.

Jurnal dan Makalah

Tat-Kei Ho, Alferd. 2011. *PBB in American Local Government: It's More Than a management Tool*. Washington, DC, USA: Public Administration Review.

Booth, Philip, 2009. *Planing and the Cultural of Governance: Local Intitutions and Reform*. In France. *Europen Planning Stucies* Vol 17, No. 5 May, 2009. UK: Roudlge, Taylor&Francis Group.

Boyne, George A., Oliver James, Peter dan Nicolai Petrovsky. 2010. Does Public Service Performance Affect Top Management Turnover? UK:Journal of Public Administration Research an Theory.

Internet

eprints.undip.ac.id/23734/1/ZAKI_MUBARAK.pdf

repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22280/7/Cover.pdf

repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35024/7/Cover.pdf

Undang-undang dan Dokumen:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No:25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Keputusan Bupati Barat Nomor : 414.1/018/2011 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Tingkat Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Barat tahun 2011 5_rat Penetapan Camat Nomor 414.1 / 33 / 2011 tentang Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kotawaringin Tahun 2011.

Keputusan Bupati Kotawaringin Barat nomor 28 tahun 2011 tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Badan Pengawas Unit Pengelola Keuangan (BPUPK), Tim Verifikasi Perguliran, Tim Penyehatan Pinjaman, Tim Pelatih Masyarakat dan Tim Pelaksana Pelatihan Masyarakat Kecamatan Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

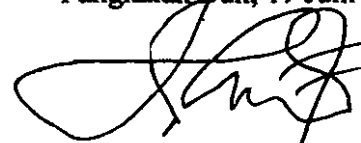
Keputusan Camat Kotawaringin Lama Nomor : 414.2/03/PMD tentang Penunjukan Tim Verifikasi (TV) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun Anggaran 2011.

Berita Acara Musyawarah Desa Pertanggung Jawaban Tahap I PNPM Intergrasi Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2011.

BIODATA PENULIS

Nama : H. GUSTI BURHANI, S.IP.
NIM : 018264264
Tempat Tanggal Lahir : Kotawaringin Barat, 4 Juni 1966
Registrasi Pertama : 2011.1
Riwayat Pendidikan : 1. SD Negeri Kotawaringin Lama, tamat tahun 1981
2. SMP Negeri 1 Arut Selatan, tamat tahun 1984
3. SPG Negeri 1 Palangkaraya, tamat tahun 1987
4. D-2 PGSD Universitas Terbuka, tamat tahun 2001
5. S-1 FSIP Universitas Terbuka, tamat tahun 2010
6. Terdaftar di Pascasarjana Universitas Terbuka,
tahun 2011.1
Riwayat Pekerjaan : 1. Guru SD, tahun 1987-2003
2. Lurah Kelurahan Kotawaringin Hilir, tahun 2003-2008
3. Kasi Pemerintahan Kecamatan Kotawaringin Lama,
tahun 2008 - sekarang
Alamat Tetap : Jl.Pangkalan Muntai RT 05 KelurahanKotawaringinHilir,
Kecamatan Kotawaringin Lama
Telp/HP : 081348894597

Pangkalan Bun, 17 Juni 2013

**H. Gusti Burhani, S.IP**

NIM. 018264264



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jln. Jend. Sudirman No. 18 Telepon (0632) 21196 Fax : 21604
PANGKALAN BUN 74111

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 300 / 10 / Kesbang.III / 2013

Dasar : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Palangka Raya, Universitas Terbuka, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 515/UN31.45/LL/2013 Tanggal, 08 April 2013.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penelitian / Pendataan bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah.

Dengan ini diberikan kepada :

Nama : **H. GUSTI BURHANI**
NIM : 018264264
Kegiatan Penelitian : Penelitian untuk Tugas Akhir Program Magister, Program Pascasarjana
Yang akan dilaksanakan : Universitas Terbuka, Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Palangkaraya
Jenjang : S - 2

Akan menyusun Tesis yang berjudul :

" **IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN DI KELURAHAN KOTAWARINGIN HILIR KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT** "

Lama kegiatan : 3 (Tiga) Bulan, Dari Tanggal 18 April 2013 s/d 18 Juli 2013.

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian / Observasi yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat dengan menunjukan surat ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak berkaitan dengan judul penelitian.
3. Agar mentaati ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan menghormati adat istiadat setempat.
4. Surat izin ini hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah, sewaktu - waktu dapat dibatalkan bila disalahgunakan.
5. Selesai melakukan penelitian harus menyampaikan laporan hasilnya kepada :
Bupati Kotawaringin Barat.
Cq. Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kab. Kotawaringin Barat.
6. Surat izin berlaku sejak dikeluarkan.

Demikian surat izin ini diberikan dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Pangkalan Bun, 18 April 2013
KEPALA BADAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
BADAN
KESBANG POLITIK
DAN LINMAS
H. MUDELAN, S. Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19600215 198203 1 013

Hasil Wawancara

No	Responden	Tanggal	Fenomena	Jawaban
1.	Bp.Musyawir(Ketua TPK)	15-3-2013	1. Implementasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir tahun 2011 berjalan kurang baik. Kami telah mentaati Pedoman Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan yaitu dengan tersedianya map 1-7 yang berisi ketentuan administrasi sesuai dengan PTO PNPM mandiri Perdesaan walaupun kami akui bahwa kami butuh waktu cukup lama dalam pengisiannya karena keterbatasan pengetahuan kami tentang PNPM Mandiri dan banyak pelaku yang baru serta untuk koordinasi dalam hal pelaporan cukup lama. 2. Kami telah melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan sesuai dengan alur kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang ada di PTO, walaupun terkadang kami kesulitan dalam pengumpulan masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir untuk bermusyawarah tentang PNPM Mandiri Perdesaan. Hal ini dikarenakan KPMD kurang membaaur dengan masyarakat sehingga kami sedikit kesulitan dalam penggalian gagasan masyarakat 3. Kami akui untuk pelaporan hasil kegiatan kepada UPK sering terlambat karena keterbatasan kami tentang pemahaman PNPM Mandiri Perdesaan dikarenakan banyak pelaku yang baru sehingga mengakibatkan keterlambatan pencairan dana BLM karena syarat untuk mecairkan dana BLM adalah dengan memberikan laporan hasil kegiatan pencairan dana BLM tahap sebelumnya. 4. Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2011 di Kelurahan Kotawaringin Hilir sudah tepat sasaran karena usulan kegiatan yang diajukan merupakan hasil dari gagasan- gagasan dari msyarakat.
			2. Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selama ini kami belum bisa melaksanakan koordinasi dengan baik. Hal ini dikarenakan kami mempunyai kesibukan masing-masing dan tahun ini pelakunya banyak yang baru. Selain itu saya menilai pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir tahun 2011 kurang aktif dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan seperti contohnya KPMD kurang membaaur dengan masyarakat sehingga dalam penggalian usulan dari tiap dusun membutuhkan waktu yang cukup lama. Saya juga melihat bahwa pelaku di Kelurahan Kotawaringin Hilir kurang aktif bertanya dan melalaikan koordinasi dengan UPK dan Fasilitator Kecamatan. Saya hanya bisa memberikan teguran bagi KPMD untuk lebih aktif melakukan pertemuan di tingkat dusun agar penggalian gagasan dari masyarakat bisa didapatkan dan segera dirancang untuk dijadikan sebagai sebuah usulan kegiatan yang nantinya akan di danai oleh PNPM Mandiri Perdesaan. 2. Kami kurang memahami PNPM Mandiri karena rata-rata pelaku di Kelurahan Kotawaringin Hilir adalah pelaku baru sehingga diperlukan pendampingan dari Fasilitator Kecamatan.

				<p>Selama ini kami mendapatkan informasi tentang PNPM Mandiri Perdesaan dari sosialisasi pada saat MAD sosialisasi dan pelatihan yang diberikan oleh fasilitator tetapi pelaksanaan pelatihan sangat jarang.</p> <p>3. saat ini kami jika ada perintah dan teguran dari pelaku di kecamatan selalu kami tindaklanjuti dengan baik namun memang diakui oleh kami bahwa masih belum optimal karena adanya beberapa hambatan. Salah satunya adalah dalam hal pelaporan, kami akui memang sering terlambat memberikan laporan hasil kegiatan karena pelaku PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2011 banyak yang baru sehingga pemahannya masih kurang dan menyebabkan tidak sesuai target waktu dalam pelaksanaan kegiatan dan menghambat pencairan dana selanjutnya.</p> <p>4. kami telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir tentang PNPM Mandiri Perdesaan dalam musdes sosialisasi, tetapi tingkat kehadiran masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir cukup rendah karena mayoritas masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir bekerja sebagai buruh pabrik sehingga agak sulit dalam mengumpulkan masyarakat.</p>
			3. Sumber daya	<p>1. tidak semua pelaku di desa mampu menyampaikan informasi tentang PNPM Mandiri Perdesaan dengan baik, seperti contohnya KPMD kurang mampu menggali gagasan-gagasan dari masyarakat karena KPMD tahun 2011 ini kurang aktif dan membaur dengan masyarakat, selain itu tingkat pendidikan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir cukup rendah sehingga dalam pelaksanaan administrasi PNPM Mandiri kurang baik.</p> <p>2. Hal ini yang masih menjadi kendala bagi kami selaku pelaku di desa. Kami belum memiliki gedung khusus untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Kami masih menginduk pada kantor Kelurahan Kotawaringin Hilir yang hanya satu ruangan saja. Itupun kami tempati untuk semua pelaku PNPM di desa. Harapan kami kepada kepala kelurahan agar kami diberikan tempat yang layak untuk membantu kelancaran proses pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Selama ini dokumen-dokumen sering tercampur antara pelaku dalam kegiatan perencanaan, pelaku kegiatan pelaksanaan dan pelaku pemeliharaan. Harapan yang kami inginkan tiap pelaku dari masing-masing kegiatan memiliki ruangan masing-masing walaupun masih menginduk pada kantor Kelurahan.</p> <p>3. kami baru menerima pelatihan 3 (tiga) kali dalam tahun 2011 ini yaitu pelatihan KPMD, pelatihan administrasi dan pelatihan tim pemelihara. Seharusnya dalam 1 (satu) tahun kami mendapatkan 11 (sebelas) pelatihan wajib bagi pelaku PNPM Mandiri di tingkat desa yaitu pelatihan bagi TPK, TPU, KPMD, Tim Pemelihara, Tim Pemantau, Tim Monitoring, KPD, BKAD, Administrasi dan pelatihan Pelaporan. Dan kami akui para bahwa tingkat kehadiran kami cukup rendah dalam kegiatan pelatihan yang diberikan karena kegiatan pelatihan diadakan pada siang hari dan kebanyakan dari pelaku di Kelurahan Kotawaringin Hilir bekerja</p>

			sebagai pedagang.
		4. Disposisi/sikap pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. dalam penentuan usulan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, kami melaksanakan Musyawarah Desa terlebih dahulu yaitu Musdes Perencanaan. Dalam Musdes Perencanaan tersebut dihadiri oleh para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir, perwakilan dari tiap-tiap RT, RW serta tokoh masyarakat dan juga dihadiri oleh PjOK dan Fasilitator Kecamatan. Dalam kegiatan ini kami membahas tentang kegiatan apa saja yang akan di usulkan. 2. dalam penetapan usulan kegiatan kami berunding dengan kepala desa untuk menentukan usulan kegiatan apa saja yang akan diajukan oleh desa pada MAD di kecamatan. Hal ini kami lakukan karena rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk menghasilkan mufakat. Untuk itu, supaya tidak menghambat pelaksanaan kegiatan, maka kami berunding dengan kepala Kelurahan untuk menetapkan jenis usulan yang akan diajukan yang nantinya akan di danai oleh BLM PNPM Mandiri Perdesaan. 3. dana BLM yang kami terima untuk tahun ini sesuai dengan proposal usulan kegiatan, yaitu dengan 3 (tiga) kegiatan yang terdiri dari pembangunan gedung Posyandu, jalan Telford sikebo dan Simpan Pinjam Perempuan. 4. untuk jumlah RTM atau KK miskin yang menjadi sasaran kegiatan PNPM Mandiri ditetapkan berdasarkan kriteria yang telah disepakati dalam MAD. Jumlahnya masih sama karena jika kami mendata ulang dan jumlahnya berbeda dengan tahun yang lalu, masyarakat melakukan protes. Kami dianggap tidak adil dan merata dalam pemetaan kemiskinan. 5. Kelurahan Kotawaringin Hilir mendapatkan bantuan SPP sebesar Rp. 4.000.000,- untuk 8 (delapan) orang jadi masing-masing orang mendapatkan Rp. 500.000,- yang diangsur selama 12 bulan dengan bunga 2%. Tunggakan SPP yang terjadi di Kelurahan Kotawaringin Hilir dikarenakan masyarakat yang meminjam tidak bisa membayar setoran tiap bulannya. Dari 8 orang peminjam, ada 4 orang yang tidak bisa lancar bersetoran. Kami hanya bisa menagih tanpa bisa memberikan sanksi kepada orang yang tidak bisa menyetor. Kami hanya dapat memberikan teguran dan jika dari kami tidak bisa berhasil menagih, maka kami serahkan kepada pelaku di tingkat kecamatan untuk menindaklanjuti penunggakan tersebut. Tetapi saya akui untuk pelaku yang bertuga menagih jika ada tunggakan kurang aktif dalam penagihan kepada masyarakat yang tidak tertib dalam penyetoran
		5. Struktur birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidakadaan SOP membuat kami agak susah dalam menjalankan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Kami hanya mengetahui hal-hal umumnya saja, untuk detailnya kami merasa masih kurang walaupun sudah diadakan pelatihan. 2. saya akui bahwa pelaku di Kelurahan Kotawaringin Hilir tahun 2011 ini banyak yang baru sehingga belum bisa menguasai kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dengan baik.

				<p>Ketidakadaan SOP membuat kami kurang jelas dalam pembagian itupoksi para pelaku, seperti contohnya untuk tim pemeliharaan kurang bekerja secara optimal dalam implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir. Selain itu juga biasanya setelah musdes serah terima, maka bangunan hasil pekejaan PNPM Mandiri Perdesaan digunakan tanpa adanya pelestarian. Selain itu juga kurang adanya pemantauan dari masyarakat dan dari pihak kecamatan dalam tahap pelestarian. Dalam hal administrasi, sekretaris TPK dan TPU kurang mampu bekerja sesuai dengan tupoksinya sehingga dalam pembuatan proposal kegiatan tahun 2011 saya yang menghandle</p>
2.	Bp. Musyar (Lurah)	15-3-2013	1. Implementasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya melihat untuk Kelurahan Kotawaringin Hilir sudah menjalankan administrasi dengan cukup baik walaupun dalam pengerjaannya membutuhkan waktu yang cukup, lama karena banyak pelaku yang baru. 2. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir sudah cukup sesuai dengan PTO yang ada. Pelaku di desa dipilih langsung oleh masyarakat dalam Mudex Sosialisasi walaupun tingkat kehadiran masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir cukup rendah karena mayoritas penduduk Kelurahan Kotawaringin Hilir bekerja sebagai buruh pabrik. Kemudian untuk pengajuan usulan kegiatan sudah berdasarkan gagasan dari masyarakat namun membutuhkan waktu cukup lama dalam penetapan gagasan dari masyarakat. 3. Tahun ini Kelurahan Kotawaringin Hilir mengalami keterlambatan pencairan dana BLM dikarenakan keterlambatan pelaporan hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Keterlambatan ini karena banyak pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di desa Kotawaringin yang baru yang belum begitu memahami PNPM Mandiri Perdesaan. 4. kegiatan PNPM Mandiri tahun 2011 dapat dikatakan cukup tepat sasaran karena usulan yang diajukan dalam MAD merupakan hasil dari agagsan dari masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir. Pengambilan gagasan dilakukan oleh KPMD melalui pertemuan di dusun
			2. Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi yang dilakukan oleh pelaku di Kelurahan Kotawaringin Hilir kurang baik, baik dari TPK, KPMD, dan TPU. Hal ini dikarenakan masing-masing pelaku memiliki kesibukan. Mayoritas pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir adalah pedagang sehingga untuk melakukan koordinasi di siang hari cukup sulit. 2. Masih perlu dioptimalkan, walaupun PjOK dan Fasilitator Kecamatan sudah melakukan sosialisai dan koordinasi kepada pelaksana di desa akan tetapi intensitasnya sangat jarang. Kami merasa sangat kurang jelas jika kami Ihanya berpedoman pada PTO dan penjelsannya saja karena PTO masih hal- ihal umum saja untuk detailnya kami kurang memahami. 3. Menurut saya pelaku di Kelurahan Kotawaringin Hilir kurang konsisten dengan perintah atau teguran dari pelaku di tingkat kecamatan. Terlihat dalam teguran untuk keterlambatan pelaporan bagi pelaku di Kelurahan Kotawaringin Hilir tidak ditindak lanjuti dengan baik

			<p>4. saya selaku kepala Kelurahan telah menghimbau kepada masyarakat untuk ikut beipartisipasi dalam kegiatan PNPB Mandiri Perdesaan tetapi pada kenyataannya memang sulit untuk mengumpulkan masyarakat karena mayoritas masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir bekeija sebagai buruh pabrik dan pedagang. Jika siang hari mereka bekeija hingga sore, malamnya mungkin capek sehingga jika pelaksanaan Musdes pada siang hari banyak yang tidak hadir.</p>
		3. Sumber daya	<p>1. kemampuan pelaku PNPB Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir dalam memberikan informasi tentang PNPB Mandiri Perdesaan memang saya akui sedikit saja yang mampu memberikan informasi PNPB Mandiri Perdesaan secara benar. Permasalahannya adalah karena sumber daya manusianya kurang memadai.</p> <p>2. memang kanti akui bahwa untuk tempat/posko pelaksanaan PNPB Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir masih menginduk pada kantor Kelurahan Kotawaringin Hilir dimana untuk tingkat kelayakan suatu kantor itu belum cukup memadai. Hal ini dikarena tidak ada biaya untuk pembangunan gedung khusus bagi pelaku PNPB Mandiri Perdesaan, selama ini kami hanya ada dana untuk operasional saja. Untuk kantor UPK saja kecamatan Kotawaringin Lama menyewa gedung serbaguna TK Nusa Indah Kotawaringin. Saat ini saya sedang mengutamakan untuk memberikan ruang yang cukup luas di kantor Kelurahan Kotawaringin Hilir sebagai posko PNPB Mandiri Perdesaan. Saya memilih kantor Kelurahan Kotawaringin Hilir sebagai tempat/posko PNPB Mandiri Perdesaan agar koordinasi dengan pemerintah desa lebih mudah.</p> <p>3. pelatnan yang diberikan oleh Fasilitator Kecamatan kurang optimal karena hanya sebagian saja pelaku di desa yang mendapatkannya, padahal seharusnya setiap pelaku PNPB Mandiri Perdesaan di tingkat desa mendapatkan pelatihan.</p>
		4. Disposisi/sikap pelaksana	<p>1. saya melihat pelaku PNPB Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir telah melakukan kegiatan PNPB Mandiri Perdesaan sesuai dengan PTO yang ada yaitu salah satunya dengan pelaksanaan musyawarah desa. Tetapi musyawarah desa tersebut tidak terlaksana dengan baik karena banyak dari masyarakat yang tidak hadir jadi pengusulan kegiatan tidak beijaian secara optimal yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama.</p> <p>2. kami selaku pelaku di desa telah berkoordinasi dengan pelaku di kecamatan bahwa untuk menanggulangi masalah kurangnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musdes yang mengakibatkan terhambatnya kegiatan PNPB Mandiri Perdesaan, maka diputuskan bahwa dalam penetapan usulan kegiatan yang akan diajukan dalam MAD berdasarkan keputusan saya dan TPK.</p> <p>3. Selama ini dana BLM yang kami terima telah sesuai dengan usulan yang kami ajukan pada saat MAD, walaupun untuk tahun 2010 kegiatan pengajuan SPP tidak diberikan karena melihat prioritas usulan dari masing- masing desa.</p>

				<ol style="list-style-type: none"> 4. masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir tidak menginginkan adanya perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu data RTM masih tetap sama. Saya bersama dengan ketua TPK memutuskan untuk meratakan bantuan yang di berikan dan menyamakan jumlah RTM yang menjadi sasaran PNPB Mandiri perdesaan agar tidak terjadi protes karena pada dasarnya bantuan PNPB ini untuk masyarakat miskin. 5. tunggakan SPP selama 3 bulan terhitung sampai bulan Agustus baru menyeter Rp. 746.800,- dari total pinjaman sebesar Rp. 4.000.000. penunggakan tersebut dikarenakan kurang aktifnya dan tegas pelaku di desa menagih kepada masyarakat yang terlambat menyeter. Sanksi yang di dapat dari ketidaktertiban dalam penyeteroran adalah masyarakat yang terlambat menyeter tidak dapat diprioritaskan untuk dapat mengajukan pinjaman lagi
			5. Struktur birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. sudah ada PTO tetapi memang harus ada penjelasan atau bimbingan langsung bagi para pelaku di desa karena dilihat dari latar belakang pendidikannya maka memang perlu di bimbing secara berkala dari fasilitator Kecamatan agar bisa lebih memahami. 2. menurut saya TPK merupakan pelaku PNPB Mandiri Perdesaan di desa yang bekerja paling dominan dalam rangkaian kegiatan PNPB Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir. Pelaku yang lain hanya pada beberapa tahapan I kegiatan PNPB Mandiri Perdesaan. Apalagi untuk tim pemeliharaan, sangat kurang optimal dalam pelaksanaan tugasnya.
3.	Ibu. Iis Purwati (Ketua UPK)	18-3-2013	1. Implementasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Kelurahan Kotawaringin Hilir saya rasa administrasinya kurang baik karena dalam pelaporannya sering telat. Selain itu map 1-7 masih banyak yang belum di isi. Hal ini mungkin karena sumber daya manusia pelaksana di Kelurahan Kotawaringin Hilir kurang memadai serta adanya pergantian pelaku PNPB Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir. Yang sedikit memprihatinkan, untuk administrasi Kelurahan Kotawaringin Hilir sangat kurang dalam hal pelaporan. Sehingga menghambat proses pencairan dana tahap selanjutnya yang seharusnya bulan Agustus telah memberikan LPJ akhir kegiatan tetapi karena keterlambatan dari pelaku di desa, maka Kelurahan Kotawaringin Hilir belum mencairkan dana BLM tahap III. 2. Kelurahan Kotawaringin Hilir telah melaksanakan PNPB Mandiri Perdesaan sesuai dengan alur kegiatan yang tercantum dalam PTO, namun saat saya menghadiri Musdes di Kelurahan Kotawaringin Hilir tingkat kehadiran dari masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir rendah. Sangat sulit sekali untuk mengumpulkan masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir karena selain banyak yang bekerja sebagai buruh, masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir juga kurang tertarik untuk berpartisipasi dalam kegiatan PNPB Mandiri Perdesaan sehingga butuh waktu lama untuk mendapatkan gagasan dari masyarakat yang nantinya akan menjadi suatu usulan kegiatan yang akan di danai oleh PNPB Mandiri Perdesaan. 3. Menurut saya administrasi dan pelaporan hasil kegiatan Kelurahan Kotawaringin Hilir 4. Kurang baik karena masih banyak map yang belum diisi dan keterlambatan pelaporan hasil

				kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Keterlambatan tersebut dikarenakan adanya pergantian pelaku PNPM Mandiri Perdesaan. Karena banyak pelaku yang baru maka masih ada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan yang belum mengetahui dan paham tentang PNPM Mandiri Perdesaan.
			2. Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi yang dilakukan dengan kami selaku pelaku di kecamatan sangat kurang karena pelaku di desa kurang aktif sehingga pelaporan hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir sering terlambat dan terjadi revisi laporan kegiatan. 2. Kami selaku pelaku di kecamatan Kotawaringin Lama telah memberikan sosialisasi sesuai dengan TPO yaitu pada saat MAD sosialisasi serta adanya pelatihan dari Fasilitator Kecamatan bagi pelaku di Kelurahan Kotawaringin Hilir. Namun kami akui bahwa pelatihan yang diberikan belum optimal karena DOK pelatihan PNPM Mandiri kurang mencukupi yaitu sebesar Rp. 45.000.000,- dari dana BLM Rp. 3.000.000.000,- untuk pelatihan wajib bagi pelaku di desa 3. pelaku di Kelurahan Kotawaringin Hilir kurang baik dalam menindaklanjuti perintah dan iteguran dari pelaku di kecamatan karena pelaksanaannya agak lambat Jadi sering terjadi keterlambatan pelaporan hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Yang seharusnya bulan Agustus ini sudah menyelesaikan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2011, tetapi untuk Kelurahan Kotawaringin Hilir belum menyelesaikannya bahkan belum mencairkan dana BLM tahap III. Kami hanya bisa memberikan sanksi lokal saja yang berupa teguran bagi pelaku di desa 4. saya melihat tingkat kehadiran masyarakat Kotawaringin dalam kegiatan Musyawarah Desa yang dilakukan oleh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir sangat kurang. Saat saya di undang dalam Musdes, saya melihat hanya setengahnya saja yang hadir dari jumlah undangan yang diberikan kepada masyarakat.
			3. Sumber daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. untuk kecamatan Kotawaringin Lama, Kelurahan Kotawaringin Hilir tergolong desa yang tingkat pendidikannya cukup rendah. Saya melihat para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan dikandidatkan dan dipilih berdasarkan yang ingin berpartisipasi tanpa melihat dari segi pendidikan. Padahal menurut saya segi pendidikan itu sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas yang akan diembannya. 2. menurut saya, sarana dan prasarana pendukung PNPM Mandiri Perdesaan untuk Kelurahan Kotawaringin Hilir kurang memadai karena saya melihat untuk tempat penyimpanan berkas dan tempat kerja para pelaku di desa terlalu sempit. Yang mendukung adalah letak Kelurahan Kotawaringin Hilir yang cukup dekat dengan kecamatan Kotawaringin Lama, sangat mudah dan tidak membutuhkan waktu lama jika akan melakukan koordinasi dengan pelaku di kecamatan Kotawaringin. 3. pelaksanaan pelatihan dilakukan idealnya dalam 1 (satu) tahun mengadakan 11 (sebelas)

				<p>pelatihan pokok bagi pelaku di desa, tetapi pada kenyataannya Fasilitator Kecamatan hanya memberakan pelatihan jika dibutuhkan saja. Selain DOK pelatihan kurang, untuk tingkat partisipasi pelaku Kelurahan Kotawaringin Hilir sangat rendah yaitu tercermin pada pelaksanaan pelatihan, pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir hanya sebagian saja yang datang.</p>
			4. Disposisi/sikap pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. saya melihat pelaku Kelurahan Kotawaringin Hilir sudah melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan sesuai dengan alur kegiatan yang ada di PTO, tetapi iuntuk mencapai mufakat dalam musyawarah desa membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga dalam penentuan usulan kegiatan pun membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir tidak selesai sesuai target 2. kami selaku pelaku di tingkat kecamatan memberikan kelonggaran bagi pelaku di Kelurahan Kotawaringin Hilir dalam penetapan usulan kegiatan dilakukan oleh TPK dan Kepala Kelurahan Kotawaringin Hilir. Hal ini dilakukan karena untuk mengejar target penyelesaian kegiatan PNPM Mandiri yang harus selesai bulan Agustus 2011. 3. pembagian dana BLM sudah sesuai dengan usulan dari masing-masing desa dan tertuang dalam Surat Penetapan Camat Nomor : 414.1 / 33 / 2011 tentang Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2011. 4. setiap tahun kami meminta data RTM pada masing-masing desa. Ada desa yang tiap tahunnya mengalami penurunan jumlah RTM bahkan ada pula yang jumlah RTMnya bertambah. Semua itu tergantung pelaku di desa dan masyarakat dalam pemetaan kemiskinan di desanya. Mungkin jumlah RTM yang masih sama di Kelurahan Kotawaringin Hilir dikarenakan dari pihak pelaku sendiri tidak meng-update data RTM atau mungkin dari masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir sendiri yang tidak menginginkan adanya perubahan jumlah RTM yang menerima bantuan PNPM Mandiri Perdesaan. 5. sangat dimaklumi jika terjadi penunggakan dalam penyetoran karena yang mengajukan pinjaman adalah masyarakat miskin. Untuk biaya hidup sehari-hari saja sudah susah dan dengan mata pecaharian yang kurang mapan. Tetapi dalam hal ini kembali lagi pada usaha dari pelaku di desa dalam menaggulangi masalah seperti ini. Saya mdlihat pelaku Kelurahan Kotawaringin Hilir kurang aktif dalam berkoordinasi dengan ketua kelompok SPP. Seharusnya itidak terjadi penunggakan jika pelaku di desa punya kreatifitas dalam penyelesaian masalah seperti ini.
			5. Struktur birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PNPM Mandiri telah ada buku panduannya yaitu berupa PTO beserta penjelasannya. Menurut saya itu sudah cukup jelas tetapi memang dibutuhkan penjelasan lebih dari Fasilitator Kecamatan yang memang membidangi hal tersebut. Sayangnya pelatihan yang diadakan belum optimal bagi pelaku di desa. 2. saya melihat untuk pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir kurang

				mampu dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksinya karena banyak pelaku yang baru. Pelaku yang lama hanyalah ketua TPK dan Tim Pemantau. sehingga membuat ketua TPK sangat dominan dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan bahkan untuk pembuatan proposal usulan kegiatan ketua TPK ikut membuat padahal itu adalah tugas dari Tim Penulis Usulan.
4.	Bp. Fajar, ST (Fasilitator Kecamatan)	18-3-2013	1. Implementasi	<ol style="list-style-type: none"> Selama saya mendampingi proses perencanaan hingga pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir, para pelakunya memang kurang tanggap dan kurang aktif untuk bertanya tentang PNPM Mandiri Perdesaan. Sehingga untuk hasil pelaporan terkadang banyak yang kurang sesuai pengisiannya. Selama saya mendampingi pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir, pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir berjalan sesuai dengan alur kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang ada di PTO. Memang saya akui tingkat partisipasi dari masyarakat cukup rendah. Hal ini dapat dilihat dalam tingkat kehadiran masyarakat dalam Musdes yang diadakan oleh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat desa. Dan untuk tahun 2011 ini, dalam penentuan usulan kegiatan cukup terlambat sehingga pada saat MAD belum bisa memberikan gambaran kasar tentang jenis kegiatan yang akan didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan. Untuk pelaku PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2011 saya menilai kurang aktif dalam berbagai hal yang berkaitan dengan PNPM Mandiri Perdesaan. Keterlambatan pelaporan hasil kegiatan di Kelurahan Kotawaringin Hilir terjadi karena masih banyak pelaku yang tidak memahami PNPM Mandiri Perdesaan padahal sosialisasi tentang PNPM Mandiri Perdesaan telah dilakukan pada saat MAD Sosialisasi di kecamatan Kotawaringin Lama oleh pelaku di kecamatan.
			2. komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> Menurut pendapat saya, pelaku di Kelurahan Kotawaringin Hilir dalam melaksanakan koordinasi antar pelaku di desa kurang baik. Sepengetahuan saya, para pelaku di desa jarang mengadakan pertemuan karena biasanya dalam kegiatan musyawarah di tingkat desa saya diundang untuk menghadiri pertemuan tersebut dan memang sudah menjadi tugas saya untuk mendampingi pelaku PNPM Mandiri di tingkat desa dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Selain itu untuk berkoordinasi dengan pelaku di tingkat kecamatan kurang berjalan dengan baik, karena saya menilai untuk pelaku PNPM Mandiri Perdesaan Kelurahan Kotawaringin Hilir tahun 2011 ini kurang aktif bertanya atau koordinasi dengan kami yang ada di kecamatan. Sosialisai dan koordinasi dengan pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir telah berjalan sesuai dengan PTO tetapi saya akui memang belum optimal karena menurut saya DOK pelatihan kurang mencukupi yaitu sebesar Rp.45.000.000,- untuk 11 pelatihan wajib untuk 17 desa yang ada di Kelurahan Kotawaringin Hilir. Sejauh ini kami dalam mendampingi pelaku di Kelurahan Kotawaringin Hilir, para pelaku di

				<p>Kelurahan Kotawaringin Hilir agak lambat dalam menindaklanjuti teguran dari pelaku di kecamatan. Kami telah memberikan kelonggaran dalam batas waktu pengumpulan laporan tetapi kurang ditindaklanjuti dengan baik.</p> <p>4. seharusnya dalam penyampaian informasi tentang PNPM Mandiri Perdesaan itu ditujukan kepada seluruh masyarakat tetapi karena tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir kurang maka akhirnya pelaku di Kelurahan Kotawaringin Hilir mengatasinya dengan emmberikan undangan kepada perwakilan masing- masing dusun untuk mengikuti musyawarah desa</p>
			3. Sumber daya	<p>1. kami mengakui bahwa lambatnya dalam penguasaan tentang informasi PNPM mandiri Perdesaan di karenakan sumber daya manusia pelaku di Kelurahan Kotawaringin Hilir belum memadai karena kebanyakan pelaku hanya berpendidikan ;SMA bahkan ada yang berpendidikan SR atau setara dengan SD.</p> <p>2. kantor/posko bagi pelaku PNPM Mandiri Perdesaan kurang layak karena idealnya setiap tim memiliki tempat tersendiri dalam penyimpanan berkas dan tempatnya terlalu sempit.</p> <p>3. dalam tahun 2011 ini, sampai dengan bulan Agustus baru mengadakan 3 (tiga) kali pelatihan yaitu pelatihan untuk KPMD, pelatihan administrasi dan pelatihan bagi tim pemelihara karena dana untuk pelatihan tahun 2011 tidak mencukupi jika untuk mengadakan 11 (sebelas) pelatihan wajib dalam PNPM Mandiri Perdesaan, maka kami hanya melakukan pelatihan yang dibutuhkan saja.</p>
			4. Disposisi/sikap pelaksana	<p>1. Kelurahan Kotawaringin Hilir dalam pengajuan usulan kegiatan sudah sesuai dengan PTO yaitu dengan melakukan musdes perencanaan tetapi kendalanya adalah Ibutuh waktu yang cukup lama karena tingkat kehadiran masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir dalam musdes perencanaan cukup rendah sehingga dilakukan imusdes ulang untuk mamamntapkan jenis usulan kegiatan apa yang akan diajukan dalam MAD.</p> <p>2. dari pada semua kegiatan dalam tahun ini terhambat gara-gara usulan kegiatan dari desa belum ada titik terangnya, maka lebih baik TPK bersama dengan Kepala Desa yang menentukan usulan kegiatan yang akan diajukan pada MAD.</p> <p>3. pembagian dana BLM bagi masing-masing desa di kecamatan Kotawaringin Lama telah sesuai dengan usulan yang diajukan dari masing-masing desa. Kegiatan pembagian dana BLM ini dilaksanakan dalam MAD penetapan Usulan. Setelah didapatkan data pembagian dana BLM untuk masing-masing desa, Camat Kotawaringin mengeluarkan Surat Penetapan Camat Nomor : 414.1 / 33 / 2011 tentang Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2011.</p> <p>4. masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir tidak mau dilakukan pendataan ulang tentang pemetaan RTM, mereka menginginkan data yang sama dengan tahun lalu. Kami selaku pendamping bagi pelaku di desa hanya bisa menghimbau tentang pentingnya pembuatan peta</p>

				<p>sosial/kemiskinan karena dengan pembuatan peta tersebut kami dapat melihat dan merencanakan kegiatan PNPM mandiri Perdesaan yang akan dilakukan supaya bisa tepat sasaran. Namun masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir tidak mau diadakan pemetaan tiap tahun. Biar bagaimanapun segala keputusan berada di tangan masyarakat, kami hanya pelaksana dan memfasilitasi saja.</p> <p>5. tujuan dari kegiatan SPP adalah untuk memberikan modal kepada masyarakat miskin terutama kaum perempuan untuk membuka usaha atau pengembangan usahanya. Selain itu juga menghindarkan masyarakat dari rentenir. Selain ini rentenir sangat dekat dengan masyarakat, memudahkan masyarakat tetapi jumlah tagihan yang sangat mencekik leher bagi masyarakat miskin. Dari SPP ini diharapkan pelaku di desa mampu lebih dekat dengan masyarakat dan dapat membantu masyarakat dalam peningkatan hidup masyarakat miskin. Hal ini telah dilujang dengan syarat pengajuan bantuan SPP sangat mudah yaitu dengan memberikan foto copy KTP dari masyarakat yang akan mengajukan bantuan. Penunggakan yang terjadi di Kelurahan Kotawaringin Hilir saya melihat-dikarenakan pelaku di desa kurang itegas jika ada kelompok masyarakat yang mengajukan pinjaman yang kurang tertib dalam hal penyeteroran sehingga masyarakat kurang impedulikan teguran-teguran yang diberikan oleh pelaku di desa.</p>
			5.Struktur birokrasi	<p>1. sebenarnya sudah ada SOP untuk UPK dan TPK. tetapi masih dalam bentuk draf dan belum ditetapkan sehingga belum bisa dilakukan dengan baik. Selain itu juga masih banyak pelaku di desa yang belum mengetahui PNPM Mandiri Perdesaan. Pelatihan yang kami lakukan memang belum optimal karena keterbatasan dana DOK Pelatihan serta dari pihak pelaku di tingkat desa sendiri tingkat kehadiran dalam pelatihan sangat rendah. Sehingga kami hanya melakukan pelatihan yang dibutuhkan dan yang pokok-pokok saja.</p> <p>2. di Kelurahan Kotawaringin Hilir belum ada pembagian tugas yang merata terlihat dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, TPK adalah pelaku yang paling dominan dalam bekerja sedangkan tim yang lain kurang mampu memahami tupoksi masing-masing yang sudah tercantum dalam PTO.</p>
5.	Bp. Samijan, (PjOK)	18-3-2013	1. Implementasi	<p>1. Saya melihat untuk Kelurahan Kotawaringin Hilir telah mengisi map 1-7 dengan cukup baik walaupun sering revisi. Map 1-7 terdiri dari map 1 berisi dokumen perencanaan, map 2 berisi arsip-arsip dalam pelaksanaan kegiatan, map 3 berisi dokumen ketenagakerjaan, map 4 berisi dokumen bahan dan alat, map 5 berisi dokumen pertanggungjawaban dana, map 6 berisi dokumen pelaporan, map 7 berisi transparansi pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Tetapi saya melihat pelaku di Kelurahan Kotawaringin Hilir belum melengkapi pengisian dari masing-masing map yang telah ditetapkan. Bisa dikatakan administrasi PNPM Mandiri Perdesaan Kelurahan Kotawaringin Hilir kurang baik. Selain itu Kelurahan Kotawaringin</p>

			<p>Hilir terlambat dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, yang mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan, yang seharusnya bulan Agustus ini sudah selesai kegiatan sampai 100%, inamun Kelurahan Kotawaringin Hilir belum mencairkan dana BLM tahap III.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dalam hal pemilihan personil, pengajuan usulan kegiatan, pengadaan barang dalam pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan aturan yang ada pada PTO PNPM Mandiri Perdesaan. Namun, dalam hal pelaporan dan pengajuan usulan serta penampungan gagasan-gagasan dari masyarakat cukup lama karena selain masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir yang kebanyakan ibekerja sebagai buruh, dari pihak pelaku di tingkat desa kurang aktif dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan terutama KPMD kurang membaur dengan masyarakat sehingga gagasan-gagasan dari masyarakat kurang digali dengan baik 3. Tahun ini Kelurahan Kotawaringin Hilir administrasinya kurang baik terutama dalam hal pelaporan hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Pelaku Kelurahan Kotawaringin Hilir sering terlambat dalam membuat laporan kegiatan kepada UPK kecamatan Kotawaringin Lama. Hal ini dikarenakan pelakunya banyak yang baru sehingga mungkin belum begitu memahami PNPM Mandiri Perdesaan. 4. Menurut saya kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir sudah cukup tepat sasaran karena usulan kegiatan yang diajukan oleh pelaku di Kelurahan Kotawaringin Hilir merupakan hasil dari gagasan dari masyarakat dan untuk kegiatan SPP sangat membantu bagi masyarakat miskin dalam peningkatan usaha atau membantu dalam kelangsungan hidup masyarakat miskin Kelurahan Kotawaringin Hilir. Tetapi pelaku PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2011 di Kelurahan Kotawaringin Hilir kurang bisa bekerja dengan baik terutama KPMD. KPMD saya nilai lamban dalam bekerja sehingga dalam penggalian gagasan dari masyarakat butuh waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan tingkat kehadiran masyarakat sangat rendah dalam kegiatan musyawarah selain itu juga KPMD Kelurahan Kotawaringin Hilir kurang aktif atau membaur dalam masyarakat
		2. komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya sering menghimbau kepada pelaksana di desa untuk sering bertanya kepada fasilitator kecamatan, jangan hanya mengandalkan fasilitator datang meninjau ke desa. Hal ini dilakukan agar Kelurahan Kotawaringin Hilir tidak ketinggalan informasi tentang PNPM Mandiri Perdesaan. Kurangnya koordinasi ini terlihat pada tahun ini saja Kelurahan Kotawaringin Hilir belum mencairkan dalaBLM tahap III karena keterlambatan pelaporan. Takutnya dengan adanya kejadian ini, Kelurahan Kotawaringin Hilir tidak bisa ikut kompetisi tingkat kecamatan dalam hal usulan ikegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan yang lebih parahnya lagi Kelurahan Kotawaringin Hilir bisa tidak mendapatkan bantuan dana BLM untuk kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan tahun berikutnya karena keterlambatan administrasi PNPM Mandiri Perdesaan.

				<ol style="list-style-type: none"> 2. ;Sebenarnya informasi tentang PNPM Mandiri Perdesaan sudah cukup jelas dituangkan dalam Pedoman Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan. Namun, terkadang dari pelaksana desa sendiri malas untuk membaca dan memahami sendiri. Mereka harus dibimbing oleh Fasilitator Kecamatan dalam pemahaman PTO PNPM Mandiri Perdesaan. 3. Pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir selalu menerima iperingatan-peringatan dari Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) berupa teguran dan peringatan akan kewajibannya kepada UPK yaitu memberikan laporan bulanan, semesteran, tahunan serta setoran simpan pinjam perempuan (SPP) kepada pelaksana di kecamatan. Karena lemahnya payung hukum dalam PNPM mandiri Perdesaan maka terkadang teguran dan peringatan sering kali diabaikan oleh pelaksana di desa. Ketidakadaan sanksi yang jelas bagi pelanggar menyebabkan hal ini menjadi suatu hambatan dalam konsistensi pelaksanaan PNPM mandiri perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir. Kami hanya bisa memberikan sanksi lokal yang telah disepakati dalam MAD, itupun kadang tidak dipatuhi oleh pelaku di desa. 4. Saya menilai tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir cukup rendah karena dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir cukup rendah dalam musyawarah desa yang dilakukan oleh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir.
			3. Sumber daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. secara keseluruhan untuk tingkat desa sumber daya yang dimiliki kurang memadai, walaupun lebih banyak pelaku di desa yang berpendidikan lulusan ;SMA daripada sarjana, tetapi masih ada yang berpendidikan SR atau setara dengan SD yaitu untuk tim pemantau. 2. saya melihat untuk kelayakan sebuah kantor bagi pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir itu belum layak karena hanya dengan 1 (satu) ruangan saja untuk bekerja 5 (lima) tim pelaku PNPM Mandiri Perdesaan yaitu KPMD, TPK, TPU, Tim Pemeliharaan, dan Tim Pemantau. 3. cara peningkatan kinerja para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir yaitu dengan diadakannya pelatihan-pelatihan bagi para pelaku di desa tentang PNPM Mandiri Perdesaan. Biasanya kami lakukan bersama Fasilitator Kecamatan, namun yang hadir hanya sebagian saja dari para ipelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir
			4. Disposisi/sikap pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan musyawarah desa yang dilaksanakan oleh pelaku di Kelurahan Kotawaringin Hilir kurang berjalan dengan baik. Kendalanya adalah banyak masyarakat yang tidak hadir dalam musyawarah desa tersebut sehingga perlu dilakukan musyawarah lagi untuk memantapkan usulan kegiatan apa saja yang akan diusulkan. 2. atas kebijakan saya kegiatan musyawarah desa yang sedikit dihadiri oleh masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir, maka saya menyarankan agar penentu dalam ipenentuan usulan kegiatan dari desa agar ditangani oleh TPK saja karena jika menunggu untuk mufakat

				<p>dan sampai melakukan musdes ulang itu sangat lama dan akhirnya akan menghambat pekerjaan Ibagi pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penerimaan dana BLM untuk Kelurahan Kotawaringin Hilir sudah sesuai dengan usulan. Alhamdulillah kecamatan Kotawaringin Lama mendapatkan dana sebesar Rp. 3.000.000.000,- yang bisa membiayai semua usulan yang diajukan oleh tiap- tiap desa. 4. masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir tidak mau diadakan pendataan ulang tentang RTM karena mereka menganggap data yang sudah ada dari tahun 2009 merupakan data yang sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan dianggap adil jika membagikan bantuan PNPM Mandiri Perdesaan dengan menggunakan data tersebut. 5. Tunggakan yang terjadi di Kelurahan Kotawaringin Hilir dikarenakan sikap pelaku di desa yang kurang tegas dalam menanggapi masyarakat yang kurang tertib dalam ipenyetoran SPP. Kami hanya bisa memberikan teguran bagi masyarakat yang belum bisa tertib dalam pelunasan SPP karena tidak ada sanksi yang jelas dan tegas tentang permasalahan tersebut.
			5.Struktur birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di kecamatan Kotawaringin Lama tidak ada Standar Operating Prosedurs (SOP) yang mendukung PNPM Mandiri Perdesaan. Kami hanya berpatokan pada PTO dan penjeiasannya. Saya merasa memang kurang jika hanya PTO saja karena pelaku di desa terkadang malas untuk membaca PTO tersebut. 2. menurut saya pembagian tanggung jawab para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir masih kurang optimal karena saya melihat bahwa yang sibuk dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir hanya TPK saja, tim yang lain tidak sesibuk TPK. Memang sudah ada pembagian tugasnya masing-masing tetapi menurut saya kurang adanya koordinasi antar para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 28 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD), BADAN PENGAWAS UNIT PENGELOLA KEUNGAN (BP UPK), TIM VERIFIKASI PERGULIRAN, TIM PENYEHATAN PINJAMAN, TIM PELATIH MASYARAKAT DAN TIM PELAKSANA PELATIHAN MASYARAKAT KECAMATAN LOKASI PNPB MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemeliharaan dan Pelestarian hasil hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) perlu ada kelembagaan yang bertugas untuk melaksanakan pemeliharaan dan pelestarian;

b. bahwa untuk kesinambungan dan kelancaran huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan kelembagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Kotawaringin Barat;

c. bahwa untuk menetapkan kelembagaan tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, tambahan 72, Tambahan Negara republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagai mana di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
6. Surat Menteri Dalam Negeri RI No : 414.2/3717/PMD tanggal 5 November 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan;
7. Surat Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri No : 414.2/3837/PMD tanggal 16 Agustus 2010 tentang Panduan Pengelolaan Pelatihan Masyarakat;

- Memperhatikan** :
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Kerjasama Antar Desa masing masing Kecamatan
 2. Standar dan Opersional Prosedur (SOP) Badan Pengawas UPK masing masing Kecamatan
 3. Standar dan Opersional Prosedur (SOP) Tim Verifikasi Perguliran masing masing Kecamatan
 4. Standar dan Opersional Prosedur (SOP) Tim Penyehatan Pinjaman masing masing Kecamatan
 5. Hasil Keputusan Musyawarah Antar Desa (MAD) di masing masing Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang Penetapan Badan, Kerjasama Antar Desa (Bkad), Badan Pengawas Unit Pengelola Keungan (BP UPK), Tim Verifikasi Perguliran, Tim Penyehatan Pinjaman, Tim Pelatih Masyarakat, Tim Pelaksana Pelatihan Masyarakat Kecamatan Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat

- PERTAMA** : Menetapkan Nama-Nama pada Lembaga Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Badan Pengawas Unit Pengelola Keungan (BP UPK), Tim Verifikasi Perguliran (TV Perguliran), Tim Penyehatan Pinjaman, Tim Pelatih Masyarakat, Tim Pelaksana Pelatihan Masyarakat Kecamatan Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat

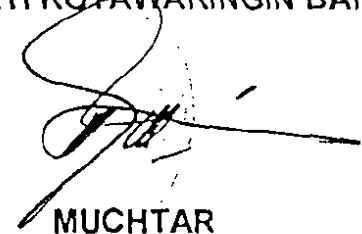
KEDUA : Kelembagaan sebagaimana Diktum Pertama mempunyai tugas dan tanggungjawab adalah sebagai berikut :

1. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) mempunyai Tugas dan Tanggungjawab memimpin musyawarah antar desa dan musyawarah lain yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan program dan memfasilitasi kegiatan yang bersifat strategis perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi kegiatan.
2. Badan Pengawas Unit Pengelola Keuangan (BP UPK) mempunyai Tugas dan Tanggungjawab melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pengelolaan UPK serta melaporkan hasilnya dengan membuat Berita Acara Pengawasan kepada pengurus BKAD dan disampaikan pada Forum MAD- sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali
3. Tim Verifikasi Perguliran mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan verifikasi administratif dan lapangan terhadap semua proposal usulan perguliran, kelompok pengusul, calon peminjam dengan menggunakan format yang telah disiapkan sesuai standar yang berlaku dan melaporkan secara tertulis melalui Berita Acara Verifikasi kepada Tim Pendanaan atau BKAD melalui Ketua UPK.
4. Tim Penyelesaian Pinjaman mempunyai tugas dan tanggungjawab mengidentifikasi dan mengelompokkan masalah tunggakan kelompok dan atau penyelewengan dana oleh anggota atau pengurus kelompok, melakukan tindak lanjut dan mencarikan solusi atas masalah tunggakan dan atau penyelewengan dana, mengawasi dan memantau atas tindak lanjut yang sudah disepakati antar Tim dan Subyek Masalah (Pelaku), menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Pengurus BKAD, melakukan pemanggilan atas pelaku masalah, baik kelompok, anggota kelompok atau oknum yang menjadi pelaku masalah serta mengambil langkah hukum yang diperlukan.
5. Tim Pelatih Masyarakat mempunyai tugas dan tanggungjawab menentukan tujuan, sasaran dan peserta pelatihan, menyusun matrik kurikulum, menyiapkan modul, materi, perangkat lunak keperluan pelatihan, memfasilitasi pelaksanaan pelatihan dan menyampaikan materi sebagai narasumber pelatihan serta melakukan evaluasi terhadap jalannya pelatihan apakah sesuai dengan sasaran pelatihan atau tidak :
6. Tim Pelaksana Pelatihan Masyarakat mempunyai tugas dan tanggungjawab menyusun proposal untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan yang memuat rancangan kegiatan seperti: materi dan jadwal pelatihan,, dan rincian anggaran biaya, menyiapkan sarana akomodasi, konsumsi dan kelengkapan administrasi pelatihan

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya harus berpedoman pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan dan penjelasannya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Standar dan Operasional Prosedur (SOP) masing-masing.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada dana kelembagaan BKAD dan atau dana kegiatan di masing masing UPK kecamatan sesuai dengan kemampuannya.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2011 sampai dengan 31 Maret 2014 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PANGKALAN BUN.
 PADA TANGGAL : 01 APRIL 2011.

PIh. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



MUCHTAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah
 up. Kepala BPM Prov. Kalteng
 di - Palangka Raya.
2. Inspektur Kab. Ktw. Barat
 di - Pangkalan Bun.
3. Camat se- Kotawaringin Barat.
4. Fasilitator Kabupaten PNPM-MP Kab
 Ktw. Barat di - Pangkalan Bun.
5. Masing - masing yang bersangkutan.

Lampiran III : Keputusan Bupati Kotawaringin Barat.

Nomor : 28 Tahun 2011

Tanggal : 1 April 2011

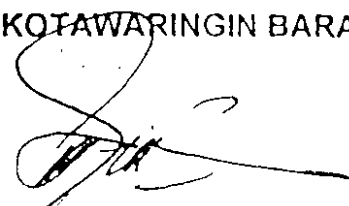
Tentang : PENETAPAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD),
BADAN PENGAWAS UNIT PENGELOLA KEUNGAN (BP UPK),
TIM VERIFIKASI PERGULIRAN, TIM PENYEHATAN PINJAMAN,
TIM PELATIH MASYARAKAT, TIM PELAKSANA PELATIHAN
MASYARAKAT KECAMATAN LOKASI PNPM MANDIRI
PERDESAAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DAFTAR PENGURUS

TIM VERIFIKASI PERGULIRAN KECAMATAN LOKASI PNPM MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

No	Kecamatan	Nama	Jabatan/Pengurus.Lembaga
1.	Kotawaringin Lama	Musyawir	Ketua Tim Verifikasi Perguliran
		Kurnia	Sekretaris Tim Verifikasi Perguliran
		Fuadi	Anggota Tim Verifikasi Perguliran
2.	Arut Selatan	Siti Mufadilah	Ketua Tim Verifikasi Perguliran
		Supriyani	Sekretaris Tim Verifikasi Perguliran
		Siti Nur Asni	Anggota Tim Verifikasi Perguliran
3	Arut Utara	Nangky Anwar	Ketua Tim Verifikasi Perguliran
		Karsinah	Sekretaris Tim Verifikasi Perguliran
		Mastinasari	Anggota Tim Verifikasi Perguliran
4.	Kumai	H. Abdurrohlim	Ketua Tim Verifikasi Perguliran
		Murimin	Sekretaris Tim Verifikasi Perguliran
		Siti Hamidah	Anggota Tim Verifikasi Perguliran
5.	Pangkalan Lada	Dwi Humi Sundari	Ketua Tim Verifikasi Perguliran
		Muryati	Sekretaris Tim Verifikasi Perguliran
		Rahmad A. Wibawanto	Anggota Tim Verifikasi Perguliran
6.	Pangkalan Banteng	Dewi Purwati	Ketua Tim Verifikasi Perguliran
		Asmin	Sekretaris Tim Verifikasi Perguliran
		Siti Filiani	Anggota Tim Verifikasi Perguliran

Pih. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



MUCHTAR



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 24 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) SEBAGAI PENGELOLA DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) KECAMATAN LOKASI PNPM MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya kelancaran pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri-Perdesaan dan bantuan kepada masyarakat di Kecamatan masing-masing penerima dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM);

b. bahwa untuk kelancaran proses keuangan di Kecamatan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri-Perdesaan tersebut diperlukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas, pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri-Perdesaan Tahun 2011 perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Perangkat Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2000 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Memperhatikan :
1. Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.2/ 3717 /PMD tanggal 5 Nopember 2008 perihal Petunjuk Teknis Operasional PNPMD Mandiri Perdesaan.
 2. Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa an. Mendagri Nomor : 414.2/615/PMD tanggal 4 Pebruari 2011 perihal Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama PNPMD Mandiri Perdesaan T.A. 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Mandiri Perdesaan : (a) BLM Dana Kegiatan; (b) BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK) Perencanaan; (c) BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK) Pelatihan Masyarakat; dan Dana Operasional Kegiatan Ruang Belajar Masyarakat (DOK RBM).
- Tugas – tugas UPK dalam kaitannya sebagai pengelola BLM adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan pembukaan rekening dengan spesimen ketua dan seluruh fasilitator kecamatan yang bertugas.
 - b. Membuat administrasi dan pelaporan dana BLM.
 - c. Membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada masyarakat.
- KEDUA** : Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), sebagaimana tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) masing-masing Kecamatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PANGKALAN BUN.

PADA TANGGAL : | MARET 2011.

PIh. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



MUCHTAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah
up. Kepala BPM Prov. Kalteng
di - Palangka Raya.
2. Kepala KPPN Pangkalan Bun
di - Pangkalan Bun.
3. Inspektur Kab. Ktw. Barat
di - Pangkalan Bun.
4. Kepala DPKD Kab. Ktw. Barat
di - Pangkalan Bun.
5. Camat se- Kotawaringin Barat.
6. Koordinator Fasilitator Kabupaten PNPM-
MP Kab ktw. Barat di - Pangkalan Bun.
7. Masing - masing yang bersangkutan.
8. Arsip.

Nomor : 24 Tahun 2011, 41633.pdf
 Tanggal : 1 Maret 2011
 Tentang : Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM - Mandiri Perdesaan

ALOKASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)

LOKASI UPK	NAMA PENGURUS UPK	ALOKASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)						JUMLAH
		DANA KEGIATAN	DOK PERENC (APBN)	DOK PELMAS LANJUTAN (APBN)	DOK PELMAS TA. 2011 (APBN)	DOK RBM LANJUTAN (APBN)	DOK RBM TA. 2011 (APBN)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kecamatan Kotawaringin Lama	Ketua : Lis Purwanti Sekretaris : Fuadi Bendahara : Supardi	450.000.000	63.500.000	75.995.000	110.760.000			700.255.000
Kecamatan Arut Selatan	Ketua : Supriyani Sekretaris : Ambar Prasetyowati Bendahara : Riza Kurniawati	450.000.000	63.500.000	84.125.000	122.820.000	300.000.000	300.000.000	1.320.445.000
Kecamatan Kumai	Ketua : Siti Hamidah Sekretaris : Rusdi Bendahara : Ratna Ariyantika	450.000.000	63.500.000	75.995.000	110.760.000			700.255.000
Kecamatan Arut Utara	Ketua : Mastina Sari Sekretaris : - Bendahara : Isa Anugrah P Dayani	450.000.000	53.500.000	41.180.000	74.580.000			624.260.000
Kecamatan Pangkalan Lada	Ketua : Rahmadi Ari W Sekretaris : Maya Sukmawati Bendahara : Yekti Andaniwarah	1.500.000.000	53.500.000	41.180.000	64.800.000			1.659.480.000
Kecamatan Pangkalan Banteng	Ketua : Sukadi Sekretaris : Siti Filiani Bendahara : Sarbiah	1.500.000.000	53.500.000	41.180.000	64.800.000			1.659.480.000
TOTAL		4.800.000.000	356.000.000	359.655.000	548.520.000	300.000.000	300.000.000	6.664.175.000

DITETAPKAN DI : PANGKALAN BUN
 PADA TANGGAL : 1 MARET 2011

Pih. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MUCHTAR

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N K O T A W A R I N G I N B A R A T
K E C A M A T A N K O T A W A R I N G I N L A M A

JL. Ampi Km. 01 Telp. (0532) 20722001 Kode Pos 74161

KEPUTUSAN CAMAT KOTAWARINGIN LAMA
NOMOR : 414.2/ 03 /PMD

T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM VERIFIKASI (TV)
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
(PNPM-MPd)

KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA TAHUN ANGGARAN 2011

CAMAT KOTAWARINGIN LAMA

- Membaca** : 1. Petunjuk pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.
 2. Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 15 Tahun 2010; tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Pengelola Keuangan Dana Usaha Bersama Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010.
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran pengelolaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2010, maka perlu dibentuk Tim Verifikasi (TV).
 2. Bahwa untuk menunjuk Tim Verifikasi (TV) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kotawaringin Lama.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 06 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan instansi Vertikal di Daerah.
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 1993 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 362 Tahun 2000 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.


Memperhatikan : 1. Kebutuhan Tim Verifikasi (TV).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
 Verifikasi tanggal 10 Januari 2011 di Kantor Kecamatan Kotawaringin Lama.

MEMUTUSKAN**MENETAKAN :**

- PERTAMA** : Surat Penetapan Camat Kotawaringin Lama Tentang Tim Verifikasi (TV) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Kotawaringin Lama, pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Fungsi Tim Verifikasi (TV) sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis Operasional serta petunjuk lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd).
- KETIGA** : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dana Operasional Kegiatan (DOK) PNPM-MPd Kecamatan Kotawaringin Lama serta swadaya dan bantuan lain yang tidak mengikat.
- Surat Keputusan ini berlaku selama Tim Verifikasi melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkan hingga pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Penetapan Usulan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KOTAWARINGIN
PADA TANGGAL : 19 JANUARI 2011

CAMAT KOTAWARINGIN LAMA


Drs. T. ALISYAHBANA. M.Si.
NIP. 19680730 198911 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat
Cq. Tim Koordinasi PNPM-MPd
2. Fasilitator Kab. Ktw Barat
3. Fasilitator Kec. Ktw Lama
4. Semua Kepala Desa Se – Kec. Ktw Lama
5. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Camat Kotawaringin Lama

Nomor : 414.2/03 /PMD

Tanggal : 19 Januari 2011

No	Nama	L/P	Jabatan	Bidang Keahlian
1.	H. NAPIS	L	Ketua	KESEHATAN
2.	HANS F KAMIN	L	Sekretaris	BANGUNAN
3.	CUMBIE	L	Anggota	PENDIDIKAN
4.	SUPATUR	L	Anggota	EKONOMI
5.	RAHMILIA	P	Anggota	BANGUNAN

CAMAT KOTAWARINGIN LAMA

Drs. T. ALISYAHBANA, M.Si.
NIP. 19680730 198911 1 001

**PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM-INTEGRASI)
KELURAHAN KOTAWARINGIN HILIR
KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PERTANGGUNGJAWABAN TAHAP I
PNPM INTEGRASI KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA
TAHUN 2011**

Palam rangka pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Integrasi) Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011, maka pada :

Hari / Tanggal	: Senin, 21 Nopember 2011
Waktu	: Pukul 08.00 WIB s/d 10.00 WIB
Tempat	: Aula Posyandu Kelurahan Kotawaringin Hilir

Telah diadakan Musyawarah Desa (MD) Pertanggungjawaban Tahap I Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Integrasi) yang dihadiri oleh unsur-unsur masyarakat yang berjumlah orang, *(daftar hadir terlampir)*

A. Materi :

1. Penyampaian Laporan Pekerjaan oleh TPK
2. Penyampaian Pertanggungjawaban Penggunaan Dana oleh TPK
3. Evaluasi Kinerja TPK
4. Membahas rencana pekerjaan tahap berikutnya.

B. Pimpinan dan Nara Sumber

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Pimpinan Musyawarah | : MUSYAWIR |
| 2. Sekretaris | : NURHAYATI |
| 3. Nara Sumber | : 1. LIA SUSANTI Dari FK/FT
2. NENENG I. KURNIA, SSTP Dari Kel. Ktw.Hilir |

Dari Musyawarah Pertanggungjawaban tersebut, maka hasil yang menjadi keputusan adalah sebagai berikut :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Kotawaringin, 21 Nopember 2011


Pimpinan Musyawarah

Sekretaris Musyawarah




MUSYAWIR


NURHAYATI

Mengetahui,
An. Lurah Kotawaringin Hilir

NENENG KURNIA, SSTP.
NIP. 19831224 200212 2 001



Menyetujui : Wakil Masyarakat :

- | | | |
|-----------------------|------------------------------|--|
| 1. Gusti Hidayatullah | Alamat : RT.02 Kel.Ktw.Hilir | Tanda Tangan  |
| 2. Endang Fitri P. | Alamat : RT.05 Kei.Ktw.Hilir | Tanda Tangan  |
| 3. Said Saripudin | Alamat : RT.04 Kel.Ktw.Hilir | Tanda Tangan  |

**PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MANDIRI PERDESAAN
SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SPPB)**

Nomor : 036 / UPK – KOLAM/PNPM-MP/V/1 2011

Tanggal : Tahun 2011

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

I. Nama : **LIS PURWANTI**

Jabatan : Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan Musyawarah Antar Desa Tanggal 09 Agustus 2011, bertindak atas nama Forum, Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

II. Nama : **MUSYAWIR**

Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan Program nasional Pemberdayaan masyarakat – mandiri Perdesaan, Kel. Ktw. Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat

Berdasarkan Musyawarah Desa yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2011 di tunjuk sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan PNPM-MP, Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Dengan ini menyepakati hal-hal sebagai berikut :

(25) Pihak Pertama, menyetujui pembayaran dana Bantuan Program Pengembangan Kecamatan kepada Pihak Kedua sebesar **Rp. 46.904.500,- (Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)**.

(26) Dana ini disetujui untuk membiayai kegiatan berikut :

(a) Nama Kegiatan : Simpan Pinjam Perempuan
Jumlah Dana : Rp. (dengan huruf)
Jasa Pinjaman : % Tahunan
Sifat Bantuan : **Pinjaman**

(b) Nama Kegiatan : Kesehatan
Jumlah Dana : Rp (dengan huruf)
Sifat Bantuan : **Bantuan Lepas**

(c) Nama Kegiatan : Pendidikan
Jumlah Dana : Rp..... (dengan huruf)
Sifat Bantuan : **Bantuan Lepas**

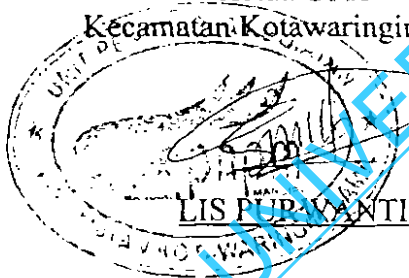
(d) Nama Kegiatan : Pembangunan Sarana / Prasarana
Jumlah Dana : **Rp. 44.558.500,- (Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)**.

Sifat Bantuan : **Bantuan Lepas**

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka (Sembilan Puluh Lima Hari) Sejak Pencairan Tahap 1 Ke desa

- (m) Biaya administrasi dan operasional UPK sebesar Rp. 938.000,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (n) Biaya administrasi dan operasional TPK sebesar Rp. 1.408.000,- (Satu Juta Empat Ratus Delapan Ribu Rupiah).
- (27) Pihak Kedua sepakat dan berjanji akan mengembalikan dana Bantuan yang bersifat Pinjaman kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam jangka waktu bulan terhitung sejak penyerahan dana kepada Pihak Kedua oleh Pihak Pertama. Pengembalian oleh Pihak Kedua disertai jasa pinjaman sebesar % per tahun. Jumlah keseluruhan dana yang harus dikembalikan Pihak Kedua sampai selesai jangka waktu pinjaman adalah Rp. (dengan huruf). Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat memenuhi kewajibannya, kesempatan Pihak Kedua untuk mendapatkan dana Bantuan PNPM-MPd di masa yang akan datang akan hilang.
- (28) Pihak Kedua sepakat dan berjanji akan memelihara prasarana dan sarana melalui swadaya masyarakat dengan sebaik-baiknya.
- (29) Pihak Kedua akan menyerahkan dana kepada kelompok masyarakat sesuai dengan usulan yang diajukan dan disepakati dalam Musyawarah Antar Desa. Atas penyerahan dana tersebut harus dibuat Berita Acara serah Terima / Tanda Terima.
- (30) Pihak Pertama wajib menyebarluaskan SPPE ini melalui papan pengumuman paling sedikit di tiga tempat umum di desa. Rincian teknisnya akan diatur kemudian dalam Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP.

Pihak Pertama
Ketua UPK
Kecamatan Kotawaringin Lama

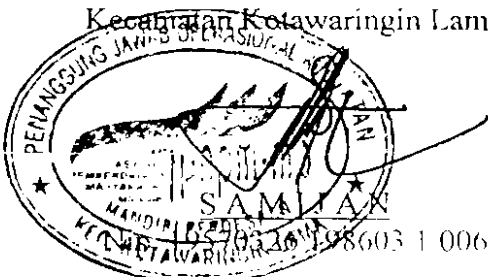


Pihak Kedua
Ketua TPK
Kel. Kotawaringin Hilir

MUSYAWIR

Mengetahui :

PjOK
Kecamatan Kotawaringin Lama



Lurah Kotawaringin Hilir

MUSYAR

Camat Kotawaringin Lama

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Propinsi : Kalimantan Tengah
 Kabupaten : Kotawaringin Barat
 Kecamatan : Kutawaringin Lama
 Desa : Kel. Ktw Hillir

No.RAB : 07/Ktw. Hillir
 Program : PNPM MPd
 Jenis Kegiatan : Peningkatan Gedung Posyandu
 Ukuran/dimensi : 10 x 6 M

NO	URAIAN	Volume			Satuan	Kategori Blaya	Harga Satuan Rp	Jumlah Swadaya Rp	Jumlah PNPM MP Rp	
		Dari Swaday	Dari PNPM MP	Total						
A	BAHAN	a	b	c = a + b	d	e	f	g = a x f	h = b x f	
1	Balok Ukn 10x10x4 m	-	14	14	Ptng	Ia	Rp 150.000	-	Rp 2.100.000	
2	Batu Belah	-	6	6	Kubik	Ia	Rp 300.000	-	Rp 1.800.000	
3	Balok Lanan 10x10x4 m	-	18	18	Ptng	Ia	Rp 40.000	-	Rp 720.000	
4	Balok Lanan 5x10x4 m	-	155	155	Ptng	Ia	Rp 20.000	-	Rp 3.100.000	
5	Reng	-	357	357	Ptng	Ia	Rp 5.000	-	Rp 1.785.000	
6	Papan Kampul 2x20x4 m	-	20	20	Kpng	Ia	Rp 15.000	-	Rp 300.000	
7	Papan Lanan 2x10x4 m	-	13	13	Kpng	Ia	Rp 20.000	-	Rp 260.000	
8	Semen Gersik	-	75	75	Sak	Ib	Rp 68.000	-	Rp 5.100.000	
9	Pasir	-	15	15	Kubik	Ia	Rp 200.000	-	Rp 3.000.000	
10	Multi Roof (Sentosa)	-	300	300	Lembar	Ib	Rp 28.000	-	Rp 8.400.000	
11	Paku Multi Roof	-	5	5	Kg	Ib	Rp 37.500	-	Rp 187.500	
12	Paku 4" Multi Roof	-	10	10	Kg	Ib	Rp 20.000	-	Rp 200.000	
13	Paku 2" Multi Roof	-	5	5	Kg	Ib	Rp 20.000	-	Rp 100.000	
14	Triplek	-	40	40	Lbr	Ia	Rp 58.000	-	Rp 2.320.000	
15	Paku Triplek	-	5	5	Kg	Ib	Rp 20.000	-	Rp 100.000	
16	Cat Tembok	-	30	30	Kg	Ib	Rp 10.000	-	Rp 300.000	
17	Cat Kilap	-	3	3	Kg	Ib	Rp 36.000	-	Rp 108.000	
18	Tanah Urug	-	8	8	Kubik	Ia	Rp 50.000	-	Rp 400.000	
19	Seng Perambung	-	15	15	M	Ib	Rp 12.000	-	Rp 180.000	
20	Baut	-	15	15	Buah	Ib	Rp 2.000	-	Rp 30.000	
21	Batu Bata	-	2.010	2.010	Buah	Ia	Rp 300	-	Rp 603.000	
22	Keramik	-	70	70	Dus	Ib	Rp 45.000	-	Rp 3.150.000	
23	Kerikil	-	5	5	Kubik	Ia	Rp 325.000	-	Rp 1.625.000	
24	Besi Ø 12	-	14	14	Ptng	Ib	Rp 50.000	-	Rp 700.000	
25	Besi Ø 6	-	13	13	Ptng	Ib	Rp 30.000	-	Rp 390.000	
							Sub Total 1)	Rp	-	Rp 36.958.500
B	ALAT									
1	Kuas Roof	2	-	2	Buah	II a	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp -	
2	Kuas Sapu	2	-	2	Buah	II a	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp -	
3	Ember	3	-	3	Buah	II a	Rp 10.000	Rp 30.000	Rp -	
4	Angkong	1	-	1	Buah	II a	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp -	
5	Papan Proyek	1	-	1	Ls	II a	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp -	
6	Papan Informasi	-	1	1	Ls	II a	Rp 100.000	Rp -	Rp 100.000	
							Sub Total 2)	Rp 510.000	Rp	Rp 100.000
C	UPAH									
1	Tukang	-	50	50	Hok	III a	75.000	-	3.750.000	
2	Pekerja	-	75	75	Hok	III a	50.000	-	3.750.000	
							Sub Total 3)	Rp	-	Rp 7.500.000
							Total Biaya (PNPM MP + Swadaya)	Rp	-	Rp 45.068.500
							Total Biaya PNPM MP	Rp	-	Rp 44.558.500
							Total Biaya Swadaya	Rp	-	Rp 510.000
Sumber Dana										

Catatan
 Sumbangan lahan tidak dimasukkan RAB tetapi diapokan dengan form. 0a, 0b dan 0c.
 Sumbangan dalam bentuk bahan, upah, dan alat, harus dalam kolom Volume dan Swadaya.
 Operasional TPK diapokan pada form Kelengkapan.

Kategori Blaya
 I a) Pembelian bahan hasil tenaga kerja
 I b) Pembelian bahan hasil industri

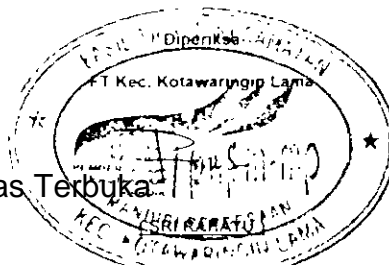
II a) Pembelian alat tangan
 II b) Pembelian perlengkapan alat tangan

III a) Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi
 III b) Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

Dibuat oleh

Ketua TPK


 (MUSYAWIR)




REKAPITULASI ANGGARAN BIAYA

Uraian : Kotawaringin Hilir
: Kotawaringin Lama

Kabupaten : Kotawaringin Barat
Propinsi : Kalimantan Tengah

Uraian	Kegiatan : Penambahan Gedung Posyandu			Bobot (%)	Kegiatan :			Bobot (%)	Kegiatan :			Total Biaya		
	Ukuran	: 10 x 6 M			Ukuran	:			Volume	:		PNPM MPd	Swadaya	Bobot (%)
	Jumlah	: 1 Unit			Jumlah	:			Jumlah	:				
	No RAB	: 07/Kohil/2010			No RAB	:			No RAB	:				
	PNPM - MP	Swadaya			PNPM - MP	Swadaya			PNPM - MP	Swadaya				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
BAHAN / MATERIAL (tidak perlu dirinci)	36.958.500	-	78,80							36.958.500	-	78,80		
ALAT (tidak perlu dirinci)	100.000	510.000	0,21							100.000	510.000	0,21		
UPAH (tidak perlu dirinci)	7.500.000	-	15,99							7.500.000	-	15,99		
JUMLAH	44.558.500	510.000	95,00							44.558.500	510.000	95,00		
Biaya OP UPK 2 %	938.000	-	2,00							938.000	-	2,00		
Biaya OP TPK 3 %	1.408.000	-	3,00							1.408.000	-	3,00		
JUMLAH TOTAL	46.904.500	510.000	100,00							46.904.500	510.000	100,00		
Jumlah Biaya Upah	7.500.000	-								7.500.000	-			
Jumlah HOK Kontruksi	125	-	HOK							125	-	HOK		

Disetujui Oleh
Kecamatan Kotawaringin Lama



P : 19570328 19803 1 006

Diperiksa Oleh
Fasilitator Teknik Kecamatan



(SRI RAHAYU)

Kotawaringin Lama, Tahun 2011
Dibuat Oleh
TPK Kelurahan Hilir



(MUSYAWIR)